

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH
TERHADAP KAPASITAS FISKAL DAERAH
(STUDI KASUS: TIGA PULUH PROVINSI DI INDONESIA
PADA PERIODE 2001-2005)**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat untuk Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi
Jurusan Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Oleh:

**Frida Febriana Fajrin
NIM. F0105056**

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2009**

HALAMAN PENGESAHAN

Telah disetujui dan diterima baik oleh team penguji Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret guna melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Ekonomi Pembangunan.

Surakarta, Mei 2009

Tim Penguji Skripsi

1. Dwi Prasetyani, SE. MSi sebagai Ketua ()
NIP 132304812
2. Drs. Hari Murti, MSi sebagai Pembimbing ()
NIP 131409791
3. Drs. Sumardi sebagai Anggota ()
NIP 131658544

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan Judul :

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH
TERHADAP KAPASITAS FISKAL DAERAH
(STUDI KASUS: TIGA PULUH PROVINSI DI INDONESIA
PADA PERIODE 2001-2005)**

Surakarta, Mei 2009

**Disetujui dan diterima oleh
Pembimbing**

(Drs. Hari Murti, MSi.)

NIP. 131409791

Motto

& Allah tidaklah mengubah keadaan suatu kaum, sebelum mereka merubah keadaan mereka sendiri.
(Q.S Ar Ra'ad 13:11)

Syukur adalah jalan yang mutlak untuk mendatangkan lebih banyak kebaikan kedalam hidup Anda.
(Marci Shimoff)

Manusia merencanakan, namun Tuhan yang menentukan.
(Thomas A. Kempis)

Ubahlah hidupmu dari yang berfokus pada apa yang tidak diinginkan, apa yang ditakutkan, & apa yang ingin dihindari. Menjadi berfokus pada apa yang diinginkan.
(Bill Harris)

Motivasi diri adalah bahan bakar bagi kehidupan. Percaya diri adalah gas penggerak kehidupan. Tahu diri adalah rem yang mengendalikan.
(Solikhin Abu Izzuddin)

Hadapilah semua masalah dalam hidupmu dengan selalu tersenyum. Meskipun diatas tangisan & rintihan hatimu sekalipun. Tetap berpikiran positif. Berusaha semampu kita, mencoba ikhlas, sabar, kuat dan tetap tegar berdiri. Yakini dirimu seyakin-yakinnya bahwa semua akan berubah menjadi lebih baik.
(Gannia)

Kelebihan & kekurangan adalah pandangan. Kelebihan bisa jadi kekurangan & kekurangan bisa jadi kelebihan. Semua tergantung bagaimana ditempatkan dan disikapi. Rasakanlah cukup apa yang ada daripada apa yang tiada. & tetaplah meraih apa yang dicita, sebelum bersyukur atas apa yang ada.
(NN)

Skripsi ini ku persembahkan untuk:

- ★ *Allah SWT yang telah memberiku kekuatan untuk menyelesaikan amanah ini.*
- ★ *Bapak dan Ibuku tersayang, yang slalu memberi dukungan moril maupun materiil.*
- ★ *Kakak-kakakku tersayang Mbak Reni, Mas Indra, Mas Heru, dan Mbak Wiwid yang memberikan dorongan untuk setiap jalanku.*
- ★ *Keponakan-keponakanku yang lucu, Aysia, Ayda, Ayra dan Refian.*
- ★ *Seseorang yang insyaallah nantinya akan menjadi imamku.*
- ★ *Serta Sahabat-sahabatku.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Kapasitas Fiskal Daerah di Tiga Puluh Provinsi di Indonesia Periode 2001-2005”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat guna mencapai gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak sekali kendala yang penulis hadapi. Namun berkat arahan, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, mak akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu dengan kerendahan hati dan ketulusan yang mendalam penulis manghaturkan terima kasih kepada :

1. Drs. Hari Murti, Msi selaku pembimbing yang dengan arif dan bijak telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing dan memberikan masukan yang berarti dalam penyusunan skripsi ini.
2. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.
3. Ketua beserta Sekretaris Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Sebelas Maret Surakarta.
4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta beserta staff dan karyawan yang telah memberikan ilmu, bimbingan, arahan dan pelayanan kepada penulis.
5. Keluarga yang senantiasa selalu mendoakan, memberi dorongan dan bimbingan kepada penulis.

6. Teman-teman Ekonomi Pembangunan angkatan 2005 dan semua sahabatku terimakasih atas segala bantuan dan dukungannya.
7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu baik secara langsung maupun tidak atas bantuannya kepada penulis hingga terselesaikannya penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan-kekurangan. Penulis mengharapkan kritik dan saran sebagai bahan perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Surakarta, Mei 2009

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman	
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DATRAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAKSI	xiv

BAB

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10

II. TELAAH PUSTAKA

A. Kajian Teori	11
1. Otonomi Daerah	11
2. Desentralisasi Fiskal	13
3. Kemandirian Daerah	16
4. Konsep Penerimaan Daerah	18
a. Pendapatan Daerah	19
1) Pendapatan Asli Daerah	19
a) Pajak Daerah	19
b) Retribusi Daerah	23
c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah	24

yang dipisahkan	
d) Lain-lain PAD yang sah	24
2) Dana Perimbangan.....	25
a) Dana Bagi Hasil	25
(1) Dana Bagi Hasil Pajak	25
(a) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	25
(b) Bea Perolehan Hak atas Tanah	27
dan Bangunan (BPHTB)	
(c) Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak	28
Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN)	
dan PPh Pasal 21	
(2) Dana Bagi Hasil yang bersumber	30
dari Sumber Daya Alam	
b) Dana Alokasi Umum	31
c) Dana Alokasi Khusus	31
3) Lain-lain Pendapatan	31
a) Pendapatan Hibah	31
b) Pendapatan Dana Darurat	31
b. Pembiayaan	31
5. Model Leviathan	32
6. Kinerja Ekonomi Daerah	33
7. Blok Fiskal Daerah	36
8. Kapasitas Fiskal Daerah	39
B. Penelitian Sebelumnya	40
C. Kerangka Teoritis	42
D. Hipotesis	43

III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian	44
B. Jenis dan Sumber Data	45
C. Definisi Operasional Variabel	45
D. Metode Analisis Data	47
1. Analisis Data Panel	48

2. Analisis Regresi Berganda	55
a. Uji statistik t	56
b. Uji statistik F	57
c. Koefisien Determinasi (R^2)	59
3. Uji Asumsi Klasik	59
a. Uji Multikolinieritas	59
b. Uji Heteroskedastisitas	60
c. Uji Autokorelasi	61

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Wilayah Indonesia	63
B. Hasil Analisis	70
1. Hasil Estimasi Data Panel	70
a. Metode <i>Ordinary Least Square</i>	70
b. Metode <i>Fixed Effect</i>	71
c. Metode <i>Generalized Least Square (GLS)</i>	73
2. Pemilihan Model Estimasi	75
a. Uji Signifikansi <i>Fixed Effect</i>	75
b. Uji Signifikansi <i>Random Effect</i>	76
c. Uji Signifikansi <i>Fixed Effect</i> atau <i>Random Effect</i>	77
3. Uji Statistik	79
a. Uji t	79
b. Uji F	82
c. Koefisien Determinasi R^2 (<i>Goodness Of Fit</i>)	83
d. Interpretasi Hasil Estimasi.....	83
4. Uji Asumsi Klasik	87

V. KESIMPULAN

A. Kesimpulan	89
B. Saran	91

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

TABEL	Halaman
1.1 Persentase PAD di Wilayah Indonesia terhadap.....4 Pendapatan diatas 50% Realisasi APBD TA 2005	
1.2 Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Wilayah5 Indonesia terhadap PAD Tahun 2001-2005 (dalam persen)	
1.3 Peta Kapasitas Fiskal Provinsi.....6	
1.4 Peta Kapasitas Fiskal untuk Daerah Pemekaran 2003.....7	
2.1 Pajak beserta Besarnya Tarif Pajak yang Paling Tinggi20	
4.1.1 Jumlah Penduduk di Indonesia Mengacu kepada65 Data P4B (BPS) Berdasarkan Survei Penduduk Antar Sensus 2005	
4.1. 2 Penerimaan Pajak Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia66 Tahun 2001-2005 (dalam persen)	
4.1.3 Penerimaan Retribusi Kabupaten/Kota di Indonesia67 Tahun 2001-2005 (dalam persen)	
4.1.4 Kontribusi Tertinggi dan Terendah Variabel yang di Teliti68 (dalam Milyaran Rupiah)	
4.1.5 Provinsi dengan Variabel diatas Rata-rata.....69	
4.2.1 Hasil Estimasi Data Panel dengan <i>Pooled OLS</i>70	
4.2.2 Hasil Estimasi Data Panel dengan <i>Fixed Effect</i>72	
4.2.3 Hasil Estimasi Data Panel dengan <i>Random Effect</i>74	
4.2.4 Perbandingan Hasil Estimasi.....78	
4.2.5 Rangkuman Hasil Estimasi <i>Model Fixed Effect</i>79	
4.3.1 Uji Heteroskedastisitas pada Estimasi FEM87	

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR:	Halaman
2.1 Kerangka Hubungan Antara Pusat dan Daerah	15
2.2 Skema Bagi Hasil Pajak	29
2.3 Model Leviathan	32
2.4 Skema Kerangka Pemikiran	42
3.1 Uji t	57
3.2 Uji F	58
3.3 DW test	62

DAFTAR LAMPIRAN

Tabel I	Pendapatan Asli Daerah di Tiga Puluh Provinsi di Indonesia pada Periode 2001-2005 (dalam Jutaan Rupiah)
Tabel II	Bagi Hasil Pajak di Tiga Puluh Provinsi di Indonesia pada Periode 2001-2005 (dalam Jutaan Rupiah)
Tabel III	Bagi Hasil SDA di Tiga Puluh Provinsi di Indonesia pada Periode 2001-2005 (dalam Jutaan Rupiah)
Tabel IV	Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Kapasitas Fiskal Daerah Periode 2001-2005 (dalam Milyaran Rupiah)
Tabel V	Hasil Estimasi Data Panel dengan <i>Fixed Effect</i>
Tabel VI	Nilai Residu <i>Pooled Least Square</i>
Tabel VII	Hasil Perhitungan Uji Hausman

ABSTRAK

Frida Febriana Fajrin

NIM. F0105056

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KAPASITAS FISKAL DAERAH (STUDI KASUS: TIGA PULUH PROVINSI DI INDONESIA PADA PERIODE 2001-2005)

Penelitian ini tentang Analisis Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Kapasitas Fiskal Daerah (Studi Kasus: Tiga Puluh Provinsi di Indonesia pada Periode 2001-2005). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bagi Hasil Pajak, dan Produk Domestik Regional Bruto terhadap Kapasitas Fiskal Daerah.

Sampai dengan tahun 2005 jumlah provinsi di Indonesia sebanyak tiga puluh tiga provinsi. Adapun periode waktu yang digunakan terdiri dari data *time series* mulai tahun 2001 hingga 2005 yang akan dikombinasikan dengan data *cross section* dari tiga puluh provinsi yang dipilih sebagai daerah sampel. Provinsi yang tidak termasuk dalam penelitian adalah Provinsi Irian Jaya Barat, Kepulauan Riau dan Sulawesi Barat. Alat analisis yang dipergunakan adalah uji regresi berganda dengan metode analisis data panel.

Hasil dari uji t dalam penelitian ini membuktikan bahwa Pajak Daerah dan Bagi Hasil Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kapasitas Fiskal Daerah. Sedangkan Retribusi Daerah dan Produk Domestik Regional Bruto tidak berpengaruh signifikan terhadap Kapasitas Fiskal Daerah. Uji F menghasilkan F hitung yaitu 5299,503 lebih besar dari F tabel yaitu 2,45, maka dapat dikatakan bahwa Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bagi Hasil Pajak, dan Produk Domestik Regional Bruto secara bersama sama berpengaruh terhadap Kapasitas Fiskal Daerah. Dengan R^2 sebesar 0,992757 ini berarti Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bagi Hasil Pajak, dan Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh terhadap Kapasitas Fiskal Daerah sebesar 99,28 % dan sisanya 0,72% dipengaruhi variabel lain diluar model penelitian.

Terkait dengan hasil analisis yang dihasilkan, yaitu semua daerah harusnya mengelola dengan baik variabel yang dapat mempengaruhi kemandirian daerah tersebut. Namun di dalam pelaksanaannya harus tetap memegang prinsip ekuitas serta menempatkan kepentingan masyarakat.

Kata kunci: *Kapasitas Fiskal Daerah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bagi Hasil Pajak, dan Produk Domestik Regional Brut.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pola hubungan pemerintahan antara pemerintah daerah dengan pusat mengalami perubahan seiring dengan perubahan kepemimpinan nasional dari Orde Baru menuju Orde Reformasi. Sejak 1999 sistem pemerintahan Indonesia yang bersifat sentralistik diubah menjadi era desentralisasi atau era otonomi daerah. Di era otonomi ini diharapkan daerah menjadi mandiri dalam pengelolaan kewenangannya. Hal ini ditandai dengan makin kuatnya Kapasitas Fiskal atau Pendapatan Asli Daerah serta Dana Bagi Hasil. Daerah yang mungkin masih kekurangan dana diberi bantuan dari pemerintah pusat dalam bentuk Dana Perimbangan. Akan tetapi tujuan pelaksanaan otonomi adalah mewujudkan Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) yang kuat dalam menciptakan kemandirian daerah.

Pemberian otonomi daerah dan desentralisasi yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah merupakan dua langkah strategis. *Pertama*, otonomi daerah dan desentralisasi merupakan jawaban atas permasalahan lokal bangsa Indonesia berupa ancaman disintegrasi bangsa, kemiskinan, ketidakmerataan pembangunan, rendahnya kualitas hidup masyarakat, dan masalah pembangunan sumber daya manusia. *Kedua*, otonomi daerah dan desentralisasi merupakan langkah strategis bangsa Indonesia untuk menyongsong era globalisasi ekonomi dengan memperkuat basis perekonomian daerah (Mardiasmo, 2002: 59).

Esensi dari pemberian otonomi tersebut adalah desentralisasi keuangan yang dibarengi dengan desentralisasi fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Era otonomi daerah ditandai dengan keluarnya Undang-Undang No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kemudian Undang-Undang No 22 Tahun 1999 telah direvisi dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 telah direvisi dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Sesuai dengan UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa yang menjadi sumber-sumber pembiayaan untuk pembangunan daerah (*capital investment*) antara lain berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan yang diterima oleh daerah dari pemerintah pusat. PAD terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain PAD yang Sah. Meskipun demikian, hanya pajak daerah dan retribusi daerah yang menyumbang secara signifikan terhadap total penerimaan PAD suatu daerah. Sumber yang berasal dari Laba Perusahaan Milik Daerah dan Lain PAD yang sah masih belum berperan. Sedangkan Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK). Selain itu juga ada sumber lain yang berasal dari pembiayaan berupa Pinjaman Daerah.

Sumber-sumber pembiayaan yang diserahkan kepada daerah itu nantinya akan dimanifestasikan lewat struktur PAD yang kuat. PAD inilah sumber pembiayaan yang memang benar-benar digali dari daerah itu sendiri sehingga dapat mencerminkan kondisi riil daerah. Jika nantinya struktur PAD sudah kuat, maka daerah tersebut memiliki kemampuan pembiayaan yang juga kuat. Untuk itu tentu dibutuhkan suatu struktur industri yang mantap beserta obyek pajak dan retribusi yang taat. Sementara DAU dan berbagai bentuk transfer dari Pemerintah Pusat seyogyanya hanya bersifat pendukung bagi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di daerah (Joko Tri, 2006: 7).

Sumber penerimaan PAD merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah yang bersangkutan. Oleh sebab itu, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah guna meningkatkan PAD. Namun sering terjadi PAD sebuah daerah tidak dapat memenuhi kebutuhan pembangunan di daerah. Pemerintah daerah dituntut untuk dapat meningkatkan pendapatannya di dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Sumber PAD untuk membiayai belanja daerah masih rendah. Kemampuan pemerintah daerah untuk menyediakan dana pembangunan sangat terbatas. Sehingga pemerintah daerah diberikan kewenangan menggunakan dana pinjaman untuk membiayai pembangunan di masa yang akan datang.

Ada lima penyebab utama rendahnya PAD yang menyebabkan tingginya ketergantungan daerah terhadap subsidi dari pusat. *Pertama*, kurang berperannya perusahaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah. *Kedua*, tingginya derajat sentralisasi dalam bidang perpajakan, karena semua jenis pajak utama yang paling produktif baik pajak langsung maupun tidak

langsung ditarik oleh pusat. *Ketiga*, kendati pajak daerah cukup beragam, ternyata hanya sedikit yang bisa diandalkan sebagai sumber penerimaan. *Keempat*, alasan politis dimana banyak orang khawatir apabila daerah mempunyai sumber keuangan yang tinggi akan mendorong terjadinya disintegrasi dan separatisme. *Kelima*, kelemahan dalam pemberian subsidi pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang hanya memberikan kewenangan yang lebih kecil kepada pemerintah daerah merencanakan pembangunan di daerahnya (Mudrajad, 2004: 13-14).

Fakta penelitian terdahulu menunjukkan bahwa hampir di semua daerah di Indonesia rasio DAU terhadap Total Pendapatan Daerah melebihi 50%. Hanya beberapa daerah yang menunjukkan struktur PAD yang kuat yaitu daerah yang terletak di Pulau Jawa serta secara historis sudah kuat. Sementara di Luar Jawa hanya beberapa provinsi menunjukkan peningkatan. Hal ini berarti di era otonomi daerah justru bukan kemandirian daerah yang terwujud, melainkan ketergantungan daerah yang makin besar kepada pusat.

Tabel 1.1 Persentase PAD di Wilayah Indonesia terhadap Pendapatan diatas 50% Realisasi APBD TA 2005

Provinsi	Total Pendapatan (Jutaan Rupiah)	PAD (Jutaan Rupiah)	Persentase
Jatim	4.609.953,81	3.464.580,02	75,15
Jabar	4.824.888,27	3.604.767,57	74,71
Bali	1.013.082,50	742.886,07	73,33
Sumut	1.906.372,00	1.372.982,70	72,02
Jateng	3.526.839,40	2.490.643,74	70,62
Banten	1.598.106,61	1.070.237,77	66,97
Sulsel	1.165.441,99	675.857,27	57,99
Sumbar	780.024,64	448.279,02	57,47
DIY	699.579,31	401.912,34	57,45
Kalsel	923.963,48	530.110,53	57,37
DKI	13.476.933,94	7.597.867,92	56,38
Lampung	1.045.903,18	549.657,85	52,55

Sumber : DJPK, Realisasi APBD Provinsi TA 2005

Tabel 1.2 Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Wilayah Indonesia terhadap PAD Tahun 2001-2005 (dalam persen)

Jenis Penerimaan	2001	2002	2003	2004	2005
Provinsi					
Pajak Daerah	85,23	83,09	84,98	87,34	86,83
Retribusi Daerah	4,90	4,86	4,67	5,31	4,83
Kabupaten/kota					
Pajak Daerah	43,32	37,72	36,78	40,74	40,03
Retribusi Daerah	33,47	31,18	32,52	33,72	35,51

Sumber: Departemen Keuangan, data diolah

Secara nasional, peranan pajak dan retribusi dalam penerimaan PAD sangat besar. Di tingkat provinsi, penerimaan pajak dan retribusi rata-rata mencapai 90,35% dari total PAD, sedangkan di tingkat kabupaten/kota mencapai lebih dari 73% dari total PAD. Dalam tahun 2001-2005, PAD provinsi didominasi oleh penerimaan pajak, sedangkan dalam PAD kabupaten/kota, kontribusi penerimaan pajak tidak jauh berbeda dengan penerimaan retribusi.

Peran pajak provinsi relatif besar, memungkinkan provinsi untuk menyesuaikan penerimaannya bila sumber-sumber penerimaan dari transfer tidak memadai, namun pemerintah provinsi tidak memiliki kewenangan untuk menyesuaikan tarif pajaknya. Di tingkat kabupaten/kota penyesuaian terhadap penerimaan pajak lebih sulit dilakukan karena basis pajak yang sangat terbatas. Lebih besarnya peranan retribusi di kabupaten/kota dibandingkan dengan retribusi di provinsi tersebut sejalan dengan lebih besarnya peranan kabupaten/kota dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menggambarkan kemampuan suatu daerah mengelola Sumber Daya Alam (SDA) yang dimilikinya. Besarnya PDRB yang dihasilkan oleh masing-masing provinsi tergantung pada potensi SDA dan faktor produksi daerah tersebut. Kinerja

ekonomi suatu daerah, dapat dilihat dari pertumbuhan PDRB dalam nilai riil karena menunjukkan pertumbuhan output sebenarnya (Joko Tri, 2006: 12).

Pada periode 1999-2006, pertumbuhan ekonomi Indonesia belum bisa dikatakan berkualitas. Hal ini dicerminkan, oleh relatif besarnya ketimpangan aktivitas perekonomian antar wilayah. Pada periode 2000-2005, rataan kontribusi terhadap PDB nasional masih didominasi oleh wilayah Jawa-Bali sebesar 60,7 %, diikuti oleh Sumatera 22,39 %, Kalimantan 9,28 %, Sulawesi 4,17 %, dan lainnya 3,46 % (Hermanto, 2007: 12).

Tabel 1.3 Peta Kapasitas Fiskal Provinsi

No	Daerah	IKF	Kategori	No	Daerah	IKF	Kategori
1	DKI Jakarta	11,787	Tinggi	15	Gorontalo	0,400	Rendah
2	Kaltim	3,793	Tinggi	16	Sumatra Utara	0,363	Rendah
3	Riau	1,442	Tinggi	17	Kalbar	0,355	Rendah
4	Bangka Belitung	1,297	Tinggi	18	Maluku	0,355	Rendah
5	Kalsel	0,896	Sedang	19	Bengkulu	0,341	Rendah
6	Kalteng	0,886	Sedang	20	Jawa Barat	0,318	Rendah
7	Maluku Utara	0,996	Sedang	21	Sumatra Selatan	0,312	Rendah
8	Bali	0,988	Sedang	22	Yogyakarta	0,263	Rendah
9	Jambi	0,721	Sedang	23	Sulawesi Tengah	0,256	Rendah
10	NAD	0,703	Sedang	24	Sulawesi Selatan	0,248	Rendah
11	Sulawesi Utara	0,661	Sedang	25	Sulawesi Tenggara	0,222	Rendah
12	Banten	0,649	Sedang	26	Lampung	0,206	Rendah
13	Papua	0,446	Rendah	27	Jawa Timur	0,189	Rendah
14	Sumatra Barat	0,443	Rendah	28	NTB	0,179	Rendah
				29	Jawa Tengah	0,153	Rendah
				30	NTT	0,133	Rendah

Sumber: Lampiran Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 129/PMK.02/2005

Terdapat enam belas provinsi sebagai daerah berkapasitas fiskal rendah. Daerah-daerah tersebut diprioritaskan untuk mendapatkan hibah dari pusat yang berasal dari pinjaman luar negeri. Pengelompokan daerah tersebut ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 129/PMK.02/2005 Tentang Peta Kapasitas Fiskal Dalam Rangka Penerusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah Kepada Daerah Dalam Bentuk Hibah.

Daerah yang termasuk kategori berkapasitas fiskal rendah adalah Gorontalo, Sumatra Utara, Kalimantan Barat, Maluku, Bengkulu, Jawa Barat, Sumatra Selatan, Yogyakarta, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Lampung, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Timur. Sementara provinsi yang dikategorikan berkapasitas fiskal sangat tinggi adalah DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Riau dan Bangka Belitung. Daerah-daerah yang memiliki kapasitas fiskal rendah memerlukan bantuan pemerintah pusat agar dapat bertahan. Sedangkan daerah yang memiliki kapasitas fiskal tinggi tidak layak mendapatkan bantuan hibah. Sementara untuk daerah pemekaran 2003 yang memiliki kapasitas fiskal tinggi adalah Riau Kepulauan.

Tabel 1.4 Peta Kapasitas Fiskal untuk Daerah Pemekaran 2003

No	Daerah	Daerah Induk		Kategori
		Nama	IKF	
1	Riau Kepulauan	Riau	1,4421	Tinggi
2	Irian Jaya Barat	Papua	0,4461	Rendah
3	Sulawesi Barat	Sulawesi Selatan	0,2475	Rendah

Sumber: Lampiran Keputusan Menteri Keuangan RI
Nomor : 129 /PMK.02/2005

Upaya meningkatkan kapasitas fiskal daerah tidak hanya melalui peningkatan PAD, melainkan optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerah. Peningkatan kapasitas fiskal bukan berarti jumlah anggaran yang besar, tetapi juga optimalisasi anggaran, karena peran pemerintah daerah ke depan lebih bersifat sebagai fasilitator dan motivator dalam menggerakkan pembangunan di daerah (Osborne and Gaebler, 1993 dalam Anggito, 2005: 28). Pada dasarnya Pemerintah Daerah dihadapkan pada persoalan tingginya kebutuhan fiskal daerah (*fiscal need*) sementara kapasitas fiskal daerah tidak mencukupi.

Hal ini menyebabkan terjadinya kesenjangan fiskal (Mardiasmo, 2002 : 147). Jadi pada dasarnya kesenjangan fiskal adalah selisih negatif antara kebutuhan fiskal daerah dengan kapasitas fiskal daerah.

Kebijaksanaan untuk mengatasi kesenjangan fiskal antar Daerah dilakukan dengan transfer dana dari Pemerintah Pusat kepada Daerah melalui konsep *Fiscal Gap* yaitu kebutuhan Daerah (kebutuhan fiskal) dibandingkan dengan potensi Daerah (kapasitas fiskal). Kebutuhan Daerah yang melebihi kapasitas fiskal akan ditutup dengan transfer dana dari Pemerintah Pusat. Secara umum kemampuan daerah baik Provinsi dan Kabupaten/Kota berada dibawah kebutuhan fiskalnya. Dana Alokasi Umum yang disalurkan kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat meningkatkan kemampuan kapasitas fiskal Daerah.

Kapasitas Fiskal Daerah yang kuat merupakan pencerminan kemandirian daerah. Variabel yang dipilih dalam penelitian ini adalah Pajak Daerah (PD), Retribusi Daerah (RD), Bagi Hasil Pajak (BHP) serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang diyakini mampu mencerminkan kemandirian daerah. Penelitian dilakukan di tiga puluh provinsi di Indonesia pada periode 2001-2005 dengan menggunakan metode analisis data panel.

B. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, dapat diambil pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Pajak Daerah (PD) terhadap kapasitas fiskal daerah di tiga puluh provinsi di Indonesia pada periode 2001-2005?

2. Bagaimana pengaruh Retribusi Daerah (RD) terhadap kapasitas fiskal daerah di tiga puluh provinsi di Indonesia pada periode 2001-2005?
3. Bagaimana pengaruh Bagi Hasil Pajak (BHP) terhadap kapasitas fiskal daerah di tiga puluh provinsi di Indonesia pada periode 2001-2005?
4. Bagaimana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap kapasitas fiskal daerah di tiga puluh provinsi di Indonesia pada periode 2001-2005?
5. Bagaimana pengaruh Pajak Daerah (PD), Retribusi Daerah (RD), Bagi Hasil Pajak (BHP), dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang diuji secara bersama-sama terhadap Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) di tiga puluh provinsi di Indonesia pada periode 2001-2005?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisa pengaruh Pajak Daerah (PD) terhadap kapasitas fiskal daerah di tiga puluh provinsi di Indonesia pada periode 2001-2005.
2. Untuk menganalisa pengaruh Retribusi Daerah (RD) terhadap kapasitas fiskal daerah di tiga puluh provinsi di Indonesia pada periode 2001-2005.
3. Untuk menganalisa pengaruh Bagi Hasil Pajak (BHP) terhadap kapasitas fiskal daerah di tiga puluh provinsi di Indonesia pada periode 2001-2005.
4. Untuk menganalisa pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap kapasitas fiskal daerah di tiga puluh provinsi di Indonesia pada periode 2001-2005.

5. Untuk menganalisa pengaruh Pajak Daerah (PD), Retribusi Daerah (RD), Bagi Hasil Pajak (BHP), dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang diuji secara bersama-sama terhadap Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) di tiga puluh provinsi di Indonesia pada periode 2001-2005.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh apabila penelitian ini tercapai yaitu:

1. Bagi Pemerintah
 - a. Pusat:

Sebagai masukan kepada pemerintah Indonesia dalam menentukan kebijakan-kebijakan guna meningkatkan kapasitas fiskal daerah.
 - b. Daerah:

Dapat digunakan sebagai gambaran mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kapasitas fiskal daerah di tiga puluh provinsi di Indonesia dalam kurun waktu 2001-2005.
2. Bagi Masyarakat
 - a. Akademis:

Sebagai sumber informasi bagi peneliti yang lain yang berminat pada masalah yang sama dan analisis yang diperoleh dapat menjadi informasi bagi pihak yang memerlukan.
 - b. Umum:

Sebagai bahan perbandingan dari penelitian yang telah ada.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Otonomi Daerah

Proses menuju era globalisasi secara bertahap membawa perubahan terhadap sistem pemerintahan dari sentralistik menuju desentralistik. Hal ini diikuti dengan pelaksanaan otonomi daerah tahun 2001. Proses globalisasi tersebut menyebabkan pola pembangunan menjadi *core competence*, yaitu pembangunan dengan didasarkan pada potensi yang dimiliki suatu daerah.

Sejak Januari 2001 bangsa dan negara Indonesia mulai menyelenggarakan otonomi daerah yang dilaksanakan di seluruh Dati II (kabupaten/kota). Otonomi daerah di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan telah diperbaharui dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah daerah diberi kekuasaan yang lebih besar untuk mengatur anggaran daerahnya.

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah).

Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik (*public service*) dan memajukan perekonomian daerah. Pada dasarnya terkandung tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yaitu: (1) meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, (2) menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, dan (3) memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat (publik) untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan (Mardiasmo, 2002: 59).

Pertimbangan yang mendasari terselenggaranya otonomi daerah adalah rakyat menghendaki keterbukaan dan kemandirian. Selain itu, semakin maraknya globalisasi yang menuntut daya saing tiap negara termasuk daerahnya. Daya saing pemerintah daerah ini diharapkan akan tercapai melalui peningkatan kemandirian pemerintah daerah.

Implikasi dari pemberian kewenangan otonomi menuntut daerah untuk melaksanakan pembangunan di segala bidang, terutama untuk pembangunan sarana dan prasarana publik (*public services*). Pembangunan tersebut diharapkan dapat dilaksanakan secara mandiri oleh daerah baik dari sisi perencanaan, pembangunan, serta pembiayaannya. Manfaat dari pembangunan tersebut diantaranya (Joko Tri, 2006: 4):

a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan masyarakat

- b. Mendorong perkembangan perekonomian daerah
- c. Mendorong peningkatan pembangunan daerah di segala bidang
- d. Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat
- e. Meningkatkan pendapatan asli daerah
- f. Mendorong kegiatan investasi

Misi utama Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pamarintah Daerah bukan hanya keinginan untuk melimpahkan kewenangan pembangunan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, tetapi juga efisiensi dan efektifitas sumber daya keuangan. Suatu daerah otonom yang mampu menyelenggarakan otonomi daerahnya melalui strategi Sumber Daya Manusia (SDM) dan kemampuan di bidang keuangan daerah.

2. Desentralisasi Fiskal

Tujuan desentralisasi fiskal adalah untuk memperbaiki relevansi kualitas penyediaan pelayanan publik terhadap kebutuhan dan kondisi masyarakat lokal dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan pembangunan ekonomi dan sosial baik regional maupun nasional. Bentuk desentralisasi fiskal di setiap negara mempunyai derajat yang berbeda dalam memberikan otonomi kepada pemerintah daerah. Secara garis besar ada tiga bentuk penerapan desentralisasi fiskal (Budi, 2006: 26-29), yaitu :

- a. Desentralisasi penuh (*full decentralization*), dimana pendelegasian tanggungjawab, wewenang, dan fungsi kepada pemerintah daerah dilakukan secara penuh. Pemerintah daerah harus bertindak sesuai

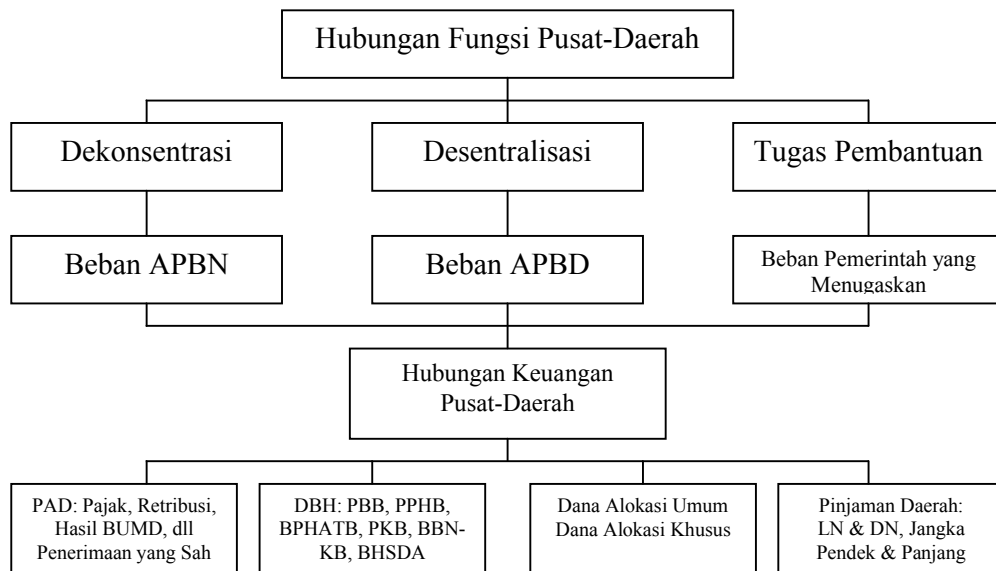
dengan aturan-aturan dan kebijakan yang digariskan oleh pemerintah pusat namun tetap memperoleh kebebasan dalam menentukan cara menjalankan tugas.

- b. Dekonsentrasi (*Deconcentration*), dimana pemerintah pusat melaksanakan fungsinya di daerah-daerah dengan menggunakan sumber daya dan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah pusat.
- c. Ko-administrasi (*Co-administration*), dimana memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menjalankan peranan dan fungsi pemerintah pusat dengan menggunakan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah pusat.

Realitas hubungan fiskal antara pusat-daerah ditandai dengan tingginya kontrol pusat terhadap proses pembangunan daerah. Terlihat dari rendahnya proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah dibanding besarnya subsidi (*grants*) yang diberikan dari pusat. Indikator desentralisasi fiskal adalah rasio antara PAD dengan total pendapatan daerah. PAD terdiri atas pajak-pajak daerah, retribusi daerah, penerimaan dari dinas, laba bersih proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah kurang dari 50%. Artinya lebih banyak subsidi dari pusat dibanding PAD dalam pembiayaan pembangunan daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi diharapkan perekonomian daerah akan semakin kuat dan mandiri sehingga dapat memperkokoh perekonomian nasional. Hal ini, memberikan implikasi terhadap kinerja perekonomian daerah. Kinerja perekonomian daerah dipengaruhi oleh arah dan kebijakan fiskal dan moneter. Oleh karena itu,

perlu dilakukan harmonisasi kebijakan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang dilakukan melalui penetapan kebijakan perpajakan, kebijakan pinjaman luar negeri, dan pengaturan surplus dan defisit anggaran harus tetap memperhatikan kepentingan dan kondisi daerah. Serta mendorong pertumbuhan sektor perbankan di daerah untuk mendorong ekonomi daerah.



Sumber: Mudrajad, 2004

Gambar 2.1 Kerangka Hubungan antara Pusat dan Daerah

Dalam kerangka struktur sentralisasi kekuasaan dan otoritas administrasi, dibentuk UU No.5 tahun 1974 yang mengatur tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. UU ini meletakkan dasar-dasar sistem hubungan pusat-daerah. Desentralisasi merupakan penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah atau daerah tingkat atasnya. Dekonsentrasi merupakan pelimpahan wewenang dari pemerintah atau kepala wilayah atau kepala instansi vertikal tingkat atasnya kepada pejabat-pejabat daerah.

Tugas perbantuan (*medebewind*) merupakan pengkoordinasian prinsip desentralisasi dan dekosentrasi oleh kepala daerah, yang memiliki fungsi ganda sebagai penguasa tunggal di daerah dan wakil pemerintah pusat di daerah (Mudrajad, 2004: 2-3).

Menurut Mardiasmo (2002: 69-70), dalam era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, penelitian dan kajian mengenai kondisi makro ekonomi daerah akan semakin besar kebutuhannya. Kondisi makro ekonomi daerah yang perlu dikaji oleh perbankan daerah adalah:

- a. Pertumbuhan ekonomi daerah
- b. PDRB (Produk Domestik Regional Bruto)
- c. Perkembangan ekonomi sektoral daerah
- d. Perkembangan harga-harga di daerah (laju inflasi di daerah)
- e. Arus investasi di daerah (PMA dan PMDN)
- f. Kependudukan, meliputi: pertumbuhan penduduk, ketenagakerjaan, kemiskinan, perkembangan pendidikan dan pertumbuhan kesehatan
- g. Keuangan Pemerintah Daerah (APBD)

3. Kemandirian Daerah

Pembangunan nasional berlangsung terus menerus dan berkesinambungan. Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik material maupun spritual. Pemerintah harus berusaha meningkatkan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan. Keberhasilan pembangunan memerlukan penerimaan yang kuat, sumber pembiayaan

diusahakan tetap bertumpu pada penerimaan dalam negeri sedangkan penerimaan dari sumber-sumber luar negeri hanya sebagai pelengkap.

Kemandirian pembangunan diperlukan baik ditingkat pusat maupun daerah. Hal ini tidak terlepas dari keberhasilan penyelenggaraan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota yang merupakan bagian yang dari pemerintah pusat dengan kebijaksanaannya. Kebijakan tentang keuangan daerah ditempuh oleh pemerintah pusat agar pemerintah daerah mempunyai kemampuan membiayai pembangunan daerahnya sesuai dengan prinsip daerah otonomi. Dalam pelaksanaannya dititik beratkan pada demokrasi, pemerataan dan keadilan serta kemandirian dalam mengurus rumah tangga sendiri dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

Salah satu wujud dari pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah pemberian sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai dengan potensinya masing-masing. Kewenangan daerah untuk memungut pajak dan retribusi diatur dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan ditindak lanjuti dengan Peraturan Pelaksanaannya dengan PP Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan PP Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. Peraturan tersebut mengatur tentang jenis, objek, subjek, dasar pengenaan, tarif pajak maupun retribusi daerah serta ketentuan umum yang mengatur tata cara pemungutan pajak dan retribusi.

Berdasarkan UU dan PP tersebut, daerah diberikan kewenangan untuk memungut 4 jenis pajak dan 3 kelompok retribusi. Penetapan jenis pajak dan retribusi tersebut didasarkan pertimbangan bahwa jenis pajak dan

retribusi tersebut secara umum dipungut di hampir semua daerah dan merupakan jenis pungutan yang secara teoritis dan praktek merupakan jenis pungutan yang baik. Selain jenis pajak dan retribusi tersebut, daerah juga diberikan kewenangan untuk memungut jenis pajak dan retribusi lainnya sesuai kriteria-kriteria tertentu yang ditetapkan dalam Undang-Undang.

Selain jenis pajak dan retribusi yang diatur dalam UU dan PP tersebut, untuk daerah kabupaten/kota juga diberikan kewenangan menetapkan jenis pajak dan retribusi baru sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam UU, sedangkan untuk daerah provinsi hanya diberikan kewenangan untuk menetapkan jenis retribusi baru di luar yang ditetapkan dalam UU. Penguasaan sumber-sumber penerimaan pajak oleh pemerintah pusat pada dasarnya dengan pertimbangan, antara lain, perlunya *power* yang besar dalam pemungutan pajak, dan perlunya efisiensi ekonomi.

4. Konsep Penerimaan Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009, yang dimaksud dengan **APBD** adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Penerimaan Daerah dalam pelaksanaan desentralisasi dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan yang bersumber dari :

1). Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

a). Pajak Daerah (PD) adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Pajak daerah terdiri dari :

(1). Pajak propinsi adalah pungutan pajak yang ditetapkan oleh gubernur selaku kepala daerah (tingkat I) sebagai bagian dari pendapatan propinsi.

(2). Pajak kabupaten/kota adalah pungutan pajak yang ditetapkan oleh bupati atau walikota selaku kepala daerah (tingkat II) sebagai bagian dari pendapatan kabupaten/kota.

Berkaitan dengan besarnya tarif, untuk pajak provinsi ditetapkan secara seragam di seluruh Indonesia sebagaimana diatur dalam PP No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. Jenis pajak kabupaten/kota tidak bersifat limitatif, artinya kabupaten/kota diberi peluang untuk menggali potensi sumber-sumber keuangannya selain yang ditetapkan secara eksplisit dalam UU No. 34 Tahun 2000 tentang

Pajak dan Retribusi Daerah selama memenuhi kriteria dalam UU tersebut. Besarnya tarif definitif untuk pajak kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Tabel 2.1 Pajak beserta Besarnya Tarif Pajak yang Paling Tinggi:

Pajak propinsi		Pajak Kabupaten/Kota	
Jenis	Tarif	Jenis	Tarif
Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air	5%	Pajak Hotel	10%
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air	10%	Pajak Restoran	10%
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	5%	Pajak Hiburan	35%
Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan	20%	Pajak Reklame	25%
		Pajak Penerangan Jalan	10%
		Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	20%
		Pajak Parkir	20%

Sumber: UU No 34 Tahun 2000

Kebijakan pungutan pajak daerah berdasarkan Perda, diupayakan tidak berbenturan dengan pungutan pusat (pajak maupun bea dan cukai), karena hal tersebut akan menimbulkan duplikasi pungutan yang pada akhirnya akan mendistorsi kegiatan perekonomian. Hal tersebut sebetulnya sudah diantisipasi dalam UU No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diubah dengan UU No.34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, dimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (4) yang antara lain menyatakan bahwa objek pajak daerah bukan merupakan objek pajak pusat.

Kriteria umum tentang perpajakan daerah adalah sebagai berikut:

- (1) Pendapatan yang cukup dan *elastis*, artinya dapat mudah naik turun mengikuti naik/turunnya tingkat pendapatan masyarakat.
- (2) Adil dan *merata* secara vertikal artinya sesuai dengan tingkatan kelompok masyarakat dan *horizontal* artinya berlaku sama bagi setiap anggota kelompok masyarakat sehingga tidak ada yang kebal pajak.
- (3) Administrasi yang *fleksibel* artinya sederhana, mudah dihitung, pelayanan memuaskan bagi si wajib pajak.
- (4) Secara politis dapat diterima oleh masyarakat, sehingga timbul motivasi dan kesadaran pribadi untuk membayar pajak.
- (5) Non-distorsi terhadap perekonomian yaitu implikasi pajak yang hanya menimbulkan pengaruh minimal terhadap perekonomian.

Untuk mempertahankan prinsip-prinsip tersebut, maka perpajakan daerah harus memiliki ciri-ciri tertentu khususnya yang terjadi di banyak negara sedang berkembang, adalah sebagai berikut:

- (1) Pajak daerah secara ekonomis dapat dipungut, berarti perbandingan antara penerimaan pajak harus lebih besar dibandingkan ongkos pemungutannya.
- (2) Relatif stabil, artinya penerimaan pajaknya tidak berfluktuasi terlalu besar, kadang-kadang meningkat secara drastis dan adakalanya menurun secara tajam.
- (3) *Tax base* harus merupakan perpaduan antara prinsip keuntungan (*benefit*) dan kemampuan untuk membayar (*ability to pay*).

Pemerintah Daerah dalam melakukan pungutan pajak harus tetap “menempatkan” sesuai dengan fungsinya. Adapun fungsi pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu : *fungsi budgeter* dan *fungsi regulator*. Fungsi budgeter yaitu bila pajak sebagai alat untuk mengisi kas negara yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Sementara, fungsi regulator yaitu bila pajak dipergunakan sebagai alat mengatur untuk mencapai tujuan.

Menurut Teresa Ter-Minassian (1997), beberapa kriteria dan pertimbangan yang diperlukan dalam pemberian kewenangan perpajakan kepada tingkat Pemerintahan Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota, yaitu (Machfud, 2002b: 2-3):

- (1) Pajak yang dimaksudkan untuk tujuan stabilisasi ekonomi dan cocok untuk tujuan distribusi pendapatan seharusnya tetap menjadi tanggungjawab pemerintah pusat.
- (2) Basis pajak yang diserahkan kepada daerah seharusnya tidak terlalu “*mobile*”.
- (3) Basis pajak yang distribusinya sangat timpang antar daerah, seharusnya diserahkan kepada pemerintah pusat.
- (4) Pajak daerah seharusnya jelas bagi pembayar pajak daerah, objek dan subjek pajak dan besarnya pajak terutang dapat dengan mudah dihitung sehingga dapat mendorong akuntabilitas daerah (*visible*).
- (5) Pajak daerah seharusnya tidak dapat dibebankan kepada penduduk daerah lain, karena akan memperlemah hubungan antar pembayar pajak dengan pelayanan yang diterima.

- (6) Pajak daerah seharusnya dapat menjadi sumber penerimaan yang memadai untuk menghindari ketimpangan fiskal vertikal yang besar. Hasil penerimaan, idealnya, harus elastis sepanjang waktu dan seharusnya tidak terlalu berfluktuasi.
 - (7) Pajak yang diserahkan kepada daerah seharusnya relatif mudah diadministrasikan atau dengan kata lain perlu pertimbangan efisiensi secara ekonomi berkaitan dengan kebutuhan data.
 - (8) Pajak dan retribusi berdasarkan prinsip manfaat dapat digunakan secukupnya pada semua tingkat pemerintahan, namun penyerahan kewenangan pemungutannya kepada daerah akan tepat sepanjang manfaatnya dapat dilokalisasi bagi pembayar pajak lokal.
- b). Retribusi Daerah (RD) adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jenis retribusi dapat dibedakan menjadi :
- (1).Retribusi Jasa Umum merupakan pungutan yang dikenakan oleh daerah kepada masyarakat atas pelayanan yang diberikan. Pelayanan tersebut tergolong *quasy goods* dan pelayanan yang memerlukan pengendalian dalam konsumsinya dan biaya penyediaan layanan tersebut cukup besar sehingga layak dibebankan kepada masyarakat.
 - (2).Retribusi Jasa Usaha merupakan pungutan yang dikenakan oleh daerah berkaitan dengan penyediaan layanan yang belum memadai

disediakan oleh swasta dan atau penyewaan asset/kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan.

- (3).Retribusi Perijinan Tertentu yang merupakan pungutan yang dikenakan sebagai pembayaran atas pemberian ijin untuk melakukan kegiatan tertentu yang perlu dikendalikan oleh daerah.

Ketentuan secara lengkap mengenai objek dan subjek retribusi telah diatur dalam PP No. 65 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, sehingga kewenangan daerah dalam pemungutan retribusi hanya ada pada penetapan tarif dan sasaran pengenaan retribusi.

Prinsip dan sasaran dalam menetapkan tarif Retribusi Jasa Umum, didasarkan pada kebijakan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan. Dalam Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. Sedangkan dalam Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

- c). Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- d). Lain-lain PAD yang sah, meliputi:
 - (1).hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;
 - (2).jasa giro;
 - (3).pendapatan bunga;

- (4).keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
 - (5).komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan
 - (6).pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.
- 2). Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- a). Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pengaturan DBH mempertegas bahwa sumber pembagian berasal dari APBN berdasarkan angka persentase tertentu dengan lebih memperhatikan potensi daerah penghasil. Tujuan utama dari DBH adalah untuk mengurangi ketimpangan fiskal vertikal antara pemerintah pusat dan daerah.

Dana Bagi Hasil, meliputi:

- (1) Dana Bagi Hasil Pajak adalah pembagian seluruh atau sebagian hasil penerimaan pajak dari suatu tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi kepada tingkatan pemerintahan di bawahnya dalam rangka pendanaan penyelenggaraan pemerintahan.

DBH yang bersumber dari pajak terdiri atas:

- (a) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Penerimaan negara dari PBB dialokasikan kepada pemerintah daerah dalam Dana Bagi Hasil. Bagian untuk

pemerintah pusat 10% sedangkan pemerintah daerah 90%. Bagian pemerintah pusat dibagi kembali ke daerah dengan imbangan 6,5% dibagi secara merata kepada seluruh kabupaten/kota. 3,5% dibagikan sebagai insentif kepada daerah kabupaten/kota yang realisasi penerimaan PBB sektor pedesaan dan perkotaan pada TA sebelumnya mencapai rencana penerimaan yang ditetapkan. Bagian daerah dari PBB sebesar 90% tersebut diperinci dengan imbangan 16,2% untuk daerah provinsi. 64,8% untuk daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. 9% untuk biaya pemungutan PBB.

Besar PBB yang dibebankan ke wajib pajak tergantung hasil penilaian yang diklasifikasikan dan digolongkan berdasarkan besarnya NJOP per m². Nilai Jual Obyek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan obyek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Obyek Pajak Pengganti. Tarif untuk pengenaan PBB ditetapkan sebesar 0,5% dari Nilai Jual Kena Pajak (NJKP), sedangkan NJKP adalah *Assessment Ratio* yang berlaku saat ini adalah 40% untuk obyek pajak perumahan dengan NJOP Rp. 1 milyar atau lebih, bidang usaha perkebunan serta perhutanan dan 20% untuk obyek pajak lainnya. Maka perhitungan PBB adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{PBB} &= \text{tarif} \times \text{NJKP} \\ &= 0,5 \% \times (40 \% \times \text{NJOP}) \end{aligned}$$

NJOP sebagai dasar pengenaan PBB sebelum dihitung beban PBB-nya, terlebih dahulu dikurangi dengan NJOP-TKP (Tidak Kena Pajak) per wajib pajak sebesar Rp. 8.000.000,00. Pengenaan PBB diberitahukan kepada wajib pajak dengan menerbitkan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang).

(b) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Bagian Pemerintah Pusat sebesar 20%, yang dibagikan kembali ke daerah secara merata kepada seluruh kabupaten/kota. Bagian Pemda sebesar 80%, yang dibagikan kembali dengan imbalan bagian provinsi sebesar 16% sedangkan untuk bagian kabupaten/kota sebesar 64%.

Dasar pengenaan BPHTB adalah Nilai Perolehan Obyek Pajak (NPOP). NPOP dapat berupa harga transaksi atau nilai pasar obyek pajak. Yang dimaksud dengan harga transaksi adalah harga yang terjadi dan telah disepakati oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Nilai pasar obyek pajak adalah harga rata-rata dari transaksi jual beli secara wajar yang terjadi di sekitar letak tanah dan atau bangunan. Harga transaksi digunakan untuk obyek pajak karena jual beli dan penunjukkan pembeli. Sedangkan nilai pasar obyek pajak digunakan dalam hal tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perseroan, pemisahan hak, perolehan hak karena putusan hakim, dan pemberian hak baru. Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara menaikan tarif pajak dengan Nilai Perolehan Obyek Pajak Kena Pajak

(NPOPKP). NPOPKP adalah NJOP dikurang dengan NPOPTKP. Sehingga cara penghitungan pajak yang terutang adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{BPHTB terutang} &= \text{NPOPKP} \times \text{tarif} \\ &= (\text{NPOP} - \text{NPOPTKP}) \times \text{Tarif} \\ &= (\text{NPOP} - \text{Rp. 30.000.000,00}) \times 5\%\end{aligned}$$

Apabila dasar pengenaan pajak yang digunakan adalah NJOP PBB, maka cara perhitungan pajaknya adalah sebagai berikut:

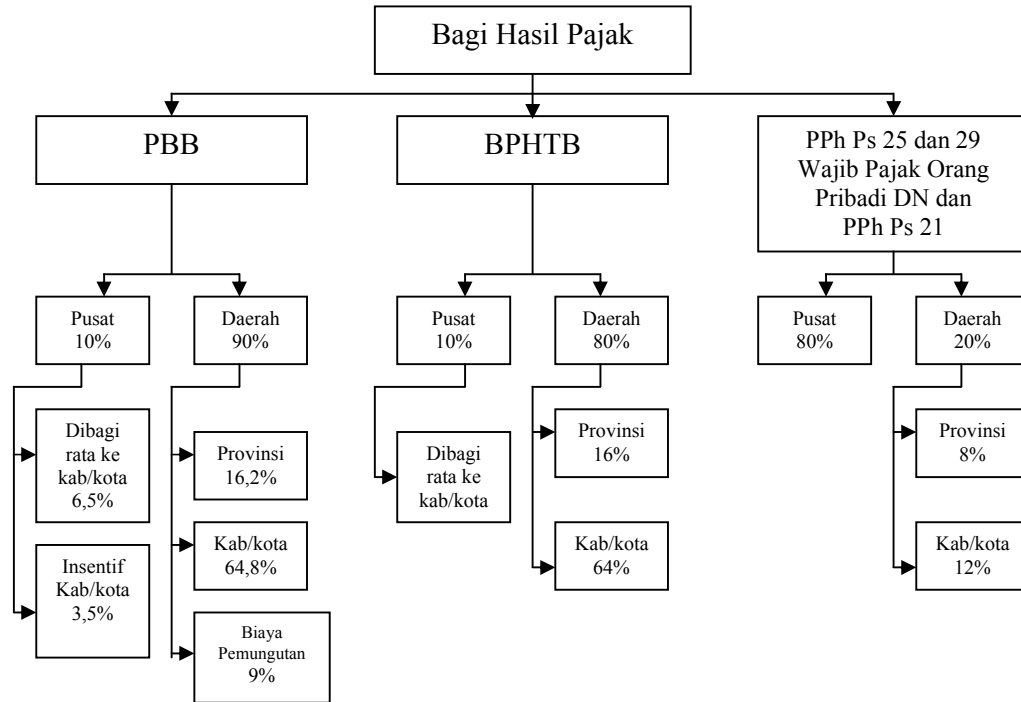
$$\text{BPHTB terutang} = (\text{NJOP PBB} - \text{Rp. 30.000.000,00}) \times 5\%$$

Besarnya NPOPTKP tersebut dapat diubah dengan Peraturan Pemerintah, dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi dan moneter serta perkembangan harga umum tanah dan atau bangunan.

(c) Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPND) dan PPh Pasal 21

Alokasi Dana Bagi Hasil PPh didasarkan pada PP No.55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Pajak Negara dari PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25 dan 29 Orang Pribadi dialokasikan kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk Dana Bagi Hasil. Bagian Pemerintah Pusat sebesar 80%. Bagian Pemerintah Daerah sebesar 20%, yang dibagi kembali dengan komposisi bagian daerah provinsi sebesar 8%. Bagian daerah kabupaten atau kota sebesar 12%, akan dibagi kembali dengan rincian 8,4% untuk kabupaten/kota tempat wajib pajak

terdaftar; dan 3,6% untuk seluruh kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan dengan bagian yang sama besar.



Sumber: UU No. 33/2004

Gambar 2.2 Bagi Hasil Pajak

Kebijakan adanya Bagi Hasil Pajak ini dilatarbelakangi oleh:

- (a) Tingginya kebutuhan pembiayaan dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan di daerah, tidak seimbang dengan besarnya pendapatan daerah itu.
- (b) Keterbatasan kemampuan pemerintah daerah dalam pengumpulan dana secara mandiri.
- (c) Adanya jenis penerimaan pajak dan atau bukan pajak yang berdasarkan pertimbangan tertentu pemungutannya harus

dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, namun obyek dan atau subyek pajaknya berada di daerah.

- (d) Memperkecil kesenjangan ekonomi antar daerah.
- (e) Memberikan insentif kepada daerah dalam melaksanakan program Pemerintah Pusat.
- (f) Memberikan kompensasi kepada daerah atas timbulnya beban dari kegiatan yang dilimpahkan oleh Pemerintah Pusat.

Mekanisme DBHP lebih menguntungkan daerah kota yang merupakan pusat bisnis dan industri, karena basis pajak daerahnya lebih tinggi. Sedangkan daerah-daerah yang miskin SDA dan bukan pusat bisnis dan industri mengandalkan penerimaan daerahnya dari DAU, dan DAK. Disamping itu desentralisasi fiskal akan berdampak mengurangi ketimpangan pendapatan antardaerah terutama antara daerah-daerah di Pulau Jawa dengan Luar Pulau Jawa dan antara Kawasan Barat Indonesia dengan Kawasan Timur Indonesia.

(2) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam berasal dari:

- (a) kehutanan;
- (b) pertambangan umum;
- (c) perikanan;
- (d) pertambangan minyak bumi;
- (e) pertambangan gas bumi; dan
- (f) pertambangan panas bumi.

- b). Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
 - c). Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
- 3). Lain-lain Pendapatan yang terdiri atas:
- a). Pendapatan Hibah adalah penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah dan badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan/atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali.
 - b). Pendapatan Dana Darurat adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa, dan/atau krisis solvabilitas.
- b. Penerimaan pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya, yang bersumber dari:
- 1) Sisa lebih perhitungan anggaran daerah
 - 2) Penerimaan Pinjaman Daerah
 - 3) Dana Cadangan Daerah

4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

5. Model Leviathan

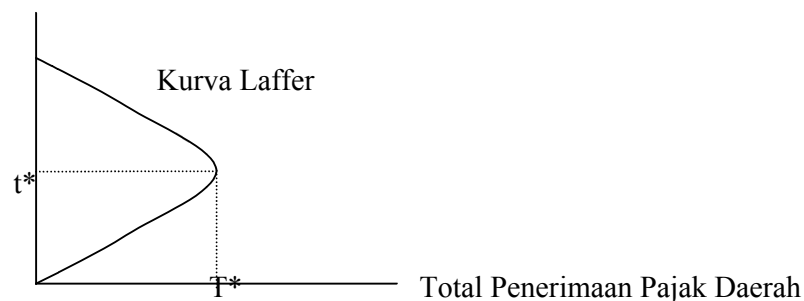
Penggalian sumber-sumber keuangan daerah khususnya yang berasal dari pajak daerah pada dasarnya perlu memperhatikan dasar dan tarif pengenaan pajak. Pemerintah Daerah cenderung untuk menggunakan tarif yang tinggi agar diperoleh total penerimaan pajak daerah yang maksimal. Pengenaan tarif pajak yang lebih tinggi, secara teoritis tidak selalu menghasilkan total penerimaan maksimum. Hal ini tergantung pada respons wajib pajak, permintaan dan penawaran barang yang dikenakan tarif pajak lebih tinggi. Formulasi model ini dikenal sebagai Model Leviathan.

Dengan asumsi bahwa biaya administrasi perpajakan dianggap tidak signifikan dan *ceteris-paribus* level pelayanan publik yang dibiayai dari penerimaan pajak, dan hanya kegiatan ekonomi saja yang dipengaruhi oleh besaran pajak. Bentuk kurva ("*Laffer*") yang berbentuk parabola menghadap sumbu Y (tarif pajak), menghasilkan Total Penerimaan Pajak Maksimum yang ditentukan oleh kemampuan wajib pajak untuk menghindari beban pajak baik legal maupun illegal dengan mengubah "*economic behavior*" dari wajib pajak.

Penyesuaian wajib pajak terhadap pengenaan tarif pajak tertentu adalah independent terhadap jenis pajak dan tarif pajak lainnya. Model Leviathan akan mencapai total penerimaan pajak maksimum (T^*) pada tarif t^* . Pada tarif t^* , menunjukkan bukanlah tarif tertinggi, tetapi dapat dicapai total penerimaan pajak maksimum. Pada kondisi ini dikenal sebagai *Revenue Maximizing Tax Rate*.

Model Leviathan menunjukkan bahwa peningkatan penerimaan pajak daerah tidak harus dicapai dengan mengenakan tarif pajak yang terlalu tinggi, tetapi dengan pengenaan tarif pajak yang lebih rendah dikombinasikan dengan struktur pajak yang meminimalkan penghindaran pajak dan respon harga dan kuantitas barang terhadap pengenaan pajak sedemikian rupa, maka akan dicapai *Total Penerimaan Maksimum*. Model Leviathan ini dapat dikembangkan untuk menganalisis hubungan lebih lanjut antara tarif dan dasar pengenaan pajak untuk mencapai Total Penerimaan Pajak Maksimal (Machfud, 2002b: 11-12).

Tarif Pajak Daerah



Gambar 2.3 Model Leviathan

6. Kinerja Ekonomi Daerah

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator makro ekonomi yang pada umumnya digunakan untuk mengukur kinerja ekonomi di tingkat wilayah, provinsi maupun kabupaten/kota. PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Besaran PDRB yang dihasilkan oleh masing-masing provinsi bergantung kepada potensi sumber daya alam dan faktor produksi daerah tersebut (Joko Tri, 2006: 12).

PDRB atas dasar harga pasar adalah jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di wilayah itu. Nilai tambah bruto adalah nilai produksi dikurangi dengan biaya antara (*intermediate cost*). Nilai tambah bruto mencakup komponen-komponen fungsi pendapatan (upah dan gaji, bunga, sewa tanah dan keuntungan), penyusutan dan pajak tidak langsung neto. Produk Domestik Regional Neto atas dasar harga pasar adalah PDRB atas dasar harga pasar dikurangi penyusutan. Penyusutan adalah nilai susut atau pengurangan nilai barang-barang modal karena barang modal tersebut terpakai dalam proses produksi. Produk Domestik Regional Neto atas dasar biaya faktor adalah PDRN atas dasar harga pasar dikurangi pajak tak langsung neto. Pajak tak langsung meliputi pajak penjualan, bea ekspor, bea cukai dan pajak lain-lain kecuali pajak pendapatan dan pajak perseroan. Pajak tidak langsung neto adalah pajak tidak langsung dikurangi subsidi. Produk Domestik Regional Neto atas dasar biaya faktor adalah PDRN atas dasar harga pasar dikurangi pajak tidak langsung neto. Pendapatan Regional Neto adalah PDRN atas dasar biaya faktor dikurangi aliran dana yang mengalir keluar dan yang masuk. Produk Regional Neto merupakan jumlah pendapatan yang benar-benar diterima (*income receipt*) oleh seluruh penduduk yang tinggal di daerah tersebut.

Metode perhitungan pendapatan regional (Robinson, 2004: 18-24):

- a. Metode langsung merupakan perhitungan dengan menggunakan data daerah atau data asli yang menggambarkan kondisi daerah dan digali dari sumber data yang ada di daerah itu sendiri.

- 1) Menurut pendekatan produksi, PDRB adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi (sembilan sektor) di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (satu tahun).
 - 2) Menurut pendekatan pengeluaran, PDRB adalah penjumlahan semua komponen permintaan akhir yaitu : Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari untung, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan stok serta ekspor netto.
 - 3) Menurut pendekatan pendapatan, PDRB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi dalam suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa rumah, bunga modal dan keuntungan. Semua hitungan tersebut sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak lainnya.
- b. Metode tidak langsung merupakan perhitungan dengan mengalokasikan pendapatan nasional menjadi pendapatan regional memakai berbagai macam indikator antara lain jumlah produksi, jumlah penduduk, luas dan areal.

Metode Perhitungan Pertumbuhan Ekonomi dapat dilihat dalam :

- a. Nilai absolut, dinyatakan dalam rupiah.
 - 1) PDRB atas dasar harga berlaku (nilai nominal) menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku setiap tahun, yang berarti kenaikan harga dihitung.

$$PDRB_{HK(t)} = [100 / IHK_t] \times PDRB_{HB(t)}$$

- 2) PDRB atas dasar harga konstan (nilai riil) menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu waktu tertentu sebagai tahun dasar (IHK = 100).

$$PDRB_{HB(t)} = [PDRB_{HK(t)} \times IHK_t] / 100$$

- b. Nilai relatif (persentase), dapat dihitung dengan cara :

$$\Delta PDRB_{(t)} = (PDRB_{(t)} - PDRB_{(t-1)} / PDRB_{(t-1)}) \times 100\%$$

Variabel-variabel kebutuhan daerah dicerminkan dari variabel jumlah penduduk, luas wilayah, keadaan geografi, dan tingkat pendapatan masyarakat dengan memperhatikan kelompok masyarakat miskin. Sementara potensi ekonomi daerah dicerminkan dengan potensi penerimaan daerah seperti potensi industri, potensi SDA, potensi SDM, dan PDRB (Machfud, 2002a: 6).

7. Blok Fiskal Daerah

Tujuan utama blok fiskal daerah untuk mengetahui besarnya celah fiskal daerah dan upaya optimalisasi fiskal daerah.

Blok Fiskal dapat dituliskan sebagai berikut (Joko Waluyo, 2007: 9-11):

Surplus/Defisit

$$SURPLUS = TR - TEXP \quad (7.1)$$

Surplus atau defisit APBD merupakan pengurangan antara Total Penerimaan Daerah (TR) dengan Total Pengeluaran Daerah (TEXP).

Total Penerimaan Daerah

$$TR = PKPD + NPKPD + SAL \quad (7.2)$$

$$PKPD = DAU + DBHP + DBHSDA + DAK \quad (7.3)$$

$$DBHP = PBB + BPHTB + PPH \quad (7.4)$$

$$\text{NPKPD} = \text{DAK} + \text{PAD} + \text{LLPS} \quad (7.5)$$

Total Penerimaan Daerah (TR) merupakan penjumlahan dari dana Perimbangan Keuangan Pusat Daerah (PKPD), non PKPD (NPKPD), dan sisa lebih anggaran tahun lalu (SAL). Dana PKPD merupakan penjumlahan dari DAU, Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP), Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam (DBHSDA), dan DAK. DBHP merupakan penjumlahan dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) termasuk juga Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan (PPh). Sedangkan dana non PKPD terdiri dari DAK, PAD dan Lain-Lain Pendapatan Sah (LLPS).

Pendapatan Asli Daerah

$$\text{PAD} = \text{TX} + \text{RET} + \text{PROFT} + \text{OTHS} \quad (7.6)$$

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penjumlahan dari penerimaan pajak daerah (TX) , Retribusi daerah (RET), Keuntungan BUMD, dan penerimaan lain yang sah.

Pajak Daerah

$$\text{TX} = f(\text{CONS}, \text{TX}_1) \quad (7.7)$$

Pajak daerah (TX) merupakan fungsi dari konsumsi (CONS) dan target penerimaan pajak tahun ini yang diproksi dengan (TX₁). Kedua variabel tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap perubahan pajak daerah.

Retribusi Daerah

$$\text{RET} = f(\text{PDRBCAP}, \text{POP}, \text{RET}_1) \quad (7.8)$$

Secara teoritis retribusi merupakan pembayaran terhadap jasa yang telah diberikan oleh pemerintah. Sehingga jumlah penduduk (POP), pendapatan per kapita (PDRBCAP) merupakan faktor penting, dan target penerimaan retribusi tahun ini (RET_1)

Laba Perusahaan Daerah

$$\text{PROFT}=f(\text{CONS}, \text{PROFT}_1) \quad (7.9)$$

Laba BUMD (PROFT) dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh konsumsi dan keuntungan tahun lalu. Hal ini karena karakteristik dari BUMD banyak didominasi oleh PDAM.

Penerimaan Daerah Lainnya

$$\text{OTHS}=f(\text{POP}, \text{PAD}, \text{TEXP}) \quad (7.10)$$

Penerimaan daerah lainnya dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh jumlah penduduk (POP), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Total Pengeluaran Daerah (TEXP).

Total Pengeluaran Daerah

$$\text{TEXP}=\text{DE}+\text{RE} \quad (7.11)$$

Total pengeluaran daerah merupakan penjumlahan antara Pengeluaran Pembangunan (DE) dan Pengeluaran Rutin (RE).

Pengeluaran Pembangunan

$$\text{DE}=f(\text{TR}, \text{DE}_1) \quad (7.12)$$

Pengeluaran pembangunan merupakan fungsi dari total penerimaan daerah (TR) dan pengeluaran pemerintah daerah tahun sebelumnya. Pemerintah daerah akan menaikkan pengeluaran pembangunannya apabila total penerimaan akan meningkat. Sedangkan pengeluaran pemerintah tahun

sebelumnya merupakan dasar penentuan pengeluaran pembangunan tahun selanjutnya.

Pengeluaran Rutin

$$RE=f(\text{POP}, RE_1) \quad (7.13)$$

Pengeluaran rutin (RE) banyak berkaitan dengan birokrasi pemerintahan daerah, sehingga jika jumlah penduduk semakin bertambah maka akan berdampak membutuhkan pelayanan publik yang semakin meningkat pula. Sedangkan pengeluaran rutin tahun sebelumnya (RE_1) merupakan dasar untuk menyusun anggaran tahun berikutnya.

8. Kapasitas Fiskal Daerah

Kapasitas Fiskal (*Fiscal Capacity*) merupakan suatu komponen yang masuk di dalam formula penghitungan Dana Alokasi Umum (DAU). DAU itu sendiri adalah salah satu komponen di dalam Dana Perimbangan di APBN yang pengalokasiannya didasarkan atas formula dengan konsep Kesenjangan Fiskal (*Fiscal Gap*) yang merupakan selisih antara Kebutuhan Fiskal (*Fiscal Need*) dengan Kapasitas Fiskal (*Fiscal Capacity*) (Joko Tri, 2006:11).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 129/PMK.02/2005 tentang Peta Kapasitas Fiskal dalam Rangka Penelusuran Pinjaman Luar Negeri Pemerintah kepada Daerah dalam Bentuk Hibah yang dimaksud dengan peta kapasitas fiskal adalah pengelompokan daerah berdasarkan kapasitas fiskal menjadi tiga kelompok yaitu daerah berkapasitas fiskal tinggi, sedang, dan rendah. Peta kapasitas fiskal dipergunakan untuk menetapkan besaran hibah bagi masing-masing daerah. Peta kapasitas fiskal

terdiri dari peta kapasitas fiskal provinsi dan peta kapasitas fiskal kabupaten/kota. Penetapan kategori kapasitas fiskal bagi daerah pemekaran yang belum memiliki APBD, mengikuti kategori kapasitas fiskal daerah induk. Perhitungan indeks kapasitas fiskal provinsi atau kabupaten/kota dilakukan dengan menghitung kapasitas fiskal masing-masing daerah provinsi atau kabupaten/kota dibagi dengan rata-rata kapasitas fiskal seluruh daerah provinsi atau kabupaten/kota.

- a. Daerah yang indeks kapasitas fiskalnya lebih dari satu atau sama dengan satu merupakan daerah yang termasuk kategori kapasitas fiskal tinggi.
- b. Daerah yang indeks kapasitas fiskalnya antara 0,5 atau sama dengan 0,5 sampai dengan satu ($0,5 < \text{indeks} < 1$) merupakan daerah yang termasuk kategori kapasitas fiskal sedang.
- c. Daerah yang indeks kapasitas fiskalnya kurang dari 0,5 merupakan daerah yang termasuk kategori kapasitas fiskal rendah.

B. Penelitian Sebelumnya

Berdasarkan *Jorge Martinez-Vazquez, Principles for the Design of Equalization Grants, Indonesia Workshop, May 2001* dalam buku **DAU** "Konsep, Hambatan, dan Prospek di Era Otonomi Daerah" menyatakan bahwa indikator kapasitas fiskal di negara Kanada yaitu PDRB per kapita atau jumlah pendapatan yang diperoleh dari basis pajak daerah dengan menerapkan tingkat tarif efektif rata-rata dan *tax effort*.

Dalam buku DAU "Konsep, Hambatan, dan Prospek di Era Otonomi Daerah" (Machfud Sidik, et al. 2002a), menurut **Bambang Brodjonegoro dan Arlen T. Pakpahan** faktor-faktor yang mempengaruhi potensi penerimaan terdiri atas: PDRB sektor SDA (primer), PDRB sektor industri dan jasa lainnya (non primer) dan besarnya angkatan kerja. Sedangkan menurut **Kadjetmiko dan B. Raksaka Mahi**, variabel-variabel penentu potensi penerimaan daerah terdiri atas: PAD, PBB dan BPHTB, PPh Orang Pribadi serta Bagi Hasil SDA.

$$KF = PAD + PBB + BPHTB + PPh + 0,75 SDA$$

$$PAD = \beta_1 + \beta_2 PDRB_{jasa}$$

Penelitian **Joko Tri Haryanto** (2006) yang berjudul "Kemandirian Daerah Sebuah Perspektif Dengan Metode *Path Analysis*". Dari hasil olahan data dengan menggunakan metode analisis path, dari 26 provinsi dengan tahun 2002 sampai 2004 didapatkan hasil bahwa variabel Pajak Daerah (PD) dan Bagi Hasil Pajak (BHP) memiliki hubungan signifikan terhadap kapasitas fiskal daerah. Sementara variabel Retribusi Daerah dan PDRB jasa tidak terbukti mempengaruhi kapasitas fiskal daerah secara signifikan. Kerangka hubungan kausal empiris antara Pajak Daerah (PD) dan Bagi Hasil Pajak (BHP) dengan kapasitas fiskal daerah diperoleh persamaan struktural sebagai berikut :

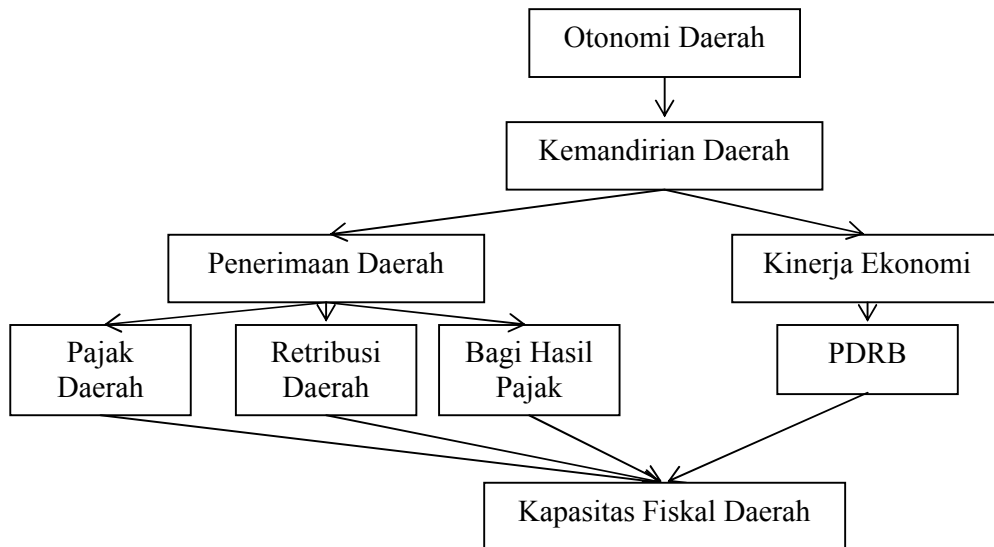
$$KF = 0,307 PD + 0,661 BHP + 0,3178 = 0,899$$

C. Kerangka Teoritis

Untuk mempermudah dan memperjelas permasalahan yang dikemukakan dalam rencana penelitian ini, maka penulis mencoba memberikan gambaran singkat mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi dan dipengaruhi.

Dalam penelitian ini dibedakan dua variabel:

1. *Variable dependent* (variabel terikat) adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Dalam hal ini adalah kapasitas fiskal daerah.
2. *Variable independent* (variabel bebas) adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Dalam hal ini adalah pajak daerah, retribusi daerah, bagi hasil pajak dan PDRB.



Gambar 2.4 Skema Kerangka Pemikiran

Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Hal ini tidak terlepas dari keberhasilan penyelenggaraan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

pemerintah pusat. Kebijakan keuangan daerah ditempuh oleh pemerintah pusat agar pemerintah daerah mempunyai kemampuan membiayai pembangunan daerahnya sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang nyata. Melalui otonomi daerah diharapkan terciptanya kemandirian pemerintah daerah. Salah satu wujud pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah pemberian sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang digali dan digunakan sendiri sesuai dengan potensinya. Daerah yang tingkat pembangunannya tinggi biasanya dilihat dari penerimaan daerah dan tingkat pendapatan riil yang juga tinggi. Sehingga, struktur kapasitas fiskal daerah tersebut semakin naik.

D. Hipotesis

Dari pertanyaan tersebut kemudian disusun suatu hipotesa awal terkait dengan kapasitas fiskal daerah di era otonomi yaitu :

1. Ada pengaruh yang signifikan antara Pajak Daerah (PD) dengan kapasitas fiskal daerah.
2. Ada pengaruh yang signifikan antara Retribusi Daerah (RD) dengan kapasitas fiskal daerah.
3. Ada pengaruh yang signifikan antara Bagi Hasil Pajak (BHP) dengan kapasitas fiskal daerah.
4. Ada pengaruh signifikan antara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan kapasitas fiskal daerah.
5. Ada pengaruh yang signifikan antara Pajak Daerah (PD), Retribusi Daerah (RD), Bagi Hasil Pajak (BHP), dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang diuji secara bersama-sama dengan Kapasitas Fiskal Daerah (KFD).

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Sampai dengan tahun 2005 jumlah provinsi di Indonesia sebanyak tiga puluh tiga provinsi. Adapun periode waktu yang digunakan terdiri dari data *time series* mulai tahun 2001 hingga 2005 yang akan dikombinasikan dengan data *cross section* dari tiga puluh provinsi yang dipilih sebagai daerah sampel. Pemilihan tahun 2001 bukan dimulai tahun 1999 dikarenakan terdapatnya kesulitan pengumpulan data, terkait dengan masalah kearsipan maupun masalah pemekaran provinsi baru. Provinsi yang tidak termasuk dalam penelitian adalah Provinsi Irian Jaya Barat, Kepulauan Riau dan Sulawesi Barat. Adapun variabel yang akan dipilih adalah Pajak Daerah (PD), Retribusi Daerah (RD), Bagi Hasil Pajak (BHP) serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang diyakini berpengaruh terhadap Kapasitas Fiskal Daerah.

Populasi adalah kumpulan semua anggota dari obyek yang diteliti, sedangkan sampel adalah kumpulan sebagian anggota dari obyek yang diteliti (Algifari, 2003: 7). Dalam penelitian ini termasuk jenis sampel sistematis, karena proses pemilihan dari populasi dilakukan secara sistematis. Sampai saat ini jumlah provinsi di Indonesia sebanyak tiga puluh tiga provinsi, akan tetapi dalam penelitian ini hanya diambil tiga puluh provinsi di Indonesia yang lebih dahulu terbentuk.

B. Jenis dan Sumber Data

Tipe penelitian ini adalah penelitian yang bersifat kuantitatif dengan mengambil data panel di tiga puluh provinsi di Indonesia sepanjang tahun 2001 sampai 2005. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak kedua atau hasil dari pengumpulan oleh suatu instansi dalam bentuk publikasi. Data sekunder diperoleh dari terbitan atau laporan suatu lembaga (Algifari, 2003: 10). Data tersebut diperoleh dari berbagai sumber diantaranya:

1. Sistem Informasi Keuangan Daerah, Departemen Keuangan DJAPK Subdirektorat Dana Perimbangan.
2. Laporan Statistik Indonesia, Badan Pusat Statistik Pusat.
3. Data lain yang bersumber dari referensi studi kepustakaan melalui makalah, artikel dan bahan lain dari berbagai situs website yang mendukung.

Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode, yaitu:

1. Metode dokumentasi terhadap buku-buku literatur untuk memperoleh landasan teoritis dan data lain yang mendukung berupa buku data dan informasi, dokumen, makalah, artikel dan lain-lain.
2. Metode penelusuran data online seperti internet atau media jaringan lainnya yang menyediakan fasilitas online.

C. Definisi Operasional Variabel

Variabel adalah segala sesuatu yang akan menjadi obyek pengamatan penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mencari variabel-variabel yang berpengaruh terhadap kapasitas fiskal sebagai pencerminan kemandirian

daerah pada periode 2001-2005. Adapun variabel yang dipilih adalah Pajak Daerah (PD), Retribusi Daerah (RD), Bagi Hasil Pajak (BHP) serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di tiga puluh provinsi di Indonesia.

Definisi operasional variabel sebagai berikut:

1. Pajak Daerah (PD) adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (UU No 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah).
2. Retribusi Daerah (RD) adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (UU No 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah).
3. Bagi Hasil Pajak (BHP) adalah pembagian seluruh atau sebagian hasil penerimaan pajak dari suatu tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi kepada tingkatan pemerintahan di bawahnya dalam rangka pendanaan penyelenggaraan pemerintahan (Departemen Keuangan RI, 2008: III-37).
4. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah (Robinson, 2004: 19).
5. Kapasitas Fiskal adalah kemampuan keuangan suatu daerah untuk membiayai tugas pemerintahan yang dicerminkan melalui pendapatan

daerah (tidak termasuk dana alokasi khusus, dana darurat, dana pinjaman lama, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu) yang dikaitkan dengan belanja pegawai, dan jumlah penduduk miskin. Peta kapasitas fiskal adalah pengelompokan daerah berdasarkan kapasitas fiskal menjadi tiga kelompok yaitu daerah berkapasitas fiskal tinggi, sedang, dan rendah (Peraturan Menteri Keuangan No. 129/PMK.02/2005 tentang Peta Kapasitas Fiskal dalam Rangka Penelusuran Pinjaman Luar Negeri Pemerintah kepada Daerah dalam Bentuk Hibah).

D. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis kuantitatif dimana analisis yang menggunakan data yang diukur dalam suatu skala numerik atau angka (Mudrajad, 2003: 124). Penggunaan analisis kuantitatif ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat pengaruh Pajak Daerah (PD), Retribusi Daerah (RD), Bagi Hasil Pajak (BHP), dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) di tiga puluh provinsi di Indonesia pada periode 2001-2005.

Dalam Buku Pelengkap Pegangan 2008 dijelaskan mengenai Kapasitas Fiskal, (DJPK, Departemen Keuangan: III:75) sebagai berikut:

- a. Sampai dengan TA 2005 sesuai UU No. 25/1999:

$$\text{Kapasitas Fiskal} = \text{PAD} + (\text{PBB} + \text{BPHTB} + \text{PPh} + \text{SDA})$$

Dimana perhitungan untuk PAD = Estimasi berdasarkan proyeksi PDRB

- b. Mulai TA 2006 sesuai UU No. 33/2004

$$\text{Kapasitas Fiskal} = \text{PAD} + (\text{PBB} + \text{BPHTB} + \text{PPh} + \text{SDA})$$

Dimana :

PAD : Pendapatan Asli Daerah

PBB : Pajak Bumi dan Bangunan

BPHTB : Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

PPh : Pajak Penghasilan

SDA : Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Pendekatan yang digunakan untuk menganalisa hubungan antar variabel adalah pendekatan teori ekonomi dan teori ekonometrika dengan menekankan pendekatan model analisa data panel.

1. Analisis Data Panel

Model regresi linier data panel merupakan salah satu solusi untuk menghasilkan estimasi yang efisien. Model tersebut menggabungkan observasi lintas sektoral dan data runtut waktu sehingga jumlah observasi meningkatkan derajat kebebasan dan mengurangi kolinearitas antara variabel penjelas dan kemudian akan memperbaiki efisiensi estimasi ekonomi. Verbeek (2000: 310) dalam Siti Aisyah Tri Rahayu (2007:165) mengemukakan bahwa keuntungan regresi dengan menggunakan data panel dibandingkan dengan data runtut waktu atau lintas sektoral adalah kemampuan regresi data panel dalam mengidentifikasi parameter-parameter regresi secara pasti dengan tanpa membutuhkan asumsi restriksi atau kendala.

Menurut Baltagi kelebihan dari penggunaan data panel (Gujarati (2003) dalam Joko Waluyo, 2007: 12) adalah:

- a. Estimasi data panel dapat mempertimbangkan heterogenitas dengan memperkenalkan variabel-variabel individu spesifik.
- b. Data panel dapat memberikan data yang lebih informatif dan bervariasi, kurang kolinearitas antar variabel, derajat bebas yang lebih besar dan efisien.
- c. Data panel lebih sesuai untuk mempelajari dinamika perubahan.
- d. Data panel dapat secara lebih baik mendeteksi dan mengukur efek yang tidak dapat diamati dalam data *cross section* dan *time series*.
- e. Data panel dapat digunakan untuk mempelajari model-model perilaku yang kompleks.
- f. Data panel dapat meminimalisir bias yang mungkin ditimbulkan oleh agregasi data individu.

Secara teoritis, ada beberapa keuntungan yang diperoleh dengan menggunakan data yang digabungkan tersebut. *Pertama*, semakin banyak jumlah observasi yang dimiliki bagi kepentingan estimasi parameter populasi yang membawa akibat positif dengan memperbesar derajat kebebasan (*degree of freedom*) dan menurunkan kemungkinan kolinearitas antar variabel bebas. *Kedua*, dimungkinkannya estimasi masing-masing karakteristik individu maupun karakteristik menurut waktu secara terpisah. Dengan demikian, analisa hasil estimasi akan lebih komprehensif dan mencakup hal-hal yang lebih mendekati realita.

Di dalam model persamaan regresi linear klasik (*classical linear regression model*), gangguan (*error terms*) selalu dinyatakan bersifat *homoscedastic* dan *serially uncorrelated*. Dengan begitu, penggunaan

metode *ordinary least square* akan menghasilkan penduga yang bersifat *best linear unbiased*. Namun demikian, asumsi mengenai gangguan tersebut tidak dapat diterapkan pada data panel. Data panel yang tersusun atas beberapa individu untuk beberapa periode, membawa masalah baru dalam sifat gangguan tersebut. Masalah tersebut adalah karena gangguan (*disturbances* atau *error term*) yang ada kini menjadi tiga macam, yaitu gangguan antar waktu (*time-series related disturbances*), gangguan antar individu (*cross-section disturbances*) dan gangguan yang berasal dari keduanya.

Model estimasi data panel dapat diestimasi dengan tiga pendekatan, yaitu:

- 1). *Pooled OLS*
- 2). *Fixed Effect (Covariance Model)*
- 3). *Random Effect (Error Component Model)*

Jika seluruh gangguan individu (μ_i), gangguan waktu (λ_t) dan *random noise* digabungkan menjadi satu dan mengikuti seluruh asumsi awal *random noise* yang terdistribusikan secara normal-bebas-identik, maka penggunaan metode *generalized least square* akan menghasilkan penduga yang memenuhi sifat *best linear unbiased*. Metode ini, dengan kata lain, menyatakan bahwa seluruh gangguan yang terjadi mengikuti distribusi normal, dengan rata-rata (*expected value*) sebesar nol, sebagaimana asumsi yang dipegang dalam model persamaan regresi linear klasik. Cara ini dikenal dengan nama *Random Effect Model*, atau juga disebut *Error Components Model*.

Namun demikian, bila asumsi bahwa seluruh gangguan tersebut tidak dapat dinyatakan mengikuti seluruh asumsi *random noise* seperti dalam model persamaan regresi linear klasik, maka baik penggunaan *ordinary least square* maupun *generalized least square* tidak akan memberikan hasil yang memenuhi sifat *best linier unbiased*. Dengan cara ini, maka komponen gangguan antar waktu dan komponen gangguan antar individu akan tergabung di dalam konstanta *intercept* model. Cara ini dikenal dengan nama *Fixed Effect Model* atau juga disebut *Dummy Variable Model*. Metode estimasi ini mendapatkan penduga yang efisien dengan menerapkan proses estimasi terhadap data simpangan (*deviation*) dari rata-rata menurut waktu, rata-rata menurut individu, dan rata-rata menurut keduanya. Sehingga untuk memilih antara penggunaan *dummy variable model* atau *error components model*, penelitian ini akan menggunakan statistik Hausman.

Estimasi model regresi penggabungan semua data untuk intersep dan koefisien slope konstan setiap waktu dan unit biasa disebut juga dengan estimasi regresi data panel dengan metode *Pooled Least Square*, mempunyai bentuk spesifikasi sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_1 + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \mu_{it} \quad (1)$$

Jika model regresi diasumsikan mempunyai koefisien slope konstan tetapi intersep bervariasi tiap unit maka digunakan variabel dumi waktu dan unit. Misal:

$$Y_{it} = \beta_{1i} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \mu_{it} \quad (2)$$

Model (2) ini dikenal dengan *Fixed Effect Model* (FEM). Intersep meskipun bervariasi tiap unit tapi tidak berbeda dalam tiap waktu (*time invariant*).

Variabel dami digunakan untuk mengetahui besarnya perbedaan koefisien tiap unit (*differential intercept dummies*) dan model dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha_1 + \alpha_2 D_{2i} + \alpha_3 D_{3i} + \alpha_4 D_{4i} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \mu_{it}$$

Selanjutnya, model estimasi regresi data panel yang ketiga adalah *error component model* atau disebut juga *Random Effect Model* (REM). Model REM ini melibatkan korelasi antar *error term* karena berubahnya waktu maupun karena berbedanya unit observasi. Model dasarnya dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_{1i} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \mu_{it}$$

Model estimasi regresi data panel ketiga yaitu *Random Effect Model*. Tidak semua persamaan bisa diestimasi dengan *random effect*, hal ini disebabkan karena untuk mengolah model dengan metode *generalized linear regression model* dalam *random effect model* salah satu persyaratan yang harus dipenuhi adalah jumlah unit *cross section* (n) harus lebih besar dari jumlah parameter yang akan diestimasi atau *explanatory variables* (K). (Hsiao, 1990:41-42 dalam Siti, 2004: 141).

Ada tiga uji yang digunakan untuk menentukan teknik yang paling tepat untuk mengestimasi regresi data panel.

(1) Uji Signifikansi *Fixed Effect*

Untuk melihat model mana yang paling sesuai dipakai akan dilakukan dengan menggunakan uji *Restricted F test* untuk menguji apakah model *restricted model* ataukah *unrestricted model* yang akan dipakai.

Formulasi *Restricted F test* adalah sebagai berikut:

$$F = \frac{(R_{UR}^2 - R_R^2) / m}{(1 - R_{UR}^2) / n - k}$$

Di mana:

R_{UR}^2 = koefisien determinasi dari model regresi *unrestricted*

R_R^2 = koefisien determinasi dari model regresi *restricted*

m = jumlah koefisien pada model regresi *restricted*

n = jumlah seluruh observasi

k = jumlah koefisien pada model regresi *unrestricted*

Jika nilai F signifikan, berarti estimasi model dengan *fixed effect* lebih baik dibanding estimasi dengan pooled OLS.

(2) Uji Signifikansi *Random Effect*

Untuk mengetahui apakah model *Random Effect* lebih baik dari metode OLS digunakan uji *Lagrange Multiplier (LM)*. Uji signifikansi *Random Effect* ini dikembangkan oleh *Bruesch-Pagan*. Metode *Bruesch Pagan* untuk uji signifikansi model *Random Effect* didasarkan pada nilai residual dari metode OLS. Adapun nilai statistik LM dihitung berdasarkan formula sbb:

$$LM = \frac{nT}{2(T-1)} \left[\frac{\sum_{i=1}^n \left[\sum_{t=1}^T e_{it} \right]^2}{\sum_{i=1}^n \sum_{t=1}^T e_{it}^2} - 1 \right]^2$$

$$= \frac{nT}{2(T-1)} \left[\frac{\sum_{i=1}^n (T\bar{e}_i)^2}{i = \sum_{i=1}^n \sum_{t=1}^T e_{it}^2} - 1 \right]^2$$

Dimana:

n = jumlah individu

T = jumlah periode waktu

e = residual metode OLS

Uji LM didasarkan pada distribusi *chi-squares* dengan *degree of freedom* sebesar jumlah variabel independen. Jika nilai LM lebih besar nilai kritis statistik *chi-squares* maka menolak hipotesis nul. Artinya, estimasi yang tepat untuk model regresi data panel adalah metode *Random Effect* dari pada metode OLS. Sebaliknya jika nilai LM statistik lebih kecil dari *chi-squares* sebagai nilai kritis maka menerima hipotesis nul. Artinya estimasi *Random Effect* tidak bisa digunakan untuk regresi data panel, tetapi digunakan metode OLS (Rochman, 2007: 49-50).

(3) Uji Signifikansi *Fixed Effect* atau *Random Effect*

Hausman telah mengembangkan suatu uji statistik untuk memilih apakah menggunakan model *Fixed Effect* atau *Random Effect*. Uji Hausman ini didasarkan pada ide bahwa LSDV di dalam metode *Fixed Effect* dan GLS adalah efisien sedangkan metode OLS tidak efisien, di lain pihak alternatifnya metode OLS efisien dan GLS tidak efisien.

Karena itu uji hipotesis nulnya adalah hasil estimasi keduanya tidak berbeda sehingga Uji Hausman bisa dilakukan berdasarkan perbedaan estimasi tersebut (Agus, 2007: 261).

Uji Hausman adalah sebagai berikut:

$$m = \hat{q}' \text{Var}(\hat{q})^{-1} \hat{q}$$

$$\text{dimana } \hat{q} = \left[\hat{\beta} - \hat{\beta}_{GLS} \right]$$

$$\text{dan } \text{Var}(\hat{q}) = \text{Var}(\hat{\beta}) - \text{Var}(\hat{\beta}_{GLS})$$

Statistik Uji Hausman mengikuti distribusi statistik *chi-square* dengan *degree of freedom* sebanyak k dimana k adalah jumlah variabel independen. Jika nilai statistik Hausman lebih besar dari nilai kritisnya maka model yang tepat adalah model *Fixed Effect* sedangkan sebaliknya bila nilai statistik Hausman lebih kecil dari nilai kritisnya maka model yang tepat adalah model *Random Effect*.

2. Analisis Regresi Berganda

Bertujuan untuk menunjukkan pengaruh variabel bebas (*independent*) terhadap variabel terikat (*dependent*). Persamaan umum regresi yang menggunakan lebih dari dua variabel bebas sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_n X_n$$

Dimana:

Y : variabel terikat

β_0 : *intercept*, titik potong garis regresi dengan sumbu Y

$\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$: *slope* atau koefisien kemiringan (penurunan) komponen deterministik dari Y sebagai akibat kenaikan X.

X_1, X_2, \dots, X_n : variabel bebas

a. Uji Statistik t

Digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh variasi variabel terikat. Pengujian ini menggunakan uji dua sisi. Langkah-langkah analisisnya adalah sebagai berikut.

1). Menentukan formula hipotesis

$H_0 : \beta_i = 0$ artinya variabel bebas secara individu tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

$H_a : \beta_i \neq 0$ artinya variabel bebas secara individu berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

2). Menentukan tingkat signifikan ($\alpha = 5\%$)

3). Menentukan t_{tabel} dan t_{hitung}

$$t_{tabel} = \pm t_{\alpha/2; n-k}$$

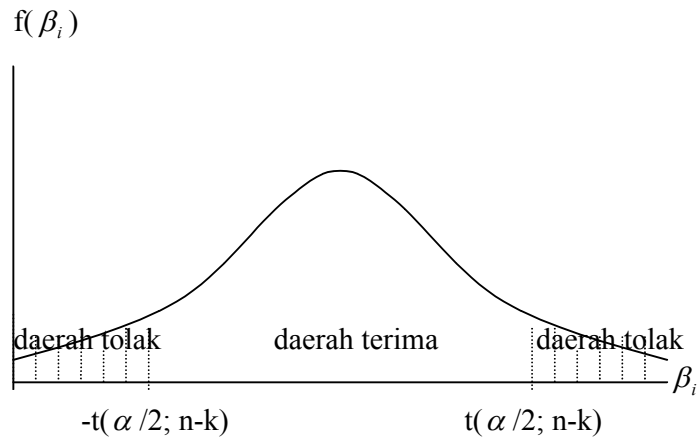
dimana :

α : tingkat signifikansi

n : jumlah data

k : banyaknya parameter atau koefisien regresi ditambah konstanta

4). Menentukan kriteria pengujian



Gambar 3.1 Uji-t

Sumber: Gujarati (1995)

5). Menarik kesimpulan

H_0 diterima apabila : $-t_t \leq t_h \leq t_t$ artinya pada taraf signifikansi 5%, variabel bebas secara individu tidak berpengaruh terhadap variabel terikat.

H_0 ditolak apabila : $t_h > t_t$ atau $t_h < -t_t$ artinya pada taraf signifikansi 5%, variabel bebas secara individu berpengaruh terhadap variabel terikat.

b. Uji statistik F

Uji statistik F digunakan untuk menunjukkan apakah semua variable bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variable terikat. Pengujian ini menggunakan uji satu sisi. Langkah-langkah analisisnya adalah sebagai berikut:

1). Menentukan formula hipotesis:

$H_o = \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$, artinya variabel bebas secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

$H_a \neq \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq \beta_4 \neq 0$, artinya variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

2). Menentukan tingkat signifikan ($\alpha = 5\%$)

3). Menentukan F_{tabel} dan F_{hitung}

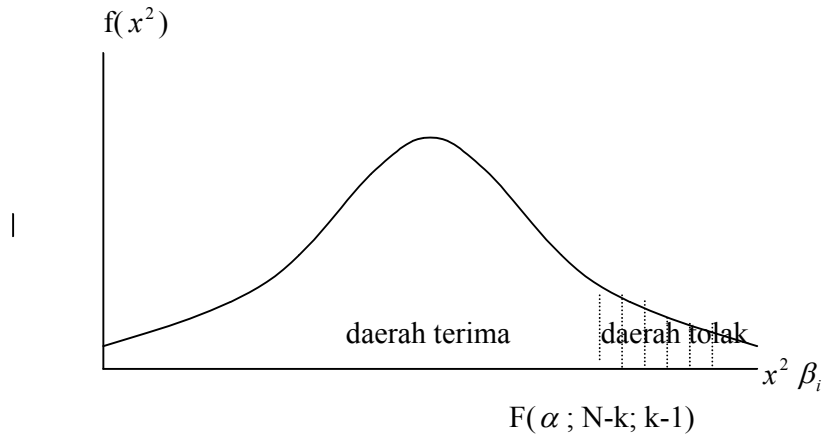
$$F_t = F_{\alpha; n-k; k-1}$$

α : tingkat signifikansi

n : jumlah data

k : banyaknya parameter atau koefisien regresi ditambah konstanta

4). Menentukan kriteria pengujian



Gambar 3.2 Uji-t

Sumber: Gujarati (1995)

5). Menarik kesimpulan

H_o diterima apabila : $F_h < F_t$ artinya pada taraf signifikan 5%, variabel bebas secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

H_a diterima apabila : $F_h > F_t$ artinya pada taraf signifikan 5%, variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

c. Koefisien Determinasi (R^2)

R^2 merupakan koefisien determinasi yang digunakan untuk mengetahui persentase variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen. Nilai koefisien determinan adalah antara nol dan satu. Jika R^2 mendekati satu maka variabel-variabel bebas memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel terikat.

3. Uji Asumsi Klasik

Pengujian ini dimaksudkan untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastik, multikolinieritas, dan autokorelasi dalam hasil estimasi. Untuk menguji asumsi-asumsi tersebut digunakan uji sebagai berikut:

a. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk menunjukkan adanya hubungan linier diantara dua variabel independen atau lebih dalam model regresi. Salah satu cara untuk menganalisis ada tidaknya pengaruh multikolinieritas dalam penelitian ini digunakan Model Klien.

Langkah-langkah metode Klien adalah sebagai berikut:

- 1). Melakukan regresi tiap-tiap variabel bebas atas sisa variabel lainnya dan diperoleh koefisien atas variabel independen.
- 2). r^2 yang dapat dibandingkan dengan koefisien determinasi dari model atau sesama variabel independen terhadap variabel dependen.

3). Adapun kriterianya adalah apabila:

4). $r^2 X_1 X_2 < R^2 Y X_1, X_2, \dots, X_n$ (tidak ada gangguan multikolinieritas)

5). $r^2 X_1 X_2 > R^2 Y X_1, X_2, \dots, X_n$ (ada gangguan multikolinieritas)

b. Uji Heteroskedastisitas

Metode White mengembangkan sebuah metode yang tidak memerlukan asumsi tentang adanya normalitas pada variabel gangguan.

Misalkan kita mempunyai model sebagai berikut:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{1i} + \beta_2 X_{2i} + e_i \quad (1)$$

Langkah Uji White sebagai berikut:

1) Estimasi persamaan kemudian dapatkan residualnya (\hat{e}_i)

2) Lakukan regresi pada persamaan berikut yang disebut regresi auxiliary:

Regresi auxiliary tanpa perkalian antar variabel independen (*no cross terms*)

$$\hat{e}_i^2 = \alpha_0 + \alpha_1 X_{1i} + \alpha_2 X_{2i} + \alpha_3 X_{1i}^2 + \alpha_4 X_{2i}^2 + v_i \quad (2)$$

Regresi auxiliary tanpa perkalian antar variabel independen (*cross terms*)

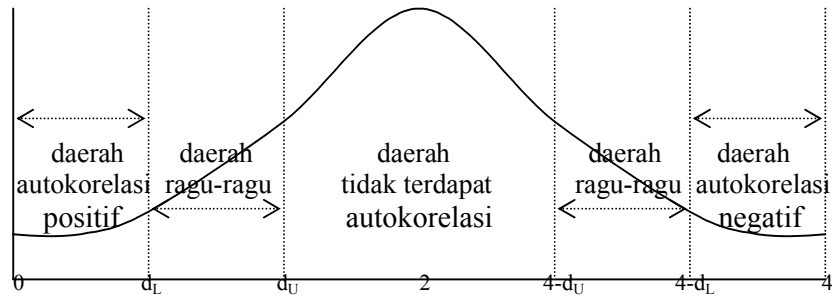
$$\hat{e}_i^2 = \alpha_0 + \alpha_1 X_{1i} + \alpha_2 X_{2i} + \alpha_3 X_{1i}^2 + \alpha_4 X_{2i}^2 + \alpha_5 X_{1i} X_{2i} + v_i \quad (3)$$

Dimana \hat{e}_i^2 merupakan residual kuadrat yang kita peroleh dari persamaan (1). Jika kita mempunyai lebih dari dua variabel independen maka variabel independen dalam persamaan (2) maupun (3) akan lebih banyak. Dari persamaan (2) dan (3) kita dapatkan nilai koefisien determinasi (R^2)

- 3) Hipotesis nol dalam uji ini adalah tidak ada heteroskedastisitas. Uji White didasarkan pada jumlah sampel (n) dikalikan dengan R^2 yang akan mengikuti distribusi chi-squares dengan *degree of freedom* sebanyak variabel independen tidak termasuk konstanta dalam regresi auxiliary. Nilai hitung statistik chi-squares (χ^2) dapat dicari dengan formula: $nR^2 \approx \chi_{df}^2$
- 4) Jika nilai *chi-squares* hitung (nR^2) lebih besar dari nilai χ^2 kritis dengan derajat kepercayaan tertentu (α) maka ada heteroskedastisitas dan sebaliknya jika *chi-squares* hitung lebih kecil dari nilai χ^2 kritis menunjukkan tidak adanya heteroskedastisitas.

c. Uji Autokorelasi

Adanya korelasi antara anggota observasi satu dengan observasi lain yang berlainan waktu. Dalam hal ini uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dikatakan ada masalah autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Masalah ini timbul karena kesalahan pengganggu tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Analisis ini menggunakan Uji Durbin-Watson.



Gambar 3.3 DW-test, (Agus, 2007: 160)

$0 < d < d_L$: Menolak hipotesis nol, ada autokorelasi positif

$d_L \leq d \leq d_U$: Daerah keragu-raguan, tidak ada keputusan

$d_U \leq d \leq 4 - d_U$: Menerima hipotesis nol, tidak ada autokorelasi

$4 - d_U \leq d \leq 4 - d_L$: Daerah keragu-raguan, tidak ada keputusan

$4 - d_L \leq d \leq 4$: Menolak hipotesis nol, ada autokorelasi negatif

Rancangan model ekonometrika yang dipilih adalah sebagai berikut :

$$KFD_{it} = \beta_0 + \beta_1 PD_{it} + \beta_2 RD_{it} + \beta_3 BHP_{it} + \beta_4 PDRB_{it} + e_{it}$$

Dimana :

KFD : Kapasitas Fiskal Daerah

β_0 : Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$: Koefisien slope

PD : Pajak Daerah

RD : Retribusi Daerah

BHP : Bagi Hasil Pajak

PDRB : Produk Domestik Regional Bruto

e : Variabel pengganggu yang lain

i : provinsi (yang berjumlah 30)

t : periode waktu tahunan (2001-2005)

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Wilayah Indonesia

Indonesia adalah negara Asia Tenggara, terletak di garis khatulistiwa dan berada di antara Benua Asia dan Australia serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Sehingga disebut juga sebagai Nusantara (Kepulauan Antara). Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia terdiri dari 17.508 pulau. Dengan populasi sebesar 222 juta jiwa pada tahun 2006. Bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik, dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan presiden yang dipilih langsung. Ibukota negara ialah Jakarta.

Indonesia terletak pada koordinat 6°LU - $11^{\circ}08'\text{LS}$ dan dari 95°BB - $141^{\circ}45'\text{BT}$. Wilayah Indonesia terbentang sepanjang 3.977 mil di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, dengan luas daratan 1.922.570 km² dan luas perairannya 3.257.483 km². Pulau terpadat penduduknya adalah pulau Jawa. Indonesia terdiri dari lima pulau besar, yaitu: Jawa dengan luas 132.107 km², Sumatra dengan luas 473.606 km², Kalimantan dengan luas 539.460 km², Sulawesi dengan luas 189.216 km², dan Papua dengan luas 421.981 km². Batas wilayah Indonesia searah penjuruan mata angin, yaitu:

Utara : Negara Malaysia, Singapura, Filipina, dan Laut China Selatan

Selatan : Negara Australia, Timor Leste, dan Samudera Hindia

Barat : Samudera Hindia

Timur : Negara Papua Nugini, Timor Leste, dan Samudera Pasifik

Pada era reformasi terdapat tuntutan pemekaran sejumlah provinsi di Indonesia. Pemekaran provinsi di Indonesia sejak tahun 1999 adalah sebagai berikut:

- Maluku Utara dengan ibukota Sofifi-Ternate, dimekarkan dari Provinsi Maluku, menjadi provinsi Indonesia ke-27 pada tanggal 4 Oktober 1999.
- Banten dengan ibukota Serang, dimekarkan dari Provinsi Jawa Barat, menjadi provinsi Indonesia ke-28 pada tanggal 17 Oktober 2000.
- Kepulauan Bangka Belitung dengan ibukota Pangkal Pinang, menjadi provinsi Indonesia ke-29 pada tanggal 4 Desember 2000.
- Gorontalo dengan ibukota Kota Gorontalo, dimekarkan dari Provinsi Sulawesi Utara, menjadi provinsi Indonesia ke-30 pada tanggal 22 Desember 2000.
- Irian Jaya Barat dengan ibukota Manokwari, dimekarkan dari Provinsi Papua, menjadi provinsi Indonesia ke-31 pada tanggal 21 November 2001.
- Pada tanggal 11 November 2001 pula, Provinsi Papua dimekarkan pula provinsi baru Irian Jaya Tengah. Namun pemekaran ini akhirnya dibatalkan karena mendapat banyak tentangan.
- Kepulauan Riau dengan ibukota Tanjung Pinang, dimekarkan dari Provinsi Riau, menjadi provinsi Indonesia ke-32 pada tanggal 25 Oktober 2002.
- Sulawesi Barat dengan ibukota Mamuju, dimekarkan dari Provinsi Sulawesi Selatan, menjadi provinsi Indonesia ke-33 pada tanggal 5 Oktober 2004.

Tabel 4.1.1 Jumlah Penduduk di Indonesia Mengacu kepada Data P4B (BPS)

Berdasarkan Survei Penduduk Antar Sensus (Supas) 2005

Provinsi	Ibu Kota	Populasi	Luas (km ²)	Status Khusus	Pulau
<u>Nanggroe Aceh Darussalam</u>	<u>Banda Aceh</u>	4.031.589	56.500,51	<u>Daerah Khusus</u>	<u>Sumatera</u>
<u>Sumatera Utara</u>	<u>Medan</u>	12.450.911	72.427,81		<u>Sumatera</u>
<u>Sumatera Barat</u>	<u>Padang</u>	4.566.126	42.224,65		<u>Sumatera</u>
<u>Riau</u>	<u>Pekanbaru</u>	4.579.219	87.844,23		<u>Sumatera</u>
<u>Jambi</u>	<u>Jambi</u>	2.635.968	45.348,49		<u>Sumatera</u>
<u>Sumatera Selatan</u>	<u>Palembang</u>	6.782.339	60.302,54		<u>Sumatera</u>
<u>Bengkulu</u>	<u>Bengkulu</u>	1.549.273	19.795,15		<u>Sumatera</u>
<u>Lampung</u>	<u>Bandar Lampung</u>	7.116.177	37.735,15		<u>Sumatera</u>
<u>Kepulauan Bangka Belitung</u>	<u>Pangkal Pinang</u>	1.043.456	16.424,14		<u>Sumatera</u>
<u>Kepulauan Riau</u>	<u>Tanjung Pinang</u>	1.274.848	8.084,01		<u>Sumatera</u>
<u>Daerah Khusus Ibukota Jakarta</u>	<u>Jakarta</u>	8.860.381	740,29	<u>Daerah Khusus</u>	<u>Jawa</u>
<u>Jawa Barat</u>	<u>Bandung</u>	38.965.440	36.925,05		<u>Jawa</u>
<u>Jawa Tengah</u>	<u>Semarang</u>	31.977.968	32.799,71		<u>Jawa</u>
<u>Daerah Istimewa Yogyakarta</u>	<u>Yogyakarta</u>	3.343.651	3.133,15	<u>Daerah Istimewa</u>	<u>Jawa</u>
<u>Jawa Timur</u>	<u>Surabaya</u>	36.294.280	46.689,64		<u>Jawa</u>
<u>Banten</u>	<u>Serang</u>	9.028.816	9.018,64		<u>Jawa</u>
<u>Bali</u>	<u>Denpasar</u>	3.383.572	5.449,37		<u>Nusa Tenggara</u>
<u>Nusa Tenggara Barat</u>	<u>Mataram</u>	4.184.411	19.708,79		<u>Nusa Tenggara</u>
<u>Nusa Tenggara Timur</u>	<u>Kupang</u>	4.260.294	46.137,87		<u>Nusa Tenggara</u>
<u>Kalimantan Barat</u>	<u>Pontianak</u>	4.052.345	120.114,32		<u>Kalimantan</u>
<u>Kalimantan Tengah</u>	<u>Palangkaraya</u>	1.914.900	153.564,50		<u>Kalimantan</u>
<u>Kalimantan Selatan</u>	<u>Banjarmasin</u>	3.281.993	38.884,28		<u>Kalimantan</u>
<u>Kalimantan Timur</u>	<u>Samarinda</u>	2.848.798	194.849,08		<u>Kalimantan</u>
<u>Sulawesi Utara</u>	<u>Manado</u>	2.128.780	13.930,73		<u>Sulawesi</u>
<u>Sulawesi Tengah</u>	<u>Palu</u>	2.294.841	68.089,83		<u>Sulawesi</u>
<u>Sulawesi Selatan</u>	<u>Makassar</u>	7.509.704	46.116,45		<u>Sulawesi</u>
<u>Sulawesi Tenggara</u>	<u>Kendari</u>	1.963.025	36.757,45		<u>Sulawesi</u>
<u>Gorontalo</u>	<u>Gorontalo</u>	922.176	12.165,44		<u>Sulawesi</u>
<u>Sulawesi Barat</u>	<u>Mamuju</u>	969.429	16.787,19		<u>Sulawesi</u>
<u>Maluku</u>	<u>Ambon</u>	1.251.539	47.350,42		<u>Maluku</u>
<u>Maluku Utara</u>	<u>Ternate</u>	884.142	39.959,99		<u>Maluku</u>
<u>Papua Barat</u>	<u>Manokwari</u>	643.012	114.566,40	<u>Daerah Khusus</u>	<u>Papua</u>
<u>Papua</u>	<u>Jayapura</u>	1.875.388	309.934,40	<u>Daerah Khusus</u>	<u>Papua</u>

Sumber: Data Wilayah Depdagri.

Indonesia saat ini terdiri dari 33 provinsi, lima di antaranya daerah istimewa. Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, DKI Jakarta, D.I. Yogyakarta, Papua, dan Papua Barat memiliki hak istimewa legislatur yang lebih besar dan tingkat otonomi yang lebih tinggi dari pemerintahan pusat daripada provinsi lainnya. Tiap provinsi memiliki badan legislatur dan gubernur. Provinsi dibagi menjadi kabupaten dan kota, kecamatan dan kelurahan serta desa.

Tabel 4.1.2 Penerimaan Pajak Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia
Tahun 2001-2005 (dalam persen)

Jenis Pajak	2001	2002	2003	2004	2005
Provinsi					
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	55,77	45,80	48,62	48,40	46,42
Pajak Kendaraan Bermotor	42,22	33,49	36,46	35,06	34,50
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	1,84	14,48	13,46	14,35	17,24
Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan	0,13	0,59	1,46	2,18	1,84
Pajak Kendaraan Di atas Air	0,00	5,65	0,00	0,00	0,00
Bea Balik Nama Kendaraan Di atas Air	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Kabupaten/Kota					
Pajak Penerangan Jalan	42,77	49,71	53,24	53,99	53,02
Pajak Hotel dan Restoran	38,20	31,25	25,75	27,57	29,36
Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	7,41	7,98	7,68	5,90	5,35
Pajak Reklame	3,04	3,66	4,79	4,87	5,53
Pajak Hiburan	2,70	2,77	2,85	2,85	2,78
Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00	0,70	0,82
Pajak Lainnya	5,89	4,63	5,68	4,11	3,13

Sumber: Departemen Keuangan, diolah

Apabila dilihat dari jenis pajaknya, pada tahun 2005, Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor menyumbang 80,92% dari total penerimaan pajak provinsi. Sementara itu, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Hotel dan Restoran menyumbang 82,38% dari total penerimaan pajak kabupaten/kota.

Pada tabel 4.1.3, terlihat bahwa tahun 2005 penerimaan retribusi kabupaten/kota yang bersumber dari retribusi pelayanan kesehatan memberikan kontribusi yang paling dominan, yakni mencapai hampir 40% dari total penerimaan retribusi. Retribusi lainnya yang juga memberikan kontribusi cukup besar berasal dari retribusi IMB (11,72%), retribusi pasar (5,74%), retribusi persampahan/kebersihan (5,20%), retribusi KTP dan akte catatan sipil (4,78%). Lebih besarnya peranan retribusi di kabupaten/kota dibandingkan dengan retribusi di provinsi tersebut sejalan dengan lebih besarnya peranan kabupaten/kota dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Tabel 4.1.3 Penerimaan Retribusi Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2001-2005
(dalam persen)

Retribusi Daerah	2001	2002	2003	2004	2005
Retribusi Pelayanan Kesehatan	30,81	33,37	35,51	39,68	39,90
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	11,13	10,78	10,62	11,04	11,72
Retribusi Pelayanan Pasar	9,67	8,73	8,51	6,95	5,74
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	4,22	4,02	4,57	3,91	5,20
Retribusi Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil	5,98	5,77	5,25	4,50	4,78
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	3,83	4,34	4,85	4,54	4,55
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1,00	2,01	2,61	2,52	2,77
Retribusi Terminal	4,40	4,00	4,06	3,28	2,70
Retribusi Izin Gangguan	2,42	2,79	2,58	2,52	2,68
Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum	3,10	2,78	3,11	2,54	2,54
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	2,00	1,74	1,80	1,54	1,31
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	0,40	0,51	0,72	0,83	1,06
Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan	1,65	1,39	1,22	0,14	0,98
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	0,94	1,17	1,34	1,18	0,74
Retribusi Rumah Potong Hewan	1,00	0,80	0,76	0,72	0,55
Retribusi Izin Trayek	0,42	0,46	0,47	0,42	0,40
Retribusi Tempat Khusus Parkir	0,53	0,49	0,65	0,47	0,35
Retribusi Pengolahan Limbah Cair	0,08	0,11	0,19	0,12	0,28
Retribusi Tempat Pelelangan	0,05	0,09	0,27	0,30	0,26
Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal	0,06	0,24	0,36	0,34	0,21
Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	0,15	0,13	0,13	0,16	0,18
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	0,15	0,51	0,40	0,09	0,12
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	0,13	0,14	0,15	0,12	0,12
Retribusi Penyedotan Kakus	0,13	0,14	0,13	0,12	0,10
Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa	0,04	0,04	0,09	0,05	0,05
Retribusi Penyeberangan di atas Air	0,03	0,03	0,03	0,13	0,04
Retribusi Pengujian Kapal Perikanan	0,00	0,06	0,01	0,04	0,01
Retribusi Lainnya	15,67	13,36	9,58	10,74	10,67

Sumber: Departemen Keuangan, data diolah

Pelaksanaan desentralisasi fiskal bertujuan untuk mendukung pendanaan atas urusan-urusan yang telah diserahkan kepada daerah, agar daerah dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Hal ini diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, sehingga akan mendorong perkembangan ekonomi melalui pembangunan daerah. melalui keseimbangan peran dari pemerintahan, sektor swasta, dan masyarakat. Pemerintahan berperan untuk menjalankan dan menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif bagi unsur-unsur lain. Sektor swasta berperan mewujudkan penciptaan lapangan kerja dan pendapatan. Sedangkan masyarakat berperan dalam penciptaan interaksi sosial, ekonomi dan politik.

Tabel 4.1.4 Kontribusi Tertinggi dan Terendah Variabel yang di Teliti
(Milyaran Rupiah)

Variabel	2001		2002		2003	
	Provinsi	Total	Provinsi	Total	Provinsi	Total
KFD						
Tertinggi	DKI	6.555,54	DKI	7.700,81	DKI	9.024,76
Terendah	Gorontalo	10,89	Malut	28,84	Malut	37,16
PD						
Tertinggi	DKI	3.056,75	DKI	3.703,57	DKI	4.401,72
Terendah	Malut	3,50	Malut	7,29	Malut	13,96
RD						
Tertinggi	DKI	240,01	DKI	319,27	DKI	336,52
Terendah	Gorontalo	0,19	Malut	0,00	Malut	0,00
BHP						
Tertinggi	DKI	2.726,74	DKI	3.002,62	DKI	3.677,16
Terendah	Gorontalo	3,13	Gorontalo	4,96	Gorontalo	6,19
PDRB						
Tertinggi	DKI	238.673,94	DKI	250.331,16	DKI	263.624,24
Terendah	Gorontalo	1.554,10	Gorontalo	1.655,33	Gorontalo	1.769,19

Tabel Lanjutan

Variabel	2004		2005	
	Provinsi	Total	Provinsi	Total
KFD				
Tertinggi	DKI	10.619,08	DKI	12.594,85
Terendah	Malut	39,49	Gorontalo	59,25
PD				
Tertinggi	DKI	5.497,78	DKI	6.513,81
Terendah	Malut	11,28	Malut	24,47
RD				
Tertinggi	DKI	423,06	DKI	419,67
Terendah	Gorontalo	1,36	Malut	0,52
BHP				
Tertinggi	DKI	4.099,02	DKI	4.858,54
Terendah	Gorontalo	6,94	Gorontalo	12,99
PDRB				
Tertinggi	DKI	278.524,82	DKI	295.270,54
Terendah	Gorontalo	1.891,76	Gorontalo	2.027,72

Berdasarkan tabel 4.1.4 nilai tertinggi dari keseluruhan variabel yang diteliti adalah Provinsi DKI Jakarta, sedangkan untuk nilai terendah adalah Provinsi Gorontalo atau Maluku Utara.

Tabel 4.1.5 Provinsi dengan Variabel diatas Rata-rata:

Th.	Ket.	KFD	PD	RD	BHP	PDRB
2001	Rata-rata	777.486,35	379.726,56	24.920,57	238.088,62	51.717,93
	Provinsi	Riau DKI Jakarta Jabar Jateng Jatim Kaltim	Sumut DKI Jakarta Jabar Jateng Jatim	DKI Jakarta Jateng Jatim Kaltim	DKI Jakarta Jabar Jatim	Sumut Riau DKI Jakarta Jabar Jateng Jatim Kaltim Banten
2002	Rata-rata	578.045,79	238.636,23	18.125,60	180.894,09	59.157,93
	Provinsi	NAD Riau DKI Jakarta Jabar Jateng Jatim Kaltim	Sumut Riau DKI Jakarta Jabar Jateng Jatim Banten	DKI Jakarta Jateng Jatim Kaltim Sulsel	DKI Jakarta Jabar Jatim Banten	Sumut Riau Sumsel DKI Jakarta Jabar Jateng Jatim Kaltim Banten
2003	Rata-rata	886.090,56	417.921,65	30.337,47	337.649,74	63.564,97
	Provinsi	NAD Riau DKI Jakarta Jabar Jateng Jatim Kaltim	Sumut Riau DKI Jakarta Jabar Jateng Jatim Banten	DKI Jakarta Jateng Kaltim Sulsel	Riau DKI Jakarta Jabar Jatim Banten	Sumut Riau DKI Jakarta Jabar Jateng Jatim Kaltim Banten
2004	Rata-rata	747.207,56	345.428,15	24.461,21	252.210,81	71.979,77
	Daerah	NAD Sumut Riau DKI Jakarta Jabar Jateng Jatim Kaltim Banten	DKI Jakarta Jabar Jateng Jatim Banten	DKI Jakarta Jateng Jatim Kaltim Sulsel	DKI Jakarta Jateng Jatim Kaltim Banten	Sumut Riau DKI Jakarta Jabar Jateng Jatim Kaltim Banten
2005	Rata-rata	816.649,06	381.674,90	27.399,34	294.930,28	86.580,63
	Provinsi	NAD Sumut Riau DKI Jakarta Jabar Jateng Jatim Kaltim	Sumut DKI Jakarta Jabar Jateng Jatim Banten	Lampung DKI Jakarta Jabar Jatim Kaltim Banten	Sumut Riau DKI Jakarta Jabar Jateng Jatim Kaltim Banten	Sumut Riau DKI Jakarta Jabar Jateng Jatim Kaltim

Berdasarkan tabel 4.1.5 terlihat bahwa Provinsi Riau, DKI Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim dan Kaltim cenderung memiliki tingkat Kapasitas fiskal Daerah di atas rata-rata.

B. Hasil Analisis

1. Hasil Estimasi Data Panel

Ada banyak cara untuk menaksir model dalam data panel. Teknik penaksiran *fixed effect* biasa digunakan untuk menganalisis panel data *time series* dan *cross section* dengan menggunakan asumsi slope koefisien konstan tetapi *intercept* antar *cross section* bervariasi. Dalam studi ini penaksiran tidak dilakukan dengan teknik *Ordinary Least Square* (OLS) biasa, sebab data yang digunakan adalah *pooled data*. Analisis yang membedakan antar unit individu dan antar waktu harus diperhitungkan. *Random effect* merupakan variasi dari metode *Generalized Least Square* (GLS) sebagai pembandingan untuk mengetahui metode yang lebih baik digunakan. Metode ini merupakan pendekatan regresi data panel dengan pendekatan autokorelasi, bahwa ada korelasi antar observasi, baik lintas sektoral maupun runtut waktu (Insukindro, dkk, 2003: 225).

a. Metode *Ordinary Least Square*

Tabel 4.2.1 Hasil Estimasi Data Panel dengan *Pooled OLS*:

Dependent Variable: KFD?				
Method: Pooled Least Squares				
Date: 06/01/09 Time: 11:00				
Sample: 2001 2005				
Included observations: 5				
Number of cross-sections used: 30				
Total panel (balanced) observations: 150				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	61.25412	32.31870	1.895315	0.0600
PD?	0.254694	0.119850	2.125102	0.0353
RD?	2.265943	0.943280	2.402196	0.0176
BHP?	1.435174	0.107928	13.29750	0.0000
PDRB?	0.005774	0.000828	6.970547	0.0000
R-squared	0.970879	Mean dependent var	969.4498	
Adjusted R-squared	0.970076	S.D. dependent var	1812.635	
S.E. of regression	313.5615	Sum squared resid	14256521	
F-statistic	1208.555	Durbin-Watson stat	1.236666	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Data diolah dengan *Eviews 4.1*

Metode OLS merupakan metode pengolahan data *cross section* dan *time series* yang kemudian diestimasi menggunakan metode OLS metode ini mengasumsikan slope dan *intercept* koefisien konstan. Dari hasil pengujian metode OLS terlihat bahwa R^2 sebesar 97,09%, dengan DW-statistik sebesar 1,236666 yang berarti mengindikasikan terdapat autokorelasi positif. Namun salah satu asumsi yang menyertai pendekatan OLS adalah bahwa konstanta atau *intercept* adalah sama untuk semua provinsi (koefisien konstanta tidak signifikan) apabila hal ini tidak dipenuhi, maka pendekatan OLS tidak layak digunakan dalam fungsi ini. Meskipun hasil dari estimasi ini sesuai dengan teori awal.

b. Metode *Fixed Effect*

Metode *Fixed Effect* memperhitungkan kemungkinan bahwa kita menghadapi masalah *omitted variables* (model yang mengabaikan variable relevan) dimana *omitted variables* mungkin membawa perubahan *intercept time series* atau *cross section*. Pada estimasi *fixed effect* disini, diasumsikan slope koefisien untuk tiap provinsi konstan namun *intercept* berbeda antar individu namun *intercept* tiap provinsi tersebut tidak bervariasi sepanjang waktu.

Tabel 4.2.2 Hasil Estimasi Data Panel dengan *Fixed Effect*:

Dependent Variable: KFD?				
Method: Pooled Least Squares				
Date: 06/01/09 Time: 11:01				
Sample: 2001 2005				
Included observations: 5				
Number of cross-sections used: 30				
Total panel (balanced) observations: 150				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
PD?	1.176148	0.137320	8.565024	0.0000
RD?	0.285468	1.052498	0.271229	0.7867
BHP?	0.435284	0.114812	3.791288	0.0002
PDRB?	0.002311	0.001928	1.199071	0.2329
Fixed Effects				
_NAD--C	921.3461			
_SUMUT--C	-249.3190			
_SUMBAR--C	-35.83016			
_RIAU--C	818.5276			
_JAMBI--C	22.25870			
_SUMSEL--C	87.08555			
_BENGKULU--C	-4.968860			
_LAMPUNG--C	22.44061			
_DKI--C	1359.516			
_JABAR--C	-546.9310			
_JATENG--C	-305.1246			
_DIY--C	-40.78661			
_JATIM--C	-618.5725			
_KALBAR--C	-43.05678			
_KALTENG--C	14.12289			
_KALSEL--C	27.64938			
_KALTIM--C	1213.947			
_SULUT--C	-15.44842			
_SULTENG--C	-19.46413			
_SULSEL--C	-28.83198			
_SULTRA--C	1.567348			
_BALI--C	-8.526636			
_NTB--C	27.07281			
_NTT--C	15.64086			
_PAPUA--C	162.1162			
_GORONTALO--C	0.274324			
_BABEL--C	-2.534412			
_BANTEN--C	-95.79015			
_MALUKU--C	15.45780			
_MALUT--C	16.01472			
R-squared	0.992757	Mean dependent var	969.4498	
Adjusted R-squared	0.990696	S.D. dependent var	1812.635	
S.E. of regression	174.8423	Sum squared resid	3546102.	
F-statistic	5299.503	Durbin-Watson stat	1.828545	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Data diolah dengan *Eviews*

Dari hasil estimasi, terlihat bahwa nilai R^2 sebesar 99,28%. Nilai intercept untuk 30 provinsi berbeda yaitu 921,3461 untuk NAD,

-249,3190 untuk Sumut, -35,83016 untuk Sumbar, 818,5276 untuk Riau, 22,25870 untuk Jambi, 87,08555 untuk Sumsel, -4,968860 untuk Bengkulu, 22,44061 untuk Lampung, 1359,516 untuk DKI, -546,9310 untuk Jabar, -305,1246 untuk Jateng, -40,78661 untuk DIY, -618,5725 untuk Jatim, -43,05678 untuk Kalbar, 14,12289 untuk Kalteng, 27,64938 untuk Kalsel, 1213,947 untuk Kaltim, -15,44842 untuk Sulut, -19,46413 untuk Sulteng, -28,83198 untuk Sulsel, 1,567348 untuk Sultra, -8,526636 untuk Bali, 27,07281 untuk NTB, 15,64086 untuk NTT, 162,1162 untuk Papua, 0,274324 untuk Gorontalo, -2,534412 untuk Babel, -95,79015 untuk Banten, 15,45780 untuk Maluku, dan 16,01472 untuk Malut. Perbedaan ini mencerminkan terdapat faktor-faktor tertentu yang berbeda dalam mempengaruhi Kapasitas Fiskal Daerah pada tiap provinsi. Provinsi yang mempunyai rata-rata perubahan Kapasitas Fiskal Daerah terbesar adalah Provinsi DKI Jakarta, sedangkan yang terkecil adalah Provinsi Jatim.

c. Metode *Generalized Least Square* (GLS)

Pendekatan GLS disebut juga dengan pendekatan regresi data panel dengan pendekatan autokorelasi dengan mengasumsikan terdapat korelasi antar observasi baik runtut waktu maupun lintas sektoral. Korelasi antar observasi itu harus dikoreksi dengan menggunakan koefisien korelasinya. Pendekatan GLS berarti menggunakan estimasi *varians residual cross section*. Apabila struktur korelasi identik untuk setiap individual, dilakukan estimasi dengan OLS, maka hasil estimator tidak akan efisien, metode yang paling tepat digunakan adalah GLS.

Tabel 4.2.3 Hasil Estimasi Data Panel dengan *Random Effect*:

Dependent Variable: KFD?				
Method: GLS (Variance Components)				
Date: 06/01/09 Time: 11:02				
Sample: 2001 2005				
Included observations: 5				
Number of cross-sections used: 30				
Total panel (balanced) observations: 150				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	68.01901	50.39670	1.349672	0.1792
PD?	0.836326	0.116078	7.204844	0.0000
RD?	2.248288	0.982206	2.289020	0.0235
BHP?	0.907900	0.103231	8.794851	0.0000
PDRB?	0.002857	0.000980	2.916116	0.0041
Random Effects				
_NAD--C	678.8704			
_SUMUT--C	-155.3736			
_SUMBAR--C	-62.30020			
_RIAU--C	600.8526			
_JAMBI--C	-40.51707			
_SUMSEL--C	-3.346369			
_BENGKULU--C	-67.11329			
_LAMPUNG--C	-48.64557			
_DKI--C	213.3672			
_JABAR--C	-226.3990			
_JATENG--C	-292.8383			
_DIY--C	-55.75380			
_JATIM--C	-409.1647			
_KALBAR--C	-86.09581			
_KALTENG--C	-57.49856			
_KALSEL--C	-19.03122			
_KALTIM--C	690.1614			
_SULUT--C	-64.00190			
_SULTENG--C	-72.49893			
_SULSEL--C	-90.94063			
_SULTRA--C	-61.08938			
_BALI--C	8.654083			
_NTB--C	-50.94134			
_NTT--C	-64.92513			
_PAPUA--C	35.51109			
_GORONTALO--C	-55.53896			
_BABEL--C	-46.04902			
_BANTEN--C	-96.75177			
_MALUKU--C	-53.58653			
_MALUT--C	-47.01560			
GLS Transformed Regression				
R-squared	0.986345	Mean dependent var		969.4498
Adjusted R-squared	0.985969	S.D. dependent var		1812.635
S.E. of regression	214.7144	Sum squared resid		6684831.
Durbin-Watson stat	1.565457			
Unweighted Statistics including Random Effects				
R-squared	0.990390	Mean dependent var		969.4498
Adjusted R-squared	0.990124	S.D. dependent var		1812.635
S.E. of regression	180.1320	Sum squared resid		4704895.
Durbin-Watson stat	2.224239			

Sumber: Data diolah dengan *Eviews 4.1*

Dari hasil estimasi di atas, diperoleh nilai R^2 sebesar 99,04% dan DW-statistik sebesar 2,224239 untuk yang tertimbang. Hubungan antara variabel dependen Kapasitas Fiskal Daerah dan independen lainnya sesuai dengan teori awal.

2. Pemilihan Model Estimasi

Pada pemilihan model disini hanya akan menguji antara metode *fixed effect* dan GLS, karena dilihat dari probabilitas konstanta dari metode OLS, terlihat bahwa metode OLS tidak layak untuk mengestimasi fungsi Kapasitas Fiskal Daerah. Selain itu, alasan tidak dipilihnya metode OLS adalah karena pada model OLS diasumsikan bahwa nilai *intercept* tiap individu (*cross section*) adalah sama. Model juga mengasumsikan bahwa slope koefisien dari variabel adalah identik untuk semua individu (*cross section*). Sehingga, walaupun metode OLS memberikan kemudahan model akan mendistorsi gambaran sebenarnya dari hubungan antara variabel independent dengan dependent.

a. Uji Signifikansi *Fixed Effect*

Untuk mengetahui metode mana yang tepat digunakan antar *fixed effect* atau *Ordinary Least Square*, maka dilakukan pengujian dengan menggunakan *Resticted F Test* dimana hipotesisnya:

H_0 : Metode *pooled OLS (restricted)*

H_a : Metode *fixed effect (unrestricted)*

$$F = \frac{(R_{UR}^2 - R_R^2) / m}{(1 - R_{UR}^2) / n - k}$$

$$F_{hitung} = \frac{(0,992757 - 0,970879) / 5}{(1 - 0,992757) / (150 - 34)}$$

$$F_{hitung} = \frac{0,021878/5}{0,007243/116}$$

$$F_{hitung} = \frac{0,004376}{0,000062}$$

$$F_{hitung} = 70,07726$$

$$F_{tabel} (0,05;120;4)$$

$$= 2,45$$

F_{hitung} signifikan ($F_{hitung} > F_{tabel}$), maka estimasi model dengan *fixed effect* lebih baik dibanding estimasi dengan *pooled OLS*.

b. Uji Signifikansi *Random Effect*

Untuk mengetahui apakah model *Random Effect* lebih baik dari metode OLS digunakan uji *Lagrange Multiplier* (LM). Uji signifikansi *Random Effect* ini dikembangkan oleh *Bruesch-Pagan*. Metode ini untuk uji signifikansi model *Random Effect* didasarkan pada nilai residual dari metode OLS.

Uji LM ini didasarkan pada distribusi *chi-squares* dengan *degree of freedom* sebesar jumlah variabel independen. Jika nilai LM lebih besar nilai kritis statistik *chi-squares* maka menolak hipotesis nul. Artinya, estimasi yang tepat untuk model regresi data panel adalah metode *Random Effect* dari pada metode OLS. Sebaiknya jika nilai LM statistik *chi-squares* sebagai nilai kritis maka menerima hipotesis nul. Estimasi *Random Effect* dengan demikian tidak bisa digunakan untuk regresi data panel, tetapi digunakan metode OLS.

H_0 : Metode *pooled OLS*

H_a : Metode *random effect*

$$LM = \frac{nT}{2(T-1)} \left[\frac{\sum_{i=1}^n (Te_i)^2}{\sum_{i=1}^n \sum_{t=1}^T e_{it}^2} - 1 \right]^2$$

$$LM = \frac{30(5)}{2(5-1)} \left[\frac{36055615,53}{14256521} - 1 \right]^2$$

$$LM = \frac{150}{2(4)} [2,529061299 - 1]^2$$

$$LM = \frac{150}{8} [1,529061299]^2$$

$$LM = 18,75 [2,338028457]$$

$$LM = 43,83803358$$

Nilai kritis tabel distribusi *chi squares* dengan df sebesar 4 dengan tingkat $\alpha = 5\%$ sebesar 9,4877. Dengan demikian menolak hipotesis nul. Hal ini berarti metode *Random Effect* lebih tepat dibandingkan dengan metode OLS tanpa variabel dummy.

c. Uji Signifikansi *Fixed Effect* atau *Random Effect*

Hausman telah mengembangkan suatu uji statistik untuk memilih apakah menggunakan model *Fixed Effect* atau *Random Effect*. Uji Hausman ini didasarkan pada asumsi bahwa LSDV di dalam metode *Fixed Effect* dan GLS adalah efisien sedangkan metode OLS tidak efisien, di lain pihak alternatifnya metode OLS efisien dan GLS tidak efisien. Karena itu uji hipotesis nulnya adalah hasil estimasi keduanya tidak berbeda sehingga Uji Hausman bisa dilakukan berdasarkan perbedaan estimasi tersebut (Agus, 2007: 261).

Uji Hausman adalah sebagai berikut:

$$m = \hat{q}' \text{Var}(\hat{q})^{-1} \hat{q}$$

dimana $\hat{q} = \left| \hat{\beta} - \hat{\beta}_{GLS} \right|$ dan $Var(\hat{q}) = Var(\hat{\beta}) - Var(\hat{\beta}_{GLS})$

$$m = \hat{q}^1 Var(\hat{q})^{-1} \hat{q} = 16,46946$$

Nilai kritis *chi-squares* dengan df sebesar 4 dengan tingkat α 5% adalah sebesar 9,4877. Dengan demikian berdasarkan Uji Hausman model yang tepat adalah model *Fixed Effect* daripada *Random Effect*.

Tabel 4.2.4 Perbandingan Hasil Estimasi :

Variabel	Ordinary Least Square		Fixed Effect		Random Effect	
	Koefisien	Standar Error	Koefisien	Standar Error	Koefisien	Standar Error
C	61,25412	32,31870	-	-	68,01901	50,39670
PD	0,254694	0,119850	1,176148	0,137320	0,836326	0,116078
RD	2,265943	0,943280	0,285468	1,052498	2,248288	0,982206
BHP	1,435174	0,107928	0,435284	0,114812	0,907900	0,103231
PDRB	0,005774	0,000828	0,002311	0,001928	0,002857	0,000980
R ²	0,970879		0,992757		0,990390	
SE	313,5615		174,8423		180,1320	

SE untuk mengukur tingkat ketelitian pemeriksa. Makin kecil SE suatu pemeriksa, maka makin teliti pemeriksa tersebut makin dekat dengan parameter yang akan diperkirakan. Dari ketiga model tersebut yang memiliki nilai SE terkecil adalah *Model Fixed Effect*. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *Model Fixed Effect* adalah yang paling tepat.

MER dalam eViews hanya dapat digunakan jika jumlah individu lebih besar dibandingkan jumlah koefisien termasuk *intercept*:

- Jika data panel yang dimiliki mempunyai individu waktu (T) lebih besar dibanding jumlah individu (N) maka disarankan untuk menggunakan Model Efek Tetap.
- Jika data panel yang dimiliki mempunyai individu waktu (T) lebih kecil dibanding jumlah individu (N) maka disarankan untuk menggunakan Model Efek Random.

Namun saran-saran pemilihan MER atau MET bukan sesuatu yang mutlak, (Nachrowi, 327).

Tabel 4.2.5 Rangkuman Hasil Estimasi *Model Fixed Effect*:

Variabel Dependen : Kapasitas Fiskal Daerah					
Variabel	Koefisien	SE	t _{statistik}	Prob	Kesimpulan
PD	1,176148	0,137320	8,565024	0,0000	Signifikan
RD	0,285468	1,052498	0,271229	0,7867	Tidak Signifikan
BHP	0,435284	0,114812	3,791288	0,0002	Signifikan
PDRB	0,002311	0,001928	1,199071	0,2329	Tidak Signifikan
			t _{tabel} = ± 1,980		
		F _{tabel} = 2,45	F _{statistik} = 5299,503		Signifikan
R ² = 0,992757					
DW _{statistik} = 1,828545					

Hasil estimasi *Fixed Effect* nilai koefisien untuk variabel PD = 1,176148, RD = 0,285468, BHP = 0,435284 dan PDRB = 0,002311. Variabel PD (Pajak Daerah) dan BHP (Bagi Hasil Pajak) secara statistik signifikan pada $\alpha = 5\%$ yang berarti PD dan BHP berpengaruh positif terhadap KFD (Kapasitas Fiskal Daerah). Sedangkan RD (Retribusi Daerah) dan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) secara statistik tidak signifikan pada $\alpha = 5\%$ yang berarti RD dan PDRB tidak berpengaruh terhadap KFD (Kapasitas Fiskal Daerah).

3. Uji Statistik

a. Uji t :

1). Uji parameter terhadap Pajak Daerah (PD):

Hipotesis:

- $H_0 : \beta_1 = 0$ artinya variabel Pajak Daerah secara individu tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Kapasitas Fiskal Daerah.

- $H_a : \beta_1 \neq 0$ artinya variabel Pajak Daerah secara individu berpengaruh signifikan terhadap variabel Kapasitas Fiskal Daerah.

$$t_{tabel} = \pm t_{\alpha/2; n-k} = (0,025 : df = 145) = \pm 1,980$$

$$t_{hitung} = 8,565024$$

Karena $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Berarti secara individu variabel Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kapasitas Fiskal Daerah.

2). Uji parameter terhadap Retribusi Daerah (RD):

Hipotesis:

- $H_0 : \beta_2 = 0$ artinya variabel Retribusi Daerah secara individu tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Kapasitas Fiskal Daerah.

- $H_a : \beta_2 \neq 0$ artinya variabel Retribusi Daerah secara individu berpengaruh signifikan terhadap variabel Kapasitas Fiskal Daerah.

$$t_{tabel} = \pm t_{\alpha/2; n-k} = (0,025 : df = 145) = \pm 1,980$$

$$t_{hitung} = 0,271229$$

Karena $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Berarti secara individu variabel Retribusi Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Kapasitas Fiskal Daerah.

3). Uji parameter terhadap Bagi Hasil Pajak (BHP):

Hipotesis:

▪ $H_0 : \beta_3 = 0$ artinya variabel Bagi Hasil Pajak secara individu tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Kapasitas Fiskal Daerah.

▪ $H_a : \beta_3 \neq 0$ artinya variabel Bagi Hasil Pajak secara individu berpengaruh signifikan terhadap variabel Kapasitas Fiskal Daerah.

$$t_{tabel} = \pm t_{\alpha/2; n-k} = (0,025 : df = 145) = \pm 1,980$$

$$t_{hitung} = 3,791288$$

Karena $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Berarti secara individu variabel Bagi Hasil Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kapasitas Fiskal Daerah.

4). Uji parameter terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB):

Hipotesis:

▪ $H_0 : \beta_4 = 0$ artinya variabel Produk Domestik Regional Bruto secara individu tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Kapasitas Fiskal Daerah.

▪ $H_a : \beta_4 \neq 0$ artinya variabel Produk Domestik Regional Bruto secara individu berpengaruh signifikan terhadap variabel Kapasitas Fiskal Daerah.

$$t_{tabel} = \pm t_{\alpha/2; n-k} = (0,025 : df = 145) = \pm 1,980$$

$$t_{hitung} = 1,199071$$

Karena $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Berarti secara individu variabel Produk Domestik Regional Bruto tidak berpengaruh signifikan terhadap Kapasitas Fiskal Daerah.

b. Uji F :

Hipotesis:

- $H_o = \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$ artinya variabel bebas secara bersama-sama variabel Pajak Daerah (PD), Retribusi Daerah (RD), Bagi Hasil Pajak (BHP), dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Kapasitas Fiskal Daerah (KFD).
- $H_a \neq \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq \beta_4 \neq 0$ artinya variabel bebas secara bersama-sama variabel Pajak Daerah (PD), Retribusi Daerah (RD), Bagi Hasil Pajak (BHP), dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh signifikan terhadap variabel Kapasitas Fiskal Daerah (KFD).

$$F_{tabel} = (\alpha = 0,05; n-k, k-1) = (\alpha = 0,05; 145: 4) = 2,45$$

$$F_{hitung} = 5299,503$$

Karena $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Berarti secara bersama-sama variabel Pajak Daerah (PD), Retribusi Daerah (RD), Bagi Hasil Pajak (BHP), dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh signifikan terhadap variabel Kapasitas Fiskal Daerah (KFD).

c. Koefisien Determinasi R^2 (*Goodness Of Fit*)

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui ketepatan yang baik dalam analisis yang ditunjukkan oleh besarnya koefisien determinasi R^2 . Berdasarkan hasil estimasi didapat nilai koefisien determinasi R^2 sebesar 0,992757 yang menunjukkan bahwa variabel independen yaitu Pajak Daerah (PD), Retribusi Daerah (RD), Bagi Hasil Pajak (BHP), dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) sebesar 99,28% dan sisanya 0,72% dipengaruhi variabel lain diluar model.

d. Interpretasi Hasil Estimasi :

Dari hasil regresi berganda diatas:

- 1). Tanda parameter untuk Pajak Daerah adalah positif yaitu 1,176148 yang akan menunjukkan bahwa apabila Pajak Daerah naik 1 Milyar Rupiah, maka akan mengakibatkan naiknya Kapasitas Fiskal Daerah sebesar 1,176148 Milyar Rupiah, hasil regresi dengan asumsi variabel yang lain tetap (*Ceteris Paribus*). Sedangkan apabila Pajak Daerah turun 1 Milyar Rupiah, maka akan mengakibatkan menurunnya Kapasitas Fiskal Daerah sebesar 1,176148 Milyar Rupiah, hasil regresi dengan asumsi variabel yang lain tetap (*Ceteris Paribus*). Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pajak Daerah sesuai dengan hipotesis penelitian serta sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Joko Tri Haryanto (2006).

Model Leviathan menunjukkan bahwa peningkatan penerimaan pajak daerah tidak harus dicapai dengan mengenakan

tarif pajak yang terlalu tinggi, tetapi dengan pengenaan tarif pajak yang lebih rendah dikombinasikan dengan struktur pajak yang meminimalkan penghindaran pajak dan respon harga dan kuantitas barang terhadap pengenaan pajak sedemikian rupa, maka akan dicapai *Total Penerimaan Maksimum*.

- 2). Tanda parameter untuk Retribusi Daerah adalah positif yaitu 0,285468 namun terbukti tidak signifikan. Berarti terjadi penyimpangan dengan hipotesis yang ada dalam penelitian. Tetapi sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Joko Tri Haryanto (2006). Hal ini terjadi karena dilihat dari data Retribusi Daerah di beberapa provinsi kurang konstan yaitu misalnya Provinsi Gorontalo, Maluku dan Maluku Utara. Retribusi Daerah cenderung berpengaruh terhadap PAD. Sedangkan dalam penelitian ini kemandirian daerah tidak hanya dilihat dari sisi PAD saja tetapi juga Dana Bagi Hasil. Kontribusi Retribusi Daerah di tingkat provinsi cenderung masih kecil. Sebab, terkadang ada asset yang harus diwajibkan membayar tetapi tidak dipungut atau terlewatkan sehingga realisasi yang diterima tidak sesuai dengan target. Lebih besarnya peranan retribusi di kabupaten/kota dibandingkan dengan retribusi di provinsi sejalan dengan lebih besarnya peranan kabupaten/kota dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- 3). Tanda parameter untuk Bagi Hasil Pajak adalah positif yaitu 0,435284 yang akan menunjukkan bahwa apabila Bagi Hasil Pajak naik 1 Milyar Rupiah, maka akan mengakibatkan naiknya Kapasitas

Fiskal Daerah sebesar 0,435284 Milyar Rupiah, hasil regresi dengan asumsi variabel yang lain tetap (*Ceteris Paribus*). Sedangkan apabila Bagi Hasil Pajak turun 1 Milyar Rupiah, maka akan mengakibatkan menurunnya Kapasitas Fiskal Daerah sebesar 0,435284 Milyar Rupiah, hasil regresi dengan asumsi variabel yang lain tetap (*Ceteris Paribus*). Bagi Hasil Pajak sesuai dengan hipotesis penelitian serta sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Joko Tri Haryanto (2006) Semakin tinggi Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (BHPBP), semakin kuat pula derajat desentralisasi fiskalnya (tingkat kemandirian daerahnya). Semakin rendah Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (PHPBP), maka semakin lemah derajat desentralisasi fiskalnya (tingkat kemandirian daerahnya).

- 4). Tanda parameter untuk Produk Domestik Regional Bruto adalah positif yaitu 0,002311 namun terbukti tidak signifikan. Produk Domestik Regional Bruto tidak sesuai dengan hipotesis penelitian. Tetapi sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Joko Tri Haryanto (2006). Pertumbuhan ekonomi dapat mengetahui kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat di dalam meningkatkan produksi barang dan jasa. Pertumbuhan ekonomi meningkat, dikarenakan kegiatan ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa meningkat. Hal tersebut akan mempengaruhi peningkatan penerimaan pendapatan riil masyarakat. Pertumbuhan ekonomi menurun, disebabkan kegiatan ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa menurun. Hal tersebut akan menyebabkan penurunan

penerimaan pendapatan riil masyarakat. Sehingga pertumbuhan ekonomi daerah mempengaruhi penerimaan pajak daerah secara positif. PDRB merupakan kinerja dari pelaku kegiatan ekonomi di suatu daerah tersebut dan bukan milik pemerintah sepenuhnya. Pelaku kegiatan ekonomi terdiri dari rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah sehingga tidak berpengaruh terhadap kapasitas fiskal daerah.

5). Nilai konstanta menunjukkan nilai tetap yang tidak berpengaruh.

4. Uji Asumsi Klasik

Tabel 4.3.1 Uji Heteroskedastisitas pada Estimasi FEM:

Dependent Variable: KFD?				
Method: Pooled Least Squares				
Date: 06/01/09 Time: 11:03				
Sample: 2001 2005				
Included observations: 5				
Number of cross-sections used: 30				
Total panel (balanced) observations: 150				
White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
PD?	1.176148	0.264819	4.441324	0.0000
RD?	0.285468	1.180800	0.241758	0.8094
BHP?	0.435284	0.279677	1.556384	0.1223
PDRB?	0.002311	0.003869	0.597417	0.5514
Fixed Effects				
_NAD--C	921.3461			
_SUMUT--C	-249.3190			
_SUMBAR--C	-35.83016			
_RIAU--C	818.5276			
_JAMBI--C	22.25870			
_SUMSEL--C	87.08555			
_BENGKULU--C	-4.968860			
_LAMPUNG--C	22.44061			
_DKI--C	1359.516			
_JABAR--C	-546.9310			
_JATENG--C	-305.1246			
_DIY--C	-40.78661			
_JATIM--C	-618.5725			
_KALBAR--C	-43.05678			
_KALTENG--C	14.12289			
_KALSEL--C	27.64938			
_KALTIM--C	1213.947			
_SULUT--C	-15.44842			
_SULTENG--C	-19.46413			
_SULSEL--C	-28.83198			
_SULTRA--C	1.567348			
_BALI--C	-8.526636			
_NTB--C	27.07281			
_NTT--C	15.64086			
_PAPUA--C	162.1162			
_GORONTALO--C	0.274324			
_BABEL--C	-2.534412			
_BANTEN--C	-95.79015			
_MALUKU--C	15.45780			
_MALUT--C	16.01472			
R-squared	0.992757	Mean dependent var		969.4498
Adjusted R-squared	0.990696	S.D. dependent var		1812.635
S.E. of regression	174.8423	Sum squared resid		3546102.
F-statistic	5299.503	Durbin-Watson stat		1.828545
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Data diolah dengan *Eviews 4.1*

Pada output estimasi data panel dengan *Fixed Effect* terlihat adanya perubahan di mana ada tiga variabel bebas sekarang yaitu RD, BHP, dan PDRB tidak signifikan secara statistik sedangkan PD signifikan secara statistik yang menunjukkan bahwa model awal tidak terdapat heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi:

$$\alpha = 0,05; N - 1 = 150 - 1 = 149; k = 4$$

Durbin Watson test (Bhargave et al. 1983 dalam Verbeek. 2000: 324):

$$\alpha = 0,05; N = 100; T = 6; K = 3$$

$$d_L = 1,859$$

$$d_U = 1,880$$

$$4 - d_U : 4 - 1,880 = 2,120$$

$$4 - d_L : 4 - 1,859 = 2,141$$

Hasil Estimasi data panel dengan *Fixed Effect* :

Statistik Durbin-Watson menunjukkan angka 1,828545 yang berarti tidak terdapat autokorelasi.

Mengingat MET tidak membutuhkan asumsi terbebasnya model dari serial korelasi, maka uji tentang otokorelasi dapat diabaikan (Nachrowi, 2006 : 330).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan:

Selama ini kemandirian daerah yang kuat diukur dari struktur PAD yang antara lain terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah dan BUMD. Penetapan target PAD yang dilakukan selama ini bersifat incremental dan belum pada potensi dan kapasitas penerimaan PAD yang sesungguhnya sehingga PAD belum optimal menjadi sumber utama dana APBD. Potensi dan kapasitas fiskal merupakan pencerminan kemandirian daerah. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil regresi berganda diatas antara lain adalah:

1. Tanda parameter untuk Pajak Daerah adalah positif yaitu 1,176148 yang akan menunjukkan bahwa apabila Pajak Daerah naik 1 Milyar Rupiah, maka akan mengakibatkan naiknya Kapasitas Fiskal Daerah sebesar 1,176148 Milyar Rupiah, hasil regresi dengan asumsi variabel yang lain tetap (*Ceteris Paribus*). Sedangkan apabila Pajak Daerah turun 1 Milyar Rupiah, maka akan mengakibatkan menurunnya Kapasitas Fiskal Daerah sebesar 1,176148 Milyar Rupiah, hasil regresi dengan asumsi variabel yang lain tetap (*Ceteris Paribus*).
2. Tanda parameter untuk Retribusi Daerah adalah positif yaitu 0,285468 namun terbukti tidak signifikan. Dengan arti lain Retribusi Daerah tidak memiliki pengaruh yang nyata terhadap Kapasitas Fiskal Daerah. Berarti

terjadi penyimpangan dengan hipotesis yang ada dalam penelitian. Tetapi sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Joko Tri Haryanto (2006).

3. Tanda parameter untuk Bagi Hasil Pajak adalah positif yaitu 0,435284 yang akan menunjukkan bahwa apabila Bagi Hasil Pajak naik 1 Milyar Rupiah, maka akan mengakibatkan naiknya Kapasitas Fiskal Daerah sebesar 0,435284 Milyar Rupiah, hasil regresi dengan asumsi variabel yang lain tetap (*Ceteris Paribus*). Sedangkan apabila Bagi Hasil Pajak turun 1 Milyar Rupiah, maka akan mengakibatkan menurunnya Kapasitas Fiskal Daerah sebesar 0,435284 Milyar Rupiah, hasil regresi dengan asumsi variabel yang lain tetap (*Ceteris Paribus*).
4. Tanda parameter untuk Produk Domestik Regional Bruto adalah positif yaitu 0,002311 namun terbukti tidak signifikan. Dengan arti lain Produk Domestik Regional Bruto tidak memiliki pengaruh yang nyata terhadap Kapasitas Fiskal Daerah. Produk Domestik Regional Bruto tidak sesuai dengan hipotesis penelitian. Tetapi sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Joko Tri Haryanto (2006).
5. Uji F menunjukkan bahwa model cukup bagus, karena $F_{hitung} (5299,503) > F_{tabel} (2,45)$ yang berarti secara bersama-sama variabel independen yaitu Pajak Daerah (PD), Retribusi Daerah (RD), Bagi Hasil Pajak (BHP), dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu Kapasitas Fiskal Daerah (KFD). Dengan besarnya nilai R^2 sebesar 0,992757 berarti 99,28% variasi variabel independen (Pajak

Daerah (PD), Retribusi Daerah (RD), Bagi Hasil Pajak (BHP), dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)) mampu menjelaskan variasi dependen (Kapasitas Fiskal Daerah (KFD)) dan sisanya 0,72% dipengaruhi variabel lain diluar model.

B. Saran:

Bertolak dari pokok-pokok kesimpulan tersebut, maka beberapa saran atau kebijakan yang perlu dilakukan antara lain: menyalarkan perpajakan dan retribusi daerah dengan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah, memperluas basis pajak daerah dan memberikan keleluasaan dalam penerapan tarif dan mempertegas dan memperkuat dasar-dasar pemungutan pajak dan retribusi daerah. Melalui ekstensifikasi pemerintah daerah seharusnya dapat mengidentifikasi potensi daerah sehingga peluang-peluang baru untuk sumber penerimaan daerah dapat dicari. Serta secara intensifikasi yaitu dengan cara memperbaiki kinerja pengelolaan pemungutan pajak, antara lain : pendataan kembali wajib pajak dan objek pajak yang sudah ada, melakukan perhitungan efisiensi dan efektivitas pemungutan pajak, meningkatkan kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan, peningkatan kualitas pelayanan baik dari sisi sarana atau prasarannya, kemampuan dan mentalitas sumber daya manusia pengelolanya serta penyederhanaan prosedur pelayanan. Selain itu diperlukan pertimbangan yang cermat dalam menentukan besarnya pajak agar wajib pajak merasa ringan untuk membayar pajak, sehingga pajak yang akan diterima oleh pemerintah daerah akan lebih optimal.

Adapun implementasi kebijakan tersebut dapat dilakukan antara lain:

1. Perluasan objek Pajak Kendaraan Bermotor atas kendaraan pemerintah akan meningkatkan rasa keadilan bagi masyarakat umum, yang pada gilirannya akan meningkatkan kepatuhan untuk membayar pajak. Perluasan objek pajak hotel, yang mencakup seluruh persewaan di hotel, dan perluasan objek pajak restoran, yang juga mencakup seluruh usaha katering akan mengurangi *grey area*, sehingga objek pajak yang ada akan dapat dipungut secara optimal.
2. Pemerintah daerah perlu diberi kewenangan untuk menetapkan tarif pajak sesuai dengan tarif maksimal yang ditetapkan dalam UU, sehingga memungkinkan daerah menyesuaikan target pendapatan pajaknya. Kewenangan daerah dalam menetapkan tarif pajak dapat menciptakan pasar penyediaan layanan masyarakat, sehingga akan mempengaruhi pemilihan lokasi tempat tinggal dan kegiatan investasi.
3. Pemerintah daerah perlu menggali potensi yang dimiliki oleh daerah serta memperhatikan setiap pemungutan yang dapat memberikan sumbangan bagi peningkatan retribusi. sehingga realisasi yang diterima sesuai dengan target yang diharapkan. Sejalan dengan perkembangan otonomi daerah dan dengan adanya pengalihan beberapa fungsi pelayanan dan perizinan dari Pemerintah kepada daerah, maka pemungutan retribusi harus dilakukan secara lebih transparan. Agar beban retribusi yang harus dibayar oleh masyarakat dapat lebih jelas. Penambahan jenis retribusi diatur oleh Pemerintah.
4. Perlunya penambahan pajak baru yakni Pajak Sarang Burung Walet dan Pajak Lingkungan untuk menginternalisasi dampak negatif dari kegiatan usaha tersebut terhadap lingkungan. Hali ini dimaksudkan untuk menyederhanakan

pungutan retribusi yang terkait dengan lingkungan yang selama ini dipungut oleh daerah dengan berbagai nama dan jenis retribusi.

5. Banyak daerah menjadi kurang irasional dalam menciptakan berbagai pajak dan retribusi daerah yang sangat merugikan masyarakat serta bersifat anti investasi. Daerah dimungkinkan untuk menetapkan tarif pajak yang lebih besar terhadap kendaraan-kendaraan dengan isi silinder yang lebih besar, atau terhadap kepemilikan dua atau lebih kendaraan bermotor.
6. Peningkatan pemahaman daerah tentang kebijakan dan mekanisme perhitungan Dana Bagi Hasil Pajak sehingga pemerintah daerah dapat mengetahui dengan jelas arah kebijakan serta formula dan data yang dibutuhkan dalam perhitungannya. Daerah yang tingkat industri serta jasanya tinggi, cenderung memiliki BHPPH yang relatif besar.
7. Penciptakan suatu politik yang kondusif dan melakukan kebijakan terutama yang berpihak kepada kepentingan masyarakat serta mengimplementasikan program pembangunan yang ekonomis dan produktif seperti meningkatkan sektor pertanian, sektor pariwisata, jasa dan lainnya yang ditunjang dengan infrastruktur yang memadai. Selain itu perlu dilakukan upaya untuk menciptakan investasi di masing-masing daerah. Misalnya: pemberian kemudahan perizinan usaha, penyediaan infrastruktur yang memadai, adanya jaminan kepastian hukum dan keamanan, penciptaan kondisi persaingan usaha yang sehat serta transparansi kebijakan pemerintah daerah.
8. Penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap Kapasitas Fiskal Daerah bisa menggunakan sampel serta metode analisis yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggito Abimanyu. 2005. **Evaluasi Pelaksanaan UU Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**. Pusat Pengkajian Ekonomi dan Keuangan Badan Pengkajian Ekonomi, Keuangan, dan Kerjasama Internasional Departemen Keuangan R.I.
- Agus Widarjono. 2007. **Ekonometrika: Teori dan Aplikasi untuk Ekonomi dan Bisnis**. Edisi Kedua. FE UII: EKONISIA.
- Algifari. 2003. **Statistik Induktif Untuk ekonomi dan Bisnis**. Edisi II. Yogyakarta: AMP YKPN.
- BPS Pusat. 2005. **Laporan Statistik Indonesia**. Jakarta: BPS Pusat.
- _____. 2007. **Laporan Statistik Indonesia**. Jakarta: BPS Pusat.
- Budi Mulyana, et al. 2006. **Keuangan Daerah Perspektif Desentralisasi Fiskal dan Pengelolaan APBD di Indonesia**. Jakarta Selatan: Lembaga Pengkajian Keuangan Publik dan Akuntansi Pemerintah (LPKPAP), (Online). (www.bppk.depkeu.go.id, diakses 10 September 2008).
- Departemen Dalam Negeri. **Daftar Provinsi Indonesia**. (online). (<http://id.wikipedia.org/wiki>, diakses 17 September 2008).
- Departemen Keuangan RI Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan. **Pelengkap Buku Pegangan 2008. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah**. (Online). (www.djpk.depkeu.go.id, diakses 17 September 2008).
- Departemen Keuangan RI Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Direktorat Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah. **Profil Pendapatan APBD Propinsi Tahun Anggaran 2007**, (Online). (<http://www.djpk.depkeu.go.id>, diakses 17 September 2008).

Departemen Keuangan RI Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Subdirektorat Dana Perimbangan. Sistem Informasi Keuangan Daerah. (Online). (www.sikd.djapk.go.id/data/apbd/index.htm, diakses 17 September 2008).

Gujarati, Damodar 1995. "*Basic Economics*". Sumarno Zain, Gunawan Hutauruk (ed). **Ekonometrika Dasar**. Jakarta: Erlangga.

Hermanto Siregar. 2007. Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin. IPB & Brighten Institute. (Online), (pse.litbang.deptan.go.id, diakses 17 September 2008).

Insukindro, dkk. 2003. **Ekonometrika Dasar**. FE UGM.

Joko Tri Haryanto. 2006. "Kemandirian Daerah" Sebuah Perspektif Dengan Metode Path Analysis. (Online), (www.fiskal.depkeu.go.id, diakses 15 Juli 2008).

Joko Waluyo. 2007. Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah di Indonesia. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional "Veteran", (Online). (www.theceli.com, diakses 10 September 2008).

Machfud Sidik, et al. 2002a. "DAU" **Konsep, Hambatan, dan Prospek di Era Otonomi Daerah**. Jakarta : Kompas.

Machfud Sidik, 2002b. **Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah**.

Mardiasmo. 2002. "Otonomi Daerah Sebagai Upaya Memperkokoh Basis Perekonomian Daerah". **Artikel – Th. I – No. 4**.

Mudrajad Kuncoro. 2004. **Otonomi dan Pembangunan Daerah, Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang**. Jakarta: Erlangga.

Nachrowi. 2006. **Ekonometrika untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan**. FE UI.

Peraturan Menteri Keuangan No. 129/PMK.02/2005 tentang **Peta Kapasitas Fiskal Dalam Rangka Penerimaan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah Kepada Daerah Dalam Bentuk Hibah.**

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang **Dana Perimbangan.**

Robinson Tarigan. 2004. **Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi.** Jakarta: Bumi Aksara.

Rochman. 2007. **Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah (2001-2005).** FE UII.

Salamah Wahyuni. **Buku Pedoman Penyusunan Skripsi.** FE UNS.

Siti Aisyah Tri Rahayu. 2004. **Peranan Sektor Publik dalam Pertumbuhan Ekonomi Regional di Wilayah Surakarta (1987-2000).** UNS.

Siti Aisyah Tri Rahayu. 2007. **Modul Laboratorium Ekonometrika.** FE UNS.

Tulus Tambunan. 2006. **Perekonomian Indonesia Sejak Orde Lama Hingga Pasca Krisis.** Jakarta: Pustaka Quantum.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang **Pemerintah Daerah.**

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 yang disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang **Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.**

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang **Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.**

Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2007. **Modul Laboratorium Ekonometrika.** FE UNS.

LAMPIRAN

**Tabel Pendapatan Asli Daerah di Tiga Puluh Provinsi di Indonesia pada Periode 2001-2005
(dalam Jutaan Rupiah)**

Provinsi	PAD				
	2001	2002	2003	2004	2005
NAD	48,760.69	92,796.19	103,532.29	198,432.40	262,119.99
Sumut	423,075.22	614,459.38	908,262.19	1,143,128.73	1,372,982.70
Sumbar	140,763.20	213,284.55	281,449.46	375,074.87	448,279.02
Riau	299,423.79	504,384.58	658,548.32	710,384.05	769,561.70
Jambi	87,105.87	149,648.65	225,323.15	287,637.72	344,880.74
Sumsel	190,521.65	289,634.63	428,080.43	493,173.95	590,860.84
Bengkulu	31,116.79	45,510.35	69,012.30	103,611.49	122,165.59
Lampung	148,063.92	237,011.65	306,859.13	410,682.09	549,657.85
DKI	3,644,150.89	4,509,529.75	5,261,851.41	6,430,334.81	7,597,867.92
Jabar	1,211,417.72	1,551,490.97	2,164,337.43	2,846,800.73	3,604,767.57
Jateng	830,974.16	1,242,709.46	1,447,418.91	1,865,390.53	2,490,643.74
DIY	142,284.89	200,808.26	263,309.23	347,410.07	401,912.34
Jatim	1,310,514.76	1,797,052.50	2,196,865.64	2,860,561.59	3,464,580.02
Kalbar	108,241.87	168,506.08	198,409.94	225,373.97	295,462.27
Kalteng	34,224.76	69,062.30	88,488.49	112,680.63	152,092.83
Kalsel	130,702.37	212,006.26	277,679.26	364,181.39	530,110.53
Kaltim	195,604.23	464,136.39	604,418.88	705,451.21	897,515.82
Sulut	77,988.24	104,669.00	119,691.24	147,139.84	199,131.94
Sulteng	55,136.14	83,625.33	100,572.24	122,907.88	141,349.36
Sulsel	200,553.10	325,117.40	445,079.39	563,613.15	675,857.27
Sultra	29,973.57	55,030.32	76,478.89	84,872.85	102,688.67
Bali	190,521.65	465,749.52	382,259.83	559,689.36	742,886.07
NTB	66,544.62	104,554.66	130,281.42	170,222.97	196,615.34
NTT	43,027.07	81,658.56	94,332.01	123,690.37	140,648.94
Papua	64,237.68	96,711.89	117,857.02	162,101.86	198,626.71
Gorontalo	7,762.88	25,537.56	35,873.92	37,821.92	46,173.07
Babel	2,119.04	58,885.49	71,780.12	114,461.63	188,304.37
Banten	203,910.03	440,065.40	641,668.85	818,246.38	1,070,237.77
Maluku	5,577.58	18,998.10	38,304.24	57,507.69	77,357.82
Malut	5,577.58	8,874.30	15,969.50	17,475.00	26,933.24

Sumber: Laporan Realisasi APBD, SIKD DJPK

**Tabel Bagi Hasil Pajak di Tiga Puluh Provinsi di Indonesia pada Periode 2001-2005
(dalam Jutaan Rupiah)**

Provinsi	BHP				
	2001	2002	2003	2004	2005
NAD	39,215.00	41,806.20	49,806.80	49,823.97	84,435.41
Sumut	87,143.10	104,456.00	160,560.90	186,674.99	202,359.85
Sumbar	27,727.30	37,325.70	44,570.40	56,160.41	57,640.62
Riau	134,037.80	164,738.60	235,998.50	229,700.24	246,733.41
Jambi	24,198.50	33,179.40	50,443.30	86,256.22	96,137.32
Sumsel	55,349.40	68,704.00	117,637.70	155,523.04	544,111.76
Bengkulu	8,642.10	10,798.40	13,515.70	7,500.00	22,625.54
Lampung	26,314.70	38,748.70	48,287.70	53,746.58	185,410.33
DKI	2,726,740.70	3,002,623.80	3,677,160.20	4,099,019.15	4,858,538.16
Jabar	313,767.10	332,913.00	412,310.80	487,502.31	542,261.60
Jateng	112,677.20	149,909.80	199,351.30	232,479.05	254,490.50
DIY	21,091.00	26,446.60	31,136.30	35,219.47	38,545.97
Jatim	211,722.10	260,807.40	353,039.10	395,124.93	448,439.93
Kalbar	24,274.00	31,545.80	40,500.00	397,873.82	63,014.51
Kalteng	23,623.60	33,439.20	35,758.10	52,656.87	63,165.17
Kalsel	32,636.60	38,454.00	57,114.10	67,132.96	89,080.85
Kaltim	111,521.00	146,149.30	220,792.70	1,560,390.09	358,035.47
Sulut	12,325.40	16,670.40	21,525.40	23,440.74	26,666.66
Sulteng	11,568.10	13,778.50	15,293.10	22,220.62	36,732.24
Sulse	53,035.90	69,184.00	94,084.30	122,970.34	128,032.22
Sultra	6,917.30	12,244.70	17,445.20	17,050.00	25,274.09
Bali	55,349.40	41,566.90	46,631.10	44,132.41	61,440.43
NTB	17,104.40	25,772.60	31,499.30	30,824.55	42,137.70
NTT	15,914.70	19,976.90	22,487.30	28,406.96	44,439.95
Papua	82,282.10	99,506.90	106,149.80	128,813.60	133,245.00
Gorontalo	3,125.50	4,959.00	6,187.00	6,942.86	12,991.57
Babel	2,844.25	10,494.00	14,777.78	17,567.68	22,744.32
Banten	67,817.03	262,235.11	320,469.54	330,489.91	324,296.99
Maluku	4,378.46	11,945.92	17,458.91	20,736.57	39,149.29
Malut	4,378.46	8,230.65	13,452.23	13,505.00	35,128.08

Sumber: Laporan Realisasi APBD, SIKD DJPK

**Tabel Bagi Hasil SDA di Tiga Puluh Provinsi di Indonesia pada Periode 2001-2005
(dalam Jutaan Rupiah)**

Provinsi	BHSDA				
	2001	2002	2003	2004	2005
NAD	166,031.78	1,205,498.87	642,699.48	1,079,338.18	1,807,379.08
Sumut	27,480.31	20,533.21	17,863.89	6,559.48	2,286.45
Sumbar	6,161.26	4,732.29	5,235.29	5,854.33	4,938.69
Riau	813,650.78	752,881.61	840,687.56	953,478.00	1,444,853.05
Jambi	11,961.73	17,846.62	20,051.26	24,378.07	53,933.23
Sumsel	138,841.78	158,157.00	130,080.74	195,582.85	0.00
Bengkulu	490.25	206.25	357.37	0.00	865.21
Lampung	67,007.37	78,325.00	77,095.49	70,206.55	0.00
DKI	184,651.89	188,659.39	85,744.32	89,722.50	138,445.96
Jabar	76,605.68	104,491.75	106,700.39	136,383.65	107,199.10
Jateng	7,285.12	7,420.73	4,416.39	3,533.64	2,686.16
DIY	1,151.07	1.25	23.76	0.00	0.00
Jatim	33,825.87	32,743.02	13,204.11	4,057.04	6,791.73
Kalbar	12,684.54	8,373.33	1,933.29	2,126.62	3,096.78
Kalteng	46,204.20	27,529.71	17,680.53	21,960.73	21,873.80
Kalsel	97,231.56	85,340.46	11,270.99	26,981.03	60,607.88
Kaltim	1,178,919.57	1,104,384.96	1,279,982.50	0.00	2,168,686.35
Sulut	1,990.84	1,498.18	1,013.93	867.35	77.33
Sulteng	3,544.84	1,069.74	1,956.17	1,769.74	973.31
Sulse	24,601.35	7,053.17	7,848.35	10,158.88	15,915.50
Sultra	6,730.80	1,678.32	2,733.33	3,006.66	4,498.37
Bali	138,841.78	1,493.23	20.09	0.00	0.00
NTB	87,739.83	26,552.46	26,065.55	31,974.43	33,931.42
NTT	1,211.94	77.47	58.06	54.29	37.42
Papua	180,247.38	110,242.13	231,653.22	73,529.92	132,221.64
Gorontalo	3.28	381.93	274.08	654.49	82.09
Babel	7,256.78	6,082.28	20,375.42	22,156.33	36,897.67
Banten	1,459.34	2,735.42	1,583.73	134.76	172.11
Maluku	11,297.00	4,065.45	4,928.57	3,545.53	3,321.01
Malut	15,116.91	11,730.18	7,735.83	8,509.41	17,884.15

Sumber: Laporan Realisasi APBD, SIKD DJPK

Tabel Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Kapasitas Fiskal Daerah
Periode 2001-2005
(dalam Milyaran Rupiah)

obs	KFD?	PD?	RD?	BHP?	PDRB?
_NAD-2001	254.0075	43.35590	2.916000	39.21500	37655.00
_NAD-2002	1340.101	72.73450	3.257100	41.80620	43706.00
_NAD-2003	796.0386	86.89970	3.289000	49.80680	48619.00
_NAD-2004	1327.595	138.2578	3.854850	49.82397	50537.00
_NAD-2005	2153.934	177.4724	0.969250	84.43541	51117.00
_SUMUT-2001	537.6986	388.0177	15.44830	87.14310	79331.00
_SUMUT-2002	739.4486	584.0899	7.127400	104.4560	89670.00
_SUMUT-2003	1086.687	861.9708	16.92850	160.5609	103401.0
_SUMUT-2004	1336.363	1081.372	23.75605	186.6750	118101.0
_SUMUT-2005	1577.629	1301.138	18.85233	202.3598	136903.0
_SUMBAR-2001	174.6518	109.3771	2.837200	27.72730	26154.00
_SUMBAR-2002	255.3425	166.9092	5.479700	37.32570	29899.00
_SUMBAR-2003	331.2552	218.8523	6.940400	44.57040	33131.00
_SUMBAR-2004	437.0896	307.3145	8.105720	56.16041	37359.00
_SUMBAR-2005	510.8583	375.9669	9.405450	57.64062	44675.00
_RIAU-2001	1247.112	251.9512	1.115600	134.0378	107779.0
_RIAU-2002	1422.005	394.3644	3.306100	164.7386	116151.0
_RIAU-2003	1735.234	538.5047	5.729100	235.9985	97275.00
_RIAU-2004	1893.562	610.1505	15.31319	229.7002	114246.0
_RIAU-2005	2461.148	655.8847	30.28518	246.7334	139009.0
_JAMBI-2001	123.2661	72.27410	3.475400	24.19850	11532.00
_JAMBI-2002	200.6747	123.8020	9.599200	33.17940	13941.00
_JAMBI-2003	295.8177	180.5860	25.62710	50.44330	15929.00
_JAMBI-2004	398.2720	246.1521	16.70672	86.25622	18488.00
_JAMBI-2005	494.9513	281.7276	18.45515	96.13732	22487.00
_SUMSEL-2001	384.7128	164.8561	3.445500	55.34940	47100.00
_SUMSEL-2002	516.4956	225.7916	3.034500	68.70400	94500.00
_SUMSEL-2003	675.7989	310.1162	3.200600	117.6377	55939.00
_SUMSEL-2004	844.2798	413.6572	4.748960	155.5230	64319.00
_SUMSEL-2005	1134.973	511.3347	4.011300	544.1118	81532.00
_BENGKULU-2001	40.24914	22.89800	4.663000	8.642100	5508.000
_BENGKULU-2002	56.51500	36.18510	6.309200	10.79840	6276.000
_BENGKULU-2003	82.88537	51.89860	8.726300	13.51570	7252.000
_BENGKULU-2004	111.1115	79.97796	12.97652	7.500000	8105.000
_BENGKULU-2005	145.6563	93.34638	14.80111	22.62554	10008.00
_LAMPUNG-2001	241.3860	110.3712	14.50350	26.31470	25730.00
_LAMPUNG-2002	354.0853	189.0531	21.13040	38.74870	29011.00
_LAMPUNG-2003	432.2423	253.9252	26.60420	48.28770	32357.00
_LAMPUNG-2004	534.6352	350.7721	32.60827	53.74658	36007.00
_LAMPUNG-2005	735.0682	468.3588	48.51198	185.4103	39834.00
_DKI-2001	6555.543	3056.748	240.0121	2726.741	263692.0
_DKI-2002	7700.813	3703.573	319.2685	3002.624	299968.0
_DKI-2003	9024.756	4401.725	336.5168	3677.160	334331.0
_DKI-2004	10619.08	5497.782	423.0595	4099.019	375562.0
_DKI-2005	12594.85	6513.811	419.6743	4858.538	436251.0
_JABAR-2001	1601.791	1126.967	9.458500	313.7671	219187.0
_JABAR-2002	1988.896	1435.021	10.52960	332.9130	241644.0
_JABAR-2003	2683.349	2002.379	13.47150	412.3108	273177.0
_JABAR-2004	3470.687	2688.356	24.81262	487.5023	301012.0
_JABAR-2005	4254.228	3385.937	26.38598	542.2616	387353.0
_JATENG-2001	950.9365	695.3657	68.10470	112.6772	133228.0
_JATENG-2002	1400.040	1024.177	97.30380	149.9098	151969.0
_JATENG-2003	1651.187	1261.490	123.0556	199.3513	171882.0
_JATENG-2004	2101.403	1602.699	146.6439	232.4791	193435.0
_JATENG-2005	2747.820	1996.141	194.1588	254.4905	234435.0
_DIY-2001	164.5270	123.5163	3.964500	21.09100	15229.00
_DIY-2002	227.2561	175.5193	5.093900	26.44660	17522.00
_DIY-2003	294.4693	228.1436	8.091600	31.13630	19613.00
_DIY-2004	382.6295	307.5724	10.42430	35.21947	22024.00
_DIY-2005	440.4583	360.1197	11.94042	38.54597	25248.00

Tabel Lanjutan:

JATIM-2001	1556.063	1149.712	32.44800	211.7221	233882.0
JATIM-2002	2090.603	1553.762	23.65990	260.8074	267158.0
JATIM-2003	2563.109	1910.498	27.23340	353.0391	300610.0
JATIM-2004	3259.744	2540.068	175.9668	395.1249	341065.0
JATIM-2005	3919.812	3089.132	212.0834	448.4399	403392.0
KALBAR-2001	145.2004	96.36410	5.029700	24.27400	21359.00
KALBAR-2002	208.4252	153.4439	6.954600	31.54580	23914.00
KALBAR-2003	240.8432	176.0465	11.07120	40.50000	26063.00
KALBAR-2004	267.2884	192.5585	8.326870	39.78782	29665.00
KALBAR-2005	361.5736	253.7168	20.28109	63.01451	33742.00
KALTENG-2001	104.0526	27.02800	1.994000	23.62360	12317.00
KALTENG-2002	130.0312	54.08510	4.962100	33.43920	14048.00
KALTENG-2003	141.9271	69.66480	8.761900	35.75810	15599.00
KALTENG-2004	187.2982	96.37666	7.544960	52.65687	18266.00
KALTENG-2005	237.1318	128.1057	11.25361	63.16517	21018.00
KALSEL-2001	260.5705	96.18150	7.124500	32.63660	19223.00
KALSEL-2002	335.8007	173.3960	14.71660	38.45400	21156.00
KALSEL-2003	346.0643	238.7541	19.31400	57.11410	23375.00
KALSEL-2004	458.2954	331.0330	3.892430	67.13296	25793.00
KALSEL-2005	679.7993	454.4348	34.13615	89.08085	29075.00
KALTIM-2001	1486.045	144.8388	26.52120	111.5210	91890.00
KALTIM-2002	1714.671	282.0745	66.35350	146.1493	93770.00
KALTIM-2003	2105.194	388.3648	72.62240	220.7927	106454.0
KALTIM-2004	2265.841	520.7874	99.35116	1560.390	133704.0
KALTIM-2005	3424.238	694.8498	105.4791	358.0355	174936.0
SULUT-2001	92.30448	60.13910	3.563900	12.32540	11715.00
SULUT-2002	122.8376	85.60190	5.919600	16.67040	12695.00
SULUT-2003	142.2306	97.23100	7.971400	21.52540	13745.00
SULUT-2004	171.4479	120.4616	8.066440	23.44074	15328.00
SULUT-2005	225.8759	158.3844	8.131420	26.66666	17815.00
SULTENG-2001	70.24908	47.73180	4.476400	11.56810	10380.00
SULTENG-2002	98.47357	71.72690	6.345300	13.77850	11794.00
SULTENG-2003	117.8215	84.25520	6.369000	15.29310	13013.00
SULTENG-2004	146.8982	102.8888	8.189910	22.22062	14658.00
SULTENG-2005	179.0549	120.0263	9.572370	36.73224	17090.00
SULSEL-2001	278.1903	159.8982	9.494700	53.03590	34765.00
SULSEL-2002	401.3546	259.8294	32.29380	69.18400	38511.00
SULSEL-2003	547.0120	357.0468	42.90700	94.08430	42843.00
SULSEL-2004	696.7424	470.3738	45.10671	122.9703	48614.00
SULSEL-2005	819.8050	565.4253	48.68923	128.0322	52043.00
SULTRA-2001	43.62167	20.78870	1.850000	6.917300	6864.000
SULTRA-2002	68.95334	40.43890	4.093900	12.24470	8043.000
SULTRA-2003	96.65742	53.58030	5.673200	17.44520	8909.000
SULTRA-2004	104.9295	54.80350	9.633840	17.05000	10268.00
SULTRA-2005	132.4611	74.06203	10.44837	25.27409	12981.00
BALI-2001	384.7128	164.8561	3.445500	55.34940	20190.00
BALI-2002	508.8097	325.2872	2.414000	41.56690	23856.00
BALI-2003	428.9110	335.1052	4.752500	46.63110	26168.00
BALI-2004	603.8218	508.9137	6.522650	44.13241	28987.00
BALI-2005	804.3265	663.3498	9.693180	61.44043	33946.00
NTB-2001	171.3889	48.54040	7.196900	17.10440	15238.00
NTB-2002	156.8797	73.88090	13.10630	25.77260	16295.00
NTB-2003	187.8463	91.15420	18.63730	31.49930	17500.00
NTB-2004	233.0220	126.4393	17.47278	30.82455	22117.00
NTB-2005	272.6845	149.9835	20.88418	42.13770	25740.00
NTT-2001	60.15371	21.64330	8.364200	15.91470	9138.000
NTT-2002	101.7129	40.86980	13.09810	19.97690	10274.00
NTT-2003	116.8774	52.44050	11.54120	22.48730	11383.00
NTT-2004	152.1516	76.77892	16.68081	28.40696	12877.00
NTT-2005	185.1263	85.54857	19.96262	44.43995	14602.00
PAPUA-2001	326.7672	40.49840	3.231700	82.28210	25906.00
PAPUA-2002	306.4609	61.36840	2.857200	99.50690	22548.00
PAPUA-2003	455.6600	88.20190	6.231400	106.1498	23890.00
PAPUA-2004	364.4454	125.7977	9.158310	128.8136	24843.00
PAPUA-2005	464.0933	136.3015	14.00102	133.2450	43638.00
GORONTALO-2001	10.89166	6.961500	0.192000	3.125500	1823.000
GORONTALO-2002	30.87849	19.59000	0.854500	4.959000	2148.000

Tabel Lanjutan:

GORONTALO-2003	42.33500	25.05760	4.668500	6.187000	2480.000
GORONTALO-2004	45.41927	30.41545	1.361180	6.942860	2802.000
GORONTALO-2005	59.24673	37.40980	2.810510	12.99157	3387.000
BABEL-2001	12.22007	0.378200	0.248870	2.844250	7121.000
BABEL-2002	75.46177	51.07962	0.273760	10.49400	8158.000
BABEL-2003	106.9333	64.80522	0.672500	14.77778	9572.000
BABEL-2004	154.1856	106.8874	0.581370	17.56768	11081.00
BABEL-2005	247.9464	172.1643	0.638050	22.74432	13388.00
BANTEN-2001	273.1864	203.9100	0.908260	67.81703	52643.00
BANTEN-2002	705.0359	429.7403	0.999090	262.2351	60613.00
BANTEN-2003	963.7221	602.6223	1.926010	320.4695	66575.00
BANTEN-2004	1148.871	797.0402	2.163830	330.4899	73714.00
BANTEN-2005	1394.707	1037.939	2.498720	324.2970	84622.00
MALUKU-2001	30.65949	6.800150	1.241080	5.793230	3006.000
MALUKU-2002	35.00947	9.595050	0.805320	11.94592	3465.000
MALUKU-2003	60.69172	25.91946	1.385700	17.45891	3689.000
MALUKU-2004	81.78979	40.64345	8.929520	20.73657	4048.000
MALUKU-2005	119.8281	51.14121	16.27769	39.14929	4571.000
MALUT-2001	25.07295	3.495420	1.250020	4.378460	1953.000
MALUT-2002	28.83513	7.288870	0.003320	8.230650	2035.000
MALUT-2003	37.15756	13.95860	0.003650	13.45223	2175.000
MALUT-2004	39.48941	11.27500	2.050000	13.50500	2368.000
MALUT-2005	79.94547	24.46668	0.515180	35.12808	2581.000

Sumber:

KFD, PD, RD, BHP : Laporan Realisasi APBD, SIKD DJPK

PDRB : Laporan Statistik Indonesia, BPS

Tabel Hasil Estimasi Data Panel dengan *Fixed Effect*:

Dependent Variable: KFD?				
Method: Pooled Least Squares				
Date: 06/01/09 Time: 11:01				
Sample: 2001 2005				
Included observations: 5				
Number of cross-sections used: 30				
Total panel (balanced) observations: 150				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
PD?	1.176148	0.137320	8.565024	0.0000
RD?	0.285468	1.052498	0.271229	0.7867
BHP?	0.435284	0.114812	3.791288	0.0002
PDRB?	0.002311	0.001928	1.199071	0.2329
Fixed Effects				
_NAD--C	921.3461			
_SUMUT--C	-249.3190			
_SUMBAR--C	-35.83016			
_RIAU--C	818.5276			
_JAMBI--C	22.25870			
_SUMSEL--C	87.08555			
_BENGKULU--C	-4.968860			
_LAMPUNG--C	22.44061			
_DKI--C	1359.516			
_JABAR--C	-546.9310			
_JATENG--C	-305.1246			
_DIY--C	-40.78661			
_JATIM--C	-618.5725			
_KALBAR--C	-43.05678			
_KALTENG--C	14.12289			
_KALSEL--C	27.64938			
_KALTIM--C	1213.947			
_SULUT--C	-15.44842			
_SULTENG--C	-19.46413			
_SULSEL--C	-28.83198			
_SULTRA--C	1.567348			
_BALI--C	-8.526636			
_NTB--C	27.07281			
_NTT--C	15.64086			
_PAPUA--C	162.1162			
_GORONTALO--C	0.274324			
_BABEL--C	-2.534412			
_BANTEN--C	-95.79015			
_MALUKU--C	15.45780			
_MALUT--C	16.01472			
R-squared	0.992757	Mean dependent var	969.4498	
Adjusted R-squared	0.990696	S.D. dependent var	1812.635	
S.E. of regression	174.8423	Sum squared resid	3546102.	
F-statistic	5299.503	Durbin-Watson stat	1.828545	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Data diolah dengan *Eviews 4.1*

Estimation Command:

=====

EST(F,M=500,C=0.0001) KFD? PD? RD? BHP? PDRB?

Estimation Equations:

=====

 $KFD_NAD = C(5) + C(1)*PD_NAD + C(2)*RD_NAD + C(3)*BHP_NAD + C(4)*PDRB_NAD$ $KFD_SUMUT = C(6) + C(1)*PD_SUMUT + C(2)*RD_SUMUT + C(3)*BHP_SUMUT + C(4)*PDRB_SUMUT$ $KFD_SUMBAR = C(7) + C(1)*PD_SUMBAR + C(2)*RD_SUMBAR + C(3)*BHP_SUMBAR + C(4)*PDRB_SUMBAR$ $KFD_RIAU = C(8) + C(1)*PD_RIAU + C(2)*RD_RIAU + C(3)*BHP_RIAU + C(4)*PDRB_RIAU$ $KFD_JAMBI = C(9) + C(1)*PD_JAMBI + C(2)*RD_JAMBI + C(3)*BHP_JAMBI + C(4)*PDRB_JAMBI$ $KFD_SUMSEL = C(10) + C(1)*PD_SUMSEL + C(2)*RD_SUMSEL + C(3)*BHP_SUMSEL + C(4)*PDRB_SUMSEL$ $KFD_BENGKULU = C(11) + C(1)*PD_BENGKULU + C(2)*RD_BENGKULU + C(3)*BHP_BENGKULU + C(4)*PDRB_BENGKULU$ $KFD_LAMPUNG = C(12) + C(1)*PD_LAMPUNG + C(2)*RD_LAMPUNG + C(3)*BHP_LAMPUNG + C(4)*PDRB_LAMPUNG$ $KFD_DKI = C(13) + C(1)*PD_DKI + C(2)*RD_DKI + C(3)*BHP_DKI + C(4)*PDRB_DKI$ $KFD_JABAR = C(14) + C(1)*PD_JABAR + C(2)*RD_JABAR + C(3)*BHP_JABAR + C(4)*PDRB_JABAR$ $KFD_JATENG = C(15) + C(1)*PD_JATENG + C(2)*RD_JATENG + C(3)*BHP_JATENG + C(4)*PDRB_JATENG$ $KFD_DIY = C(16) + C(1)*PD_DIY + C(2)*RD_DIY + C(3)*BHP_DIY + C(4)*PDRB_DIY$ $KFD_JATIM = C(17) + C(1)*PD_JATIM + C(2)*RD_JATIM + C(3)*BHP_JATIM + C(4)*PDRB_JATIM$ $KFD_KALBAR = C(18) + C(1)*PD_KALBAR + C(2)*RD_KALBAR + C(3)*BHP_KALBAR + C(4)*PDRB_KALBAR$ $KFD_KALTENG = C(19) + C(1)*PD_KALTENG + C(2)*RD_KALTENG + C(3)*BHP_KALTENG + C(4)*PDRB_KALTENG$ $KFD_KALSEL = C(20) + C(1)*PD_KALSEL + C(2)*RD_KALSEL + C(3)*BHP_KALSEL + C(4)*PDRB_KALSEL$ $KFD_KALTIM = C(21) + C(1)*PD_KALTIM + C(2)*RD_KALTIM + C(3)*BHP_KALTIM + C(4)*PDRB_KALTIM$ $KFD_SULUT = C(22) + C(1)*PD_SULUT + C(2)*RD_SULUT + C(3)*BHP_SULUT + C(4)*PDRB_SULUT$ $KFD_SULTENG = C(23) + C(1)*PD_SULTENG + C(2)*RD_SULTENG + C(3)*BHP_SULTENG + C(4)*PDRB_SULTENG$ $KFD_SULSEL = C(24) + C(1)*PD_SULSEL + C(2)*RD_SULSEL + C(3)*BHP_SULSEL + C(4)*PDRB_SULSEL$ $KFD_SULTRA = C(25) + C(1)*PD_SULTRA + C(2)*RD_SULTRA + C(3)*BHP_SULTRA + C(4)*PDRB_SULTRA$ $KFD_BALI = C(26) + C(1)*PD_BALI + C(2)*RD_BALI + C(3)*BHP_BALI + C(4)*PDRB_BALI$ $KFD_NTB = C(27) + C(1)*PD_NTB + C(2)*RD_NTB + C(3)*BHP_NTB + C(4)*PDRB_NTB$

$$\text{KFD_NTT} = \text{C}(28) + \text{C}(1)*\text{PD_NTT} + \text{C}(2)*\text{RD_NTT} + \text{C}(3)*\text{BHP_NTT} + \text{C}(4)*\text{PDRB_NTT}$$

$$\text{KFD_PAPUA} = \text{C}(29) + \text{C}(1)*\text{PD_PAPUA} + \text{C}(2)*\text{RD_PAPUA} + \text{C}(3)*\text{BHP_PAPUA} + \text{C}(4)*\text{PDRB_PAPUA}$$

$$\text{KFD_GORONTALO} = \text{C}(30) + \text{C}(1)*\text{PD_GORONTALO} + \text{C}(2)*\text{RD_GORONTALO} + \text{C}(3)*\text{BHP_GORONTALO} + \text{C}(4)*\text{PDRB_GORONTALO}$$

$$\text{KFD_BABEL} = \text{C}(31) + \text{C}(1)*\text{PD_BABEL} + \text{C}(2)*\text{RD_BABEL} + \text{C}(3)*\text{BHP_BABEL} + \text{C}(4)*\text{PDRB_BABEL}$$

$$\text{KFD_BANTEN} = \text{C}(32) + \text{C}(1)*\text{PD_BANTEN} + \text{C}(2)*\text{RD_BANTEN} + \text{C}(3)*\text{BHP_BANTEN} + \text{C}(4)*\text{PDRB_BANTEN}$$

$$\text{KFD_MALUKU} = \text{C}(33) + \text{C}(1)*\text{PD_MALUKU} + \text{C}(2)*\text{RD_MALUKU} + \text{C}(3)*\text{BHP_MALUKU} + \text{C}(4)*\text{PDRB_MALUKU}$$

$$\text{KFD_MALUT} = \text{C}(34) + \text{C}(1)*\text{PD_MALUT} + \text{C}(2)*\text{RD_MALUT} + \text{C}(3)*\text{BHP_MALUT} + \text{C}(4)*\text{PDRB_MALUT}$$

Substituted Coefficients:

=====

$$\text{KFD_NAD} = 921.3461132 + 1.176147585*\text{PD_NAD} + 0.2854680324*\text{RD_NAD} + 0.4352839845*\text{BHP_NAD} + 0.002311351237*\text{PDRB_NAD}$$

$$\text{KFD_SUMUT} = -249.3189682 + 1.176147585*\text{PD_SUMUT} + 0.2854680324*\text{RD_SUMUT} + 0.4352839845*\text{BHP_SUMUT} + 0.002311351237*\text{PDRB_SUMUT}$$

$$\text{KFD_SUMBAR} = -35.83015735 + 1.176147585*\text{PD_SUMBAR} + 0.2854680324*\text{RD_SUMBAR} + 0.4352839845*\text{BHP_SUMBAR} + 0.002311351237*\text{PDRB_SUMBAR}$$

$$\text{KFD_RIAU} = 818.5275917 + 1.176147585*\text{PD_RIAU} + 0.2854680324*\text{RD_RIAU} + 0.4352839845*\text{BHP_RIAU} + 0.002311351237*\text{PDRB_RIAU}$$

$$\text{KFD_JAMBI} = 22.25869519 + 1.176147585*\text{PD_JAMBI} + 0.2854680324*\text{RD_JAMBI} + 0.4352839845*\text{BHP_JAMBI} + 0.002311351237*\text{PDRB_JAMBI}$$

$$\text{KFD_SUMSEL} = 87.08554918 + 1.176147585*\text{PD_SUMSEL} + 0.2854680324*\text{RD_SUMSEL} + 0.4352839845*\text{BHP_SUMSEL} + 0.002311351237*\text{PDRB_SUMSEL}$$

$$\text{KFD_BENGKULU} = -4.968859615 + 1.176147585*\text{PD_BENGKULU} + 0.2854680324*\text{RD_BENGKULU} + 0.4352839845*\text{BHP_BENGKULU} + 0.002311351237*\text{PDRB_BENGKULU}$$

$$\text{KFD_LAMPUNG} = 22.44060681 + 1.176147585*\text{PD_LAMPUNG} + 0.2854680324*\text{RD_LAMPUNG} + 0.4352839845*\text{BHP_LAMPUNG} + 0.002311351237*\text{PDRB_LAMPUNG}$$

$$\text{KFD_DKI} = 1359.515532 + 1.176147585*\text{PD_DKI} + 0.2854680324*\text{RD_DKI} + 0.4352839845*\text{BHP_DKI} + 0.002311351237*\text{PDRB_DKI}$$

$$\text{KFD_JABAR} = -546.9310143 + 1.176147585*\text{PD_JABAR} + 0.2854680324*\text{RD_JABAR} + 0.4352839845*\text{BHP_JABAR} + 0.002311351237*\text{PDRB_JABAR}$$

$$\text{KFD_JATENG} = -305.1245947 + 1.176147585*\text{PD_JATENG} + 0.2854680324*\text{RD_JATENG} + 0.4352839845*\text{BHP_JATENG} + 0.002311351237*\text{PDRB_JATENG}$$

$$\text{KFD_DIY} = -40.78661493 + 1.176147585*\text{PD_DIY} + 0.2854680324*\text{RD_DIY} + 0.4352839845*\text{BHP_DIY} + 0.002311351237*\text{PDRB_DIY}$$

$$\text{KFD_JATIM} = -618.5724975 + 1.176147585*\text{PD_JATIM} + 0.2854680324*\text{RD_JATIM} + 0.4352839845*\text{BHP_JATIM} + 0.002311351237*\text{PDRB_JATIM}$$

$$\text{KFD_KALBAR} = -43.05678039 + 1.176147585*\text{PD_KALBAR} + 0.2854680324*\text{RD_KALBAR} + 0.4352839845*\text{BHP_KALBAR} + 0.002311351237*\text{PDRB_KALBAR}$$

$$\text{KFD_KALTENG} = 14.12289029 + 1.176147585*\text{PD_KALTENG} + 0.2854680324*\text{RD_KALTENG} + 0.4352839845*\text{BHP_KALTENG} + 0.002311351237*\text{PDRB_KALTENG}$$

$$\text{KFD_KALSEL} = 27.64938177 + 1.176147585 \cdot \text{PD_KALSEL} + 0.2854680324 \cdot \text{RD_KALSEL} + 0.4352839845 \cdot \text{BHP_KALSEL} + 0.002311351237 \cdot \text{PDRB_KALSEL}$$

$$\text{KFD_KALTIM} = 1213.947005 + 1.176147585 \cdot \text{PD_KALTIM} + 0.2854680324 \cdot \text{RD_KALTIM} + 0.4352839845 \cdot \text{BHP_KALTIM} + 0.002311351237 \cdot \text{PDRB_KALTIM}$$

$$\text{KFD_SULUT} = -15.44841737 + 1.176147585 \cdot \text{PD_SULUT} + 0.2854680324 \cdot \text{RD_SULUT} + 0.4352839845 \cdot \text{BHP_SULUT} + 0.002311351237 \cdot \text{PDRB_SULUT}$$

$$\text{KFD_SULTENG} = -19.46412689 + 1.176147585 \cdot \text{PD_SULTENG} + 0.2854680324 \cdot \text{RD_SULTENG} + 0.4352839845 \cdot \text{BHP_SULTENG} + 0.002311351237 \cdot \text{PDRB_SULTENG}$$

$$\text{KFD_SULSEL} = -28.83198402 + 1.176147585 \cdot \text{PD_SULSEL} + 0.2854680324 \cdot \text{RD_SULSEL} + 0.4352839845 \cdot \text{BHP_SULSEL} + 0.002311351237 \cdot \text{PDRB_SULSEL}$$

$$\text{KFD_SULTRA} = 1.567348337 + 1.176147585 \cdot \text{PD_SULTRA} + 0.2854680324 \cdot \text{RD_SULTRA} + 0.4352839845 \cdot \text{BHP_SULTRA} + 0.002311351237 \cdot \text{PDRB_SULTRA}$$

$$\text{KFD_BALI} = -8.526635765 + 1.176147585 \cdot \text{PD_BALI} + 0.2854680324 \cdot \text{RD_BALI} + 0.4352839845 \cdot \text{BHP_BALI} + 0.002311351237 \cdot \text{PDRB_BALI}$$

$$\text{KFD_NTB} = 27.07280928 + 1.176147585 \cdot \text{PD_NTB} + 0.2854680324 \cdot \text{RD_NTB} + 0.4352839845 \cdot \text{BHP_NTB} + 0.002311351237 \cdot \text{PDRB_NTB}$$

$$\text{KFD_NTT} = 15.64086161 + 1.176147585 \cdot \text{PD_NTT} + 0.2854680324 \cdot \text{RD_NTT} + 0.4352839845 \cdot \text{BHP_NTT} + 0.002311351237 \cdot \text{PDRB_NTT}$$

$$\text{KFD_PAPUA} = 162.1162372 + 1.176147585 \cdot \text{PD_PAPUA} + 0.2854680324 \cdot \text{RD_PAPUA} + 0.4352839845 \cdot \text{BHP_PAPUA} + 0.002311351237 \cdot \text{PDRB_PAPUA}$$

$$\text{KFD_GORONTALO} = 0.2743241138 + 1.176147585 \cdot \text{PD_GORONTALO} + 0.2854680324 \cdot \text{RD_GORONTALO} + 0.4352839845 \cdot \text{BHP_GORONTALO} + 0.002311351237 \cdot \text{PDRB_GORONTALO}$$

$$\text{KFD_BABEL} = -2.534412453 + 1.176147585 \cdot \text{PD_BABEL} + 0.2854680324 \cdot \text{RD_BABEL} + 0.4352839845 \cdot \text{BHP_BABEL} + 0.002311351237 \cdot \text{PDRB_BABEL}$$

$$\text{KFD_BANTEN} = -95.79014545 + 1.176147585 \cdot \text{PD_BANTEN} + 0.2854680324 \cdot \text{RD_BANTEN} + 0.4352839845 \cdot \text{BHP_BANTEN} + 0.002311351237 \cdot \text{PDRB_BANTEN}$$

$$\text{KFD_MALUKU} = 15.45780374 + 1.176147585 \cdot \text{PD_MALUKU} + 0.2854680324 \cdot \text{RD_MALUKU} + 0.4352839845 \cdot \text{BHP_MALUKU} + 0.002311351237 \cdot \text{PDRB_MALUKU}$$

$$\text{KFD_MALUT} = 16.0147224 + 1.176147585 \cdot \text{PD_MALUT} + 0.2854680324 \cdot \text{RD_MALUT} + 0.4352839845 \cdot \text{BHP_MALUT} + 0.002311351237 \cdot \text{PDRB_MALUT}$$

Tabel Nilai Residu *Pooled Least Square*

obs	NAD	SUMUT	SUMBAR	RIAU	JAMBI	SUMSEL	BENGKULU	LAMPUNG	DKI	JABAR
2001	-98.58275	-240.479	-111.6858	304.517	-65.58134	-77.71012	-81.60709	-67.16461	-263.9064	-483.7412
2002	940.6006	-154.3533	-87.03347	345.7763	-41.97062	-253.3518	-79.98438	-26.30945	-68.35411	-334.6585
2003	353.0097	-59.89618	-56.71808	623.5164	-33.8631	36.50635	-72.62801	-10.087	-127.7863	-87.38373
2004	859.1045	-3.921473	-17.09951	652.9345	5.932497	72.35253	-57.47561	25.12653	147.7807	230.92
2005	1628.973	61.41666	-8.125452	1007.529	52.31925	-317.2351	-63.16503	-51.48214	432.0129	256.1373
\bar{e}	736.62101	-79.4466586	-56.1324624	586.85464	-16.6326626	-107.887628	-70.972024	-25.983334	23.949358	-83.745226
$(T\bar{e})$	3683.10505	-397.233293	-280.662312	2934.2732	-83.163313	-539.43814	-354.86012	-129.91667	119.74679	-418.72613
$(T\bar{e})^2$	13565262.81	157794.2891	78771.33338	8609959.212	6916.136629	290993.5069	125925.7048	16878.34114	14339.29372	175331.5719
obs	JATENG	DIY	JATIM	KALBAR	KALTENG	KALSEL	KALTIM	SULUT	SULTENG	SULSEL
2001	-372.6641	-55.36512	-525.746	-110.1503	-73.62142	0.850286	637.2153	-77.66939	-89.83776	-122.1391
2002	-235.109	-29.36511	-336.7705	-91.01301	-85.34083	19.70174	680.0783	-70.85338	-83.29571	-120.8915
2003	-288.684	-1.150822	-288.7284	-98.93808	-98.30602	-36.69055	848.9663	-72.10159	-76.40411	-84.79127
2004	-150.8041	41.71337	-383.435	-90.2544	-96.63168	58.64257	-1164.567	-60.90477	-75.63913	-43.68514
2005	19.43089	59.33495	-381.4174	-95.50688	-94.25316	129.7381	1423.142	-35.27149	-85.84802	19.9882
\bar{e}	-205.566062	3.0334536	-383.21946	-97.172534	-89.630622	34.4484292	484.96698	-63.360124	-82.204946	-70.303762
$(T\bar{e})$	-1027.83031	15.167268	-1916.0973	-485.86267	-448.15311	172.242146	2424.8349	-316.80062	-411.02473	-351.51881
$(T\bar{e})^2$	1056435.146	230.0460186	3671428.863	236062.5341	200841.21	29667.35686	5879824.292	100362.6328	168941.3287	123565.4738
obs	SULTRA	BALI	NTB	NTT	PAPUA	GORONTALO	BABEL	BANTEN	MALUKU	MALUT
2001	-76.67688	77.65806	-31.06224	-101.1654	-19.78514	-67.58153	-94.89026	-243.3305	-60.80861	-57.46365
2002	-75.8874	161.8456	-83.95891	-87.61857	-49.89102	-56.82011	-61.58428	-194.2441	-67.66335	-57.84469
2003	-67.57254	53.5308	-85.10072	-81.87908	67.5461	-59.07771	-48.82396	-99.68914	-56.65933	-59.52393
2004	-75.86575	167.4727	-71.96164	-81.57128	-77.90497	-52.80775	-24.79961	-20.19502	-63.18198	-62.33554
2005	-82.55168	267.9879	-83.17992	-91.2362	-106.7806	-56.10433	31.45791	109.4358	-73.91297	-54.02418
\bar{e}	-75.71085	145.699012	-71.052686	-88.694106	-37.363126	-58.478286	-39.72804	-89.604592	-64.445248	-58.238398
$(T\bar{e})$	-378.55425	728.49506	-355.26343	-443.47053	-186.81563	-292.39143	-198.6402	-448.02296	-322.22624	-291.19199
$(T\bar{e})^2$	143303.3202	530705.0524	126212.1047	196666.111	34900.07961	85492.74834	39457.92906	200724.5727	103829.7497	84792.77504
$\Sigma(T\bar{e})^2 = 36055615.53$										

Tabel Perhitungan Uji Hausman

BETA	
C1	
Last updated: 06/01/09 - 11:33	
R1	-1.379729
R2	0.380422
R3	0.025599
R4	0.202981
R5	0.429926

COVAR					
	C1	C2	C3	C4	C5
Last updated: 06/01/09 - 11:34					
R1	0.219425	0.002559	0.001766	0.007820	-0.025848
R2	0.002559	0.001212	-0.000103	-0.000905	-0.000479
R3	0.001766	-0.000103	0.000338	-6.93E-05	-0.000161
R4	0.007820	-0.000905	-6.93E-05	0.002151	-0.001141
R5	-0.025848	-0.000479	-0.000161	-0.001141	0.003240

B_FIXED	
C1	
Last updated: 06/01/09 - 11:30	
R1	0.406087
R2	0.028949
R3	0.118634
R4	0.639066

B_GLS	
C1	
Last updated: 06/01/09 - 11:35	
R1	0.380422
R2	0.025599
R3	0.202981
R4	0.429926

COV_FIXED				
	C1	C2	C3	C4
Last updated: 06/01/09 - 11:31				
R1	0.001389	-3.33E-05	-0.000998	-0.001556
R2	-3.33E-05	0.000379	-6.52E-05	-0.000649
R3	-0.000998	-6.52E-05	0.002558	-0.002038
R4	-0.001556	-0.000649	-0.002038	0.013957

COV_GLS				
	C1	C2	C3	C4
Last updated: 06/01/09 - 11:36				
R1	0.001212	-0.000103	-0.000905	-0.000479
R2	-0.000103	0.000338	-6.93E-05	-0.000161
R3	-0.000905	-6.93E-05	0.002151	-0.001141
R4	-0.000479	-0.000161	-0.001141	0.003240

B_DIFF	
C1	
Last updated: 06/01/09 - 11:36	
R1	0.025665
R2	0.003350
R3	-0.084346
R4	0.209140

V_DIFF				
	C1	C2	C3	C4
Last updated: 06/01/09 - 11:37				
R1	0.000178	7.00E-05	-9.24E-05	-0.001077
R2	7.00E-05	4.12E-05	4.07E-06	-0.000488
R3	-9.24E-05	4.07E-06	0.000408	-0.000897
R4	-0.001077	-0.000488	-0.000897	0.010717

H	
C1	
Last updated: 06/01/09 - 11:39	
R1	16.46946

